

297.07
Abd
P



PRIMORDIALISME KEAGAMAAN DALAM MASYARAKAT ISLAM INDONESIA

PRIMORDIALISME KEAGAMAAN DALAM MASYARAKAT ISLAM INDONESIA



Penulis :
Abdussomad
Asfar Marzuki
Endang Turmudi
Jaleswari Pramodhawardani

Editor :
Abdussomad



Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

KATALOG DALAM TERBITAN

Abdussomad

Primordialisme Keagamaan dalam Masyarakat Islam Indonesia/Abdussomad; Asfar Marzuki; Endang Turmudi; Jaleswari Pramodhawardani - Jakarta : LIPI, 2005

vii, 145 hal, 21 cm

ISBN 979-3673-68-0

1. MASYARAKAT ISLAM - INDONESIA
2. AGAMA ISLAM

297.07

Penerbit : LIPI Press, Anggota IKAPI
Jl. Gondangdia Lama 39, Menteng, Jakarta 10350
Telp. 314 0228, 314 6942 Fax. 314 4591
e-mail : bmrlipi@uninet.net.id
lipipress@uninet.net.id



PRIMORDIALISME KEAGAMAAN DALAM MASYARAKAT ISLAM INDONESIA

Copyright© 2005 Puslit. Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI
Gedung Widya Graha, Lt. VI & IX
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan
Telp/Fax. : (021) 5701232

Sumber Gambar Sampul : AP Photo/Vincent Thian/Majalah TEMPO,
25 Juli 2004/Edisi 19-25 Juli 2004

KATA PENGANTAR

Di negara berkembang seperti Indonesia masalah ketidakstabilan politik sering menjadi faktor yang tidak kondusif bagi pembangunan bangsa dan masyarakat. Salah satunya adalah karena masih kuatnya primordialisme keagamaan. Sama seperti primordialisme kesukuan, primordialisme keagamaan dapat menjadi bumerang bagi pembangunan, lebih-lebih dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, baik dilihat dari suku, ras, dan agamanya. Dalam sejarah Indonesia dampak sosial yang disebabkan oleh hal ini telah menuai sejumlah korban yang tak diinginkan.

Munculnya kembali partai-partai politik sejak tumbangnya rezim Orde Baru telah mengkhawatirkan sejumlah pihak karena ditengarai akan membangkitkan kembali masalah primordialisme agama. Bila persoalan ini dicoba untuk diangkat, bukan berarti bahwa primordialisme (agama atau suku) merupakan sesuatu yang perlu dinafikan kehadirannya. Sebagai konsekuensi dari keberadaan kelompok sosial (termasuk agama), masalah primordialisme itu sendiri sebenarnya merupakan hal yang wajar yang bisa muncul dalam setiap individu atau masyarakat. Akan tetapi, karena ia dapat mendorong ke situasi yang disintegratif, masalah ini perlu dicermati agar tak mengganggu tumbuhnya kedewasaan politik.

Atas dasar itu, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) LIPI mencoba melakukan penelitian tentang Primordialisme Keagamaan dalam Masyarakat Islam Indonesia. Penelitian yang dilakukan di dua provinsi ini (Sulawesi Selatan dan Jawa Timur) berusaha untuk melihat bagaimana orientasi keagamaan membentuk sentimen tertentu yang menentukan kekelompokan seseorang. Dalam hubungan ini pertanyaan yang dicoba untuk dicarikan penjelasannya adalah sejauh manakah kekuatan intensitas primordialisme keagamaan dalam kehidupan politik

masyarakat dan faktor apa yang mendorong berkembangnya sikap demokratis dalam kehidupan politik masyarakat?

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini dilakukan oleh empat orang peneliti Puslitbang Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) LIPI yang terdiri atas Dr. Endang Turmudi, Drs. Asfar Marzuki, Dra. Jaleswari Pramowardhani, dan Drs. Abdussomad, MA sebagai koordinator. Sejumlah orang yang tak bisa disebutkan namanya di sini telah pula membantu pelaksanaan penelitian ini, terutama pembantu penelitian di lapangan, pejabat pemerintah daerah, tokoh dan anggota masyarakat.

Laporan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara. Tetapi, tentu saja sebagai sebuah karya ilmiah, sangat disadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, sangat diharapkan adanya saran dan kritik yang bermanfaat bagi perbaikan tulisan ini.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini diucapkan terima kasih.

Jakarta, Desember 2005

Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan
Kebudayaan (PMB) LIPI

Ttd.

Dr. M. Hisyam, APU
NIP 320002816

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PRIMORDIALISME KEAGAMAAN DALAM MASYARAKAT ISLAM INDONESIA: PENGANTAR KAJIAN	1
Oleh <i>Endang Turmudi</i>	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan Penelitian.....	3
1.3 Tujuan	4
1.4 Ruang Lingkup.....	4
1.5 Review Literatur.....	5
1.6 Pemahaman Konsep.....	11
1.7 Metode Pengumpulan data	12
1.8. Arti Penting Penelitian	13
Daftar Pustaka	14
BAB II STUDI KASUS KABUPATEN MALANG	17
Oleh <i>M. Asfar Marzuki</i>	
2.1 Pendahuluan	17
2.2 Deskripsi Daerah Penelitian	18
2.2.1 Kondisi Geografi	19
2.2.2 Kondisi Sosial Ekonomi	20
2.2.3 Kondisi Sosial Politik	23
2.3 Agama dan Politik.....	26
2.4 Peta Politik Islam	27
2.4.1 Masa Orde Lama	28
2.4.2 Masa Orde Baru	30

2.4.3 Masa Reformasi	33
2.5 Kegagalan Islam Politik	38
2.6 Islam dan Negara.....	43
2.7 Daulah Islamiyah (Negara Islam).....	47
Daftar Pustaka	55
BAB III STUDI KASUS KOTA MALANG.....	57
Oleh <i>Abdussomad</i>	
3.1 Pendahuluan	57
3.2 Dikotomi Santri – Abangan dan Hubungan Sosialnya	61
3.3 Masalah Kerukunan Hidup Beragama di Kota Malang	65
3.4 Studi Kasus Kehidupan Beragama Masyarakat Kauman	73
3.5 Potret Politik Umat Islam Kota Malang	79
Daftar Pustaka	91
BAB IV STUDI KASUS DI MAKASSAR	93
Oleh <i>Endang Turmudi</i>	
4.1 Pendahuluan	93
4.2 Politik Lokal.....	94
4.3 Memudarnya Primordialisme Islam	97
4.4 Fragmentasi Baru	106
4.5 Berpolitik secara Rasional: Temuan Lapangan	110
Daftar Pustaka	119
BAB V STUDI KASUS MASYARAKAT PARANG TAMBUNG, MAKASSAR	121
Oleh <i>Jaleswari Pramodhawardani</i>	
5.1 Sepotong Kisah	121
5.2 Permasalahan.....	122
5.3 Gambaran Umum Lokasi Penelitian (Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate.....	123
5.4. Profil Responden.....	125

5.5. Primordialisme, Agama & Pemilu	128
5.6. Beberapa Kenyataan Sosial Politik Berikut Ini Mungkin Menarik Diperhatikan	137
5.7. Penutup.....	138
Daftar Pustaka	139

BAB VI KESIMPULAN	141
Oleh <i>Abdussomad</i>	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Hasil Pemilu Empat Partai Besar Kota Malang Tahun 1995.....	62
Tabel 2	Penilaian Responden tentang Hubungan antar Kelompok Umat Islam	74
Tabel 3	Penilaian Responden tentang Konflik	75
Tabel 4	Tentang Dai yang Suka Menyerang Kelompok Lain	76
Tabel 5	Hasil Pemilu Kota Malang Tahun 1971, 1987, 1992, dan 1997.....	81
Tabel 6	Hasil Pemilu Legislatif 10 Partai Terbesar Tahun 1999 dan 2004 Kota Malang.....	83
Tabel 7	Pandangan Responden tentang Keharusan Pendirian Negara Islam	85
Tabel 8	Pandangan Responden tentang Kehadiran Partai Agama.....	86
Tabel 9	Hasil Pemilu 2004 Kelurahan Kauman, Klojen, Kota Malang.....	89
Tabel 10	Hasil Pemilu Tahun 1955	100
Tabel 11	Perbandingan Hasil Pemilihan Umum 1955 di Wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara.....	100
Tabel 12	Perolehan Suara Masing-Masing OPP untuk Pemilihan Anggota DPR	101
Tabel 13	Partai yang Dipilih Responden pada Pemilu 2004	111
Tabel 14	Alasan Responden dalam Mendukung Partai	113

Tabel 15	Kehadiran Responden dalam Kampanye Partai Politik.....	115
Tabel 16	Sikap Responden terhadap Partai Agama.....	115
Tabel 17	Sikap Responden terhadap Presiden Orang Islam	117
Tabel 18	Perlunya Memperkuat Reformasi.....	118
Tabel 19	Daftar Perolehan Suara Pemilu 2004 Perbandingan antara Parang Tambung dan Kecamatan Tamalate	126
Tabel 20	Hasil Pemilu Tahun 1955 Wilayah Sulawesi Selatan.....	131
Tabel 21	Perbandingan Hasil Pemilu 1955 Wilayah Sulawesi Selatan dan Indonesia.....	131
Tabel 22	Alasan Mendukung Parpol Tertentu.....	132

BAB I

PRIMORDIALISME KEAGAMAAN DALAM MASYARAKAT ISLAM INDONESIA: PENGANTAR KAJIAN

Oleh Endang Turmudi

1.1 Latar Belakang

Pembangunan masyarakat secara nasional mempersyaratkan hadirnya situasi politik yang stabil dan kondusif melalui ditumbuhkannya kedewasaan berpolitik masyarakat. Kedewasaan politik ini merupakan prasyarat penting karena tanpa itu pembangunan akan sering dilanda hambatan. Kedewasaan berpolitik biasanya ditandai di antaranya oleh menurunnya kecenderungan primordialisme dan keterikatan ideologis. Dalam kedewasaan seperti itu akan berkembang kesadaran pluralisme dengan tanpa mengabaikan perlunya kesatuan sebagai bangsa (aspek *fraternity* demokrasi); dan partisipasi aktif masyarakat diarahkan untuk mencapai tujuan bersama. Pengidentifikasian diri sebagai warga bangsa adalah penting dalam pembangunan ini, karena ia akan menyingkirkan kepentingan sempit golongan. Dengan kata lain, kedewasaan berpolitik itu akan ditandai oleh sikap-sikap politik yang rasional, dengan makin hilangnya semangat golongan.

Reformasi politik, agar berhasil, haruslah diikuti oleh dikembangkannya kedewasaan berpolitik masyarakat tadi. Orientasi politik harus mendudukan politik lebih merupakan sarana yang bisa menunjang pembangunan, dan politik, karenanya, jangan lagi dimasuki, misalnya, oleh tuntutan moral agama secara berlebihan. Sikap politik bukan saja harus semakin tidak ideologis tetapi juga ditandai oleh berkurangnya ikatan-ikatan primordial tradisional. Dalam hal ini dukungan dan tindakan politik masyarakat harus lebih

didasarkan pada sikap-sikap yang memperlihatkan kedewasaan tadi (*political maturation*).

Lepas dari telah berhasilnya beberapa aspek dalam reformasi politik yang dilakukan, harus diakui bahwa proses demokratisasi sebagai agenda penting reformasi tadi mengalami banyak hambatan. Perubahan yang dibawa oleh reformasi ternyata baru terbatas pada perubahan structural, seperti berubahnya sistem pemilu dan kepartaian, sementara dalam kaitannya dengan sikap (*attitude*), perubahan itu masih terasa minim. Berbagai faktor memang mempengaruhi lambatnya perubahan dalam hal sikap tadi, seperti terlihat dari tidak memadainya para elit politik dilihat dari segi kualitas mereka, atau juga tidak tersedianya kultur demokrasi dalam masyarakat Indonesia sendiri. Karena itulah tidak mengherankan jika semangat ‘ideology oriented’ dan primordialisme, misalnya, masih menghiasi para elit politik dan sikap-sikap masyarakat.

Jadi, di luar telah adanya perubahan, seperti terlihat dari berubahnya sistem kepartaian dan hadirnya institusi-institusi politik, perubahan dalam bidang kebudayaan politik masih jauh dari yang diharapkan. Demokratisasi yang telah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan politik malah telah mendorong munculnya kebebasan yang berlebihan. Demokrasi yang dianggap sebagai media berpolitik untuk memperbaiki keadaan justru telah bergeser menjadi oklokasi¹, dalam mana pilar kebersamaan sebagai bangsa yang mempunyai tujuan tertentu seperti tidak dipedulikan lagi, karena masyarakat, terutama para elit, lebih mengedepankan kebebasan yang diberikan demokrasi tadi, sehingga dalam pentas politik Indonesia sering muncul konflik yang bahkan melibatkan masyarakat bawah (*grassroots*) karena unsur primordialisme cukup mempengaruhi politik mereka.

¹ Polybius telah mengartikan terminology ini sebagai “democracy’s perversion, the arbitrary rule of the many” (lihat Pennock, 1979:3).

Konflik politik yang diakibatkan oleh primordialisme ini telah menghiasi pemilu 1999. Masyarakat pendukung partai politik telah ikut terlibat konflik hanya karena para elit partai yang mereka dukung, berkonflik dengan elit partai lain. Secara lebih spesifik, primordialisme yang menghiasi dunia politik Indonesia bisa dilihat dalam masa-masa pemilihan presiden paska pemilu 1999. Dalam masa itu begitu terasa adanya persaingan yang dihiasi oleh konflik-konflik kecil antara para pendukung partai-partai Islam dan partai yang berkarakter sekuler (non-agama).

Meskipun konflik yang kemudian muncul saat itu menggambarkan hadirnya primordialisme keagamaan, hal ini memang tidak dengan sendirinya berarti politik yang muncul semuanya berbau primordialistis. Setidaknya dari kalangan Islam sendiri misalnya telah muncul partai-partai yang tidak berbasiskan agama, seperti PKB atau PAN. Penelitian akan difokuskan untuk melihat primordialisme melalui kebudayaan politik kalangan Islam, yang di antaranya diperlihatkan melalui sikap mereka dalam mendukung partai politik.

1.2 Permasalahan Penelitian

Penelitian ini diarahkan untuk melihat masalah primordialisme keagamaan yang terekspresikan melalui dukungan terhadap partai politik. Dalam penelitian ini dilihat sejauh mana aspirasi yang berasal dari suatu kelompok keagamaan terekspresikan dalam kehidupan berpolitik masyarakat. Apakah perilaku memilih (electoral behaviour) masyarakat santri masih dipengaruhi oleh orientasi ideologis (Islam) mereka? Kalau kemoderenan (modernitas) itu berkaitan dengan meningkatnya kapasitas (*mentally*) masyarakat, dengan mana ikatan-ikatan sempit kesukuan atau keagamaan akan tergantikan oleh ditumbuhkannya solidaritas sebagai kelompok besar, seperti bangsa, apakah semangat kekelompokan atau orientasi

kelompok keagamaan masih cukup kuat dalam masyarakat Islam di Indonesia. Apakah kecenderungan untuk melebur sebagai suatu kelompok Islam dan bagian dari bangsa tumbuh dan terdukung oleh makin moderennya mereka? Kalau tidak, faktor-faktor apa yang menghalanginya. Primordialisme sendiri sebenarnya sesuatu yang wajar yang bisa muncul dalam individu atau masyarakat. Tetapi primordialisme akan mendorong kepada situasi yang disintegratif manakala tidak dibarengi oleh tumbuh berkembangnya kedewasaan yang berlandas pada kesadaran akan pluralisme dan ditumbuhkannya loyalitas terhadap perbedaan-perbedaan yang ada antar kelompok.

1.3 Tujuan

- a. memahami sejauh mana primordialisme dengan latar belakang agama masih kuat dalam kehidupan politik masyarakat
- b. memahami faktor-faktor yang bisa mendorong berkembangnya sikap-sikap demokratis dalam kehidupan politik masyarakat

1.4 Ruang Lingkup

Penelitian ini akan melihat primordialisme dengan latar belakang keagamaan. Jadi ia akan melihat bagaimana orientasi keagamaan membentuk sentimen tertentu yang menentukan kekelompokan seseorang. Sikap mendukung partai politik dalam pemilu, termasuk pemilihan presiden, akan dijadikan sebagai kasus yang bisa menjelaskan bagaimana kuat tidaknya sentimen atau primordialisme keagamaan ini. Dukungan yang berbasis pada primordialisme biasanya lebih didasarkan pada sentimen kebersamaan sebagai orang seagama atau sebagai orang sekelompok tertentu yang berlandas pada aliran dalam agama tertentu.

1.5 Review Literatur

Primordialisme nampaknya biasa masuk dalam topik *ethnicity* dalam setiap pembicaraan akademik para pakar ilmu sosial. Konsep *ethnicity* atau etnisitas ini, sebaliknya, harus diakui kurang begitu dikenal dalam pemakaian sehari-hari masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, terminologi yang terahir itulah yang lebih bisa memperkaya wawasan baik teoritis maupun metodologis dalam memahami dan menggali masalah primordialisme di Indonesia. Paling tidak melalui konsep ini penulis bisa merumuskan kerangka acuan dalam menelusuri permasalahan yang sering dijumpai dalam kaitan hubungan baik antar kelompok dalam masyarakat, antar suku maupun antar kelompok keagamaan.

Konsep primordialisme merujuk pada identifikasi diri yang dilakukan seseorang baik dalam situasi di mana ia dihadapkan dengan orang dari kelompok lain, yang berbeda dalam kultur pada umumnya, maupun dalam situasi di mana ia secara diam-diam menyadari atau berusaha mencari identitas dirinya. Dengan arti yang seperti itu, primordialisme, karenanya, bisa dipakai untuk memahami hubungan baik antar perorangan maupun kelompok yang berlainan budaya atau ciri-ciri fisik lahiriyah mereka.

Ada beberapa elemen yang digunakan masyarakat sebagai sumber identifikasi mereka dalam membentuk kelompok yang berbau primordial. Yang pertama adalah kultur atau budaya. Termasuk dalam masalah budaya adalah penampilan fisik manusia, yang menjadi elemen paling penting yang mendasari masalah-masalah hubungan antar manusia atau kelompok yang berbeda. Sangat sering bahwa konflik sosial dipicu oleh karena perbedaan ciri budaya tadi. Dalam hal ini, faktor budaya menjadi dasar pengelompokan ketika kelompok-kelompok dalam masyarakat mengalami konflik. Selain itu, apa yang juga penting mendasari kekelompokan etnis adalah kesamaan ciri fisik yang biasanya berdasar pada kelahiran.

Peneliti yang pernah menyoroiti masalah primordialisme di Indonesia adalah Clifford Geertz (1973). Geertz yang cukup inten mengamati perkembangan masyarakat Indonesia, terutama di Jawa, melihat adanya konflik etnis pada awal kemerdekaan Indonesia. Paling tidak, persaingan untuk menjadi yang terpenting dalam alam Indonesia merdeka mewarnai kehidupan banyak orang dari berbagai suku di Indonesia. Ini artinya gambaran persatuan yang dipupuk melalui sumpah pemuda yang menjunjung kesamaan sebagai bangsa dan oleh karenanya meniadakan perasaan kesukuan atau kedaerahan ataupun keagamaan yang selama itu hidup nampak tersingkirkan saat itu. Orang Jawa, misalnya merasa bahwa budaya Jawa dan cara Jawa harus mendominasi dan diterima sebagai norma yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya. Demikian juga dengan orang Sunda atau Batak dan yang lainnya. Yang pasti saat itu perasaan kesukuan lah yang mendominasi perhatian masyarakat Indonesia dari berbagai daerah.

Itulah sebabnya masalah primordialisme menjadi agenda yang secara terus menerus diperhatikan para tokoh Indonesia dan kaum terpelajarinya. Slogan ‘kesatuan dalam keberagaman’ dan ‘keberagaman dalam kesatuan’ menjadi motto politik yang bertujuan mengekang kecenderungan centrifugal masalah etnik ini. Dan sampai sekarang masalah etnik ini menjadi masalah laten yang setiap saat bisa meledak menjadi konflik terbuka atau bahkan kerusuhan sosial.

Bagaimana karakter masalah etnis ini muncul dan berkembang memang tidak secara eksplisit teoritis dibahas Geertz. Apa yang jelas dari bahasan Geertz adalah bahwa masalah etnis ini menjadi problematik atau bahkan menimbulkan konflik manakala terdapat kompetisi kepentingan antara sejumlah orang dengan latar belakang etnik yang berbeda. Meskipun tidak secara eksplisit Geertz menunjuk faktor eksternal yang sebenarnya merupakan ‘the triggering factor’, ia secara implisit menunjuk situasi politik yang kompetitif yang menjadi penyebabnya. Beberapa bahasan yang secara eksplisit membahas faktor-faktor penyebab munculnya

masalah etnik dan masalah primordialisme ini telah dikemukakan beberapa sosiolog. Sebuah studi kasus yang dibahas Patterson (1968) secara tegas menunjuk faktor eksternal sebagai pemicu munculnya kesadaran dan sentimen etnik yang ada pada banyak orang. Beberapa pakar sependapat dengan dia bahwa elemen-elemen yang secara berbeda dipunyai beragam kelompok dalam masyarakat tidaklah menjadi pemicu atau pendorong baik bagi munculnya pengelompokan itu sendiri maupun bagi munculnya konflik antar kelompok dengan berlatar belakang etnik. Jenkins (1997) menegaskan bahwa munculnya proses identifikasi seseorang terhadap suatu budaya atau kelompok bisa terjadi atau justru dipicu oleh faktor eksternal. Dengan kata lain, elemen-elemen yang menjadi ciri dan mengikat perasaan primordialisme seseorang hanyalah bahan kasar bagi pengidentifikasian orang tersebut ketika ia mencari jati dirinya. Faktor luar tadi bersifat politis, di mana orang bersangkutan bukan hanya dituntut untuk berkompetisi dengan orang dari kelompok dengan kultur dan ciri-ciri primordial lain, tetapi juga kepentingannya biasanya merasa terancam. Itulah sebabnya Jenkins menegaskan bahwa masalah 'ethnicity is fundamentally political', dan ia hampir sependapat dengan Weber yang melihat keanggotaan dalam suatu kelompok primordial tadi sebagai keanggotaan politis karena masyarakat yang terhimpun di dalamnya adalah masyarakat politik. Meskipun demikian, harus dicatat bahwa keanggotaan semacam ini terasa longgar dan sebetulnya tidak bisa dianggap sebagai suatu kelompok. Identifikasi primordial seperti ini hanya memfasilitasi anggotanya untuk membuat kelompok-kelompok dengan watak politis. Dalam beragam kasus, elemen-elemen primordial yang dijadikan politik pembentukan sentimen bersama mereka juga selalu tidak sama.

Dalam kasus Indonesia, selain studi yang dilakukan Clifford Geertz, studi yang menyoroti masalah ini lebih terfokus pada masalah primordialisme kedaerahan. Studi primordialisme dengan mendasarkan elemen identifikasinya pada faham keagamaan belum secara intensif dilakukan. Efek politisnya selama ini memang kurang

begitu mengganggu stabilitas nasional, tetapi dalam jangka panjang berkembangnya primordialisme dengan dasar identifikasi seperti ini akan membahayakan persatuan. Beberapa hal perlu menjadi catatan mengenai pentingnya untuk melakukan studi di bidang ini. Primordialisme dengan dasar identifikasi faham keagamaan mungkin sama tidak positifnya dengan primordialisme dengan dasar identifikasi lain seperti kesukuan. Karena semboyan “berasal dari paham mana” menjadi dasar interaksi dan sikap sosial masyarakat, potensi seseorang untuk mengembangkan diri telah terhalang kalau tidak sesuai dengan semboyan tadi. Hal lain yang perlu dicatat adalah bahwa primordialisme dengan dasar identifikasi faham ini lebih mudah membentuk “*collective action*” dan juga mudah menggalang sentimen bersama, mengingat keanggotaannya lebih jelas dan bisa dikatakan pasti daripada keanggotaan dalam kekelompokan primordial lain, seperti kedaerahan atau suku. Orang dengan latar belakang NU atau Muhammadiyah akan lebih mudah disentuh sentimen primordialnya daripada ketika ia disentuh latar belakang kesukumannya, sehingga karenanya gerakan kolektif yang berangkat dari ketersinggungan semacam ini bisa lebih disintegratif.

Sikap-sikap primordial ini juga nampak sekali dalam wilayah politik. Penelitian yang dilakukan oleh Turmudi (2004) memperlihatkan bahwa pilihan-pilihan politik (*electoral behaviour*) kalangan Islam santri lebih didasari oleh kesamaan identitas antara si pemilih dengan partai yang dipilih. Mereka mendukung partai tertentu karena partai bersangkutan adalah berideologi atau berazas Islam. Di sini kelihatan bahwa Islam sebagai agama telah membentuk sikap primordial para penganutnya termasuk dalam wilayah politik. Alasan-alasan yang dikemukakan yang mendasari dukungan politik mereka (mencoblos partai) tidak berangkat dari pilihan-pilihan rasional, seperti karena partai bersangkutan platformnya bagus atau karena ia menjanjikan, melainkan karena partai tersebut adalah partai Islam. Hal ini memperlihatkan bahwa sejauh ini orientasi yang biasa disebut sebagai ‘aliran’ masih menghingapi sebagian kelompok Islam. Bisa dilihat bahwa

kalangan Nahdlatul Ulama, misalnya, masih cukup kuat berorientasi aliran ini. Perolehan partai yang berorientasi atau berafiliasi kepadanya, PKB dan PPP, memperlihatkan bahwa warga Nahdliyyin tetap mendukung partai dari kalangan sendiri (lihat Turmudi, 2004a). dengan kata lain, unsur primordialiasme atau aliranisme masih menghinggapi pilihan-pilihan politik mereka.

Kecenderungan seperti itu dalam politik nampaknya cukup wajar. Beberapa penelitian (lihat Gaffar, 1992) memperlihatkan bahwa ada faktor-faktor tertentu yang cukup berpengaruh secara konstan terhadap dukungan seseorang terhadap partai politik. Faktor keluarga, misalnya cukup dominan ikut mengantarkan seseorang untuk menjadi pendukung partai tertentu. Seseorang yang lahir dari keluarga pendukung Partai Republik di Amerika, misalnya, cenderung menjadi pendukung partai itu. Ini menunjukkan bahwa identifikasi keluarga ikut membentuk wawasan dan sikap seseorang. Karena itu bisa dipahami kalau dukungan sebagian kelompok Islam terhadap partai-partai tertentu adalah karena keluarga mereka sebelumnya telah menjadi pendukung partai bersangkutan.

Meskipun demikian, di sana tetap tersedia ruang bagi perubahan. Tidak ada sikap dan pandangan yang tidak berubah. Keduanya bisa berubah dengan hadirnya berbagai macam hal, seperti keterdidikan atau tereksposnya mereka ke dalam dunia yang lebih luas. Teori modernisasi telah menegaskan hal ini dan telah pula diperkuat oleh temuan-temuan yang mendukungnya. Beberapa contoh bisa diperlihatkan di sini. Kalau orientasi aliran begitu kuat di tahun 1950an, hal itu ternyata telah meluntur di sebagian masyarakat santri sekarang. Kalangan Masjumi, yang bisa dianggap sebagai berorientasi Islam kuat, seperti bisa dilihat melalui politik Islamnya, sejak pemilu 1971 sudah tersebar ke partai pemerintah, Golkar; dan ternyata hal itu terus berlanjut hingga sekarang, sehingga kekuatan yang terus mendukungnya tidak lagi sebesar di tahun 1950an. Dengan kata lain, di kalangan pendukung atau keturunan Masjumi identifikasi terhadap orientasi politik keluarga tidak begitu kuat,

sehingga anak-anak Masjumi sekarang tidak lagi bisa dihimpun dalam partai politik yang mengklaim sebagai penerus politik Masjumi.

Dalam kasus ini banyak hal yang bisa menjelaskan. Di samping unsur pendidikan, pola kepemimpinan dalam kelompok-kelompok Islam juga memegang peranan penting dalam mempertahankan kohesi sosial di antara para pengikutnya. Di kalangan Nahdlatul Ulama, peran kiai begitu penting dan bahkan bisa mendorong tindakan-tindakan politik tertentu (lihat Turmudi, 2004a). Sementara itu, di kalangan Masjumi hal itu tidak terjadi sehingga para anggota di tingkat bawah tidak dengan gampang bisa diikat dan dirahakan untuk mendukung politik tertentu. Selain itu, apa yang juga cukup penting adalah masalah “religious attachment”. Sikap yang tidak mudah menerima perubahan yang biasa dialamatkan kepada kelompok Islam tradisional adalah factor utama kenapa masyarakat kelompok ini cukup solid dan kuat atau konsisten dalam pilihan politik mereka. Sudah sejak lama, kalangan NU, misalnya, tidak mau berdekatan dengan pemerintah. Banyak kasus memperlihatkan bahwa kiai seringkali menolak apa yang berasal dari pemerintah. Bahkan dulu sering terdengar ada orang yang mengharamkan memberikan dukungan terhadap Golkar sebagai partai pemerintah. Di kalangan modernis Muslim “*religijs attachment*” seperti itu kelihatannya kurang kuat, karena masalah rasionalitas sangat ikut mempengaruhi cara berpikir mereka. Karenanya, tidak mengherankan bahwa telah sejak tahun 70 an para pendukung Masjumi, seperti diduga banyak orang, telah berani menjadi pendukung Golkar, di saat masyarakat NU menganggapnya haram.

Dari apa yang digambarkan di atas jelaslah bahwa lepas dari adanya konsistensi sikap kalangan Islam berkaitan dengan politik mereka, di sana ada juga sebagian lainnya yang menerima perubahan, sehingga sikap politik mereka juga berubah. Dari sinilah, penelitian ini ingin melihat baik konsistensi maupun perubahan itu dengan

mengkaitkannya dengan primordialisme mereka, terutama berkaitan dengan sikap kekelompokan sebagai bagian dari kelompok Islam.

1.6 Pemahaman Konsep

Primordialisme² bisa diartikan sebagai keterikatan terhadap sesuatu yang, di antaranya, dibawa melalui kelahiran (Geertz, 1973). Seseorang yang dilahirkan dalam suatu komunitas yang religius, misalnya, akan mempunyai keterikatan yang kuat terhadap komunitasnya tadi, sehingga keterikatan tersebut menimbulkan emosi tertentu yang menjadi dasar tingkah lakunya dan pertimbangan lainnya. Demikian pula halnya dengan orang yang dibesarkan dalam suatu komunitas pemakai bahasa tertentu, seperti yang sering terjadi di India, atau dalam komunitas yang mempraktekkan peribadatan tertentu, seperti sering terjadi dalam kelompok-kelompok Islam di Indonesia. Kedua latar belakang kultural tadi bisa menjadi sumber terbentuknya semangat primordialisme orang tersebut. Sumber-sumber ini bukan hanya mewarnai kebudayaan orang tersebut dan anggota lain komunitas bersangkutan, tetapi juga memelihara dan menumbuhkan emosi mereka, sehingga identitas kultural tadi menjadi rujukan tingkah laku mereka.

Secara sederhana bisa dikatakan bahwa primordialisme dalam penelitian ini diartikan sebagai "orientasi kelompok". Primordialisme adalah sikap yang mementingkan keuntungan-keuntungan kelompok. Kekelompokan yang dimaksud selain berasal dari keterikatan keagamaan dan kedaerahan bisa juga berasal dari keanggotaan dalam

² Primordialisme nampaknya merupakan terminologi yang tidak mempunyai arti baku. Maksudnya, kata ini tidak mempunyai arti tunggal yang pasti. John Echol dalam "Kamus Inggris-Indonesia" mengartikan primordialisme sebagai "purba" atau "yang mula-mula", sedangkan Collin Conscise Dictionary mengartikan istilah tersebut "*existing at or from the beginning*" atau "*constituting an origin*".

suatu asosiasi, seperti keanggotaan suatu partai politik. Ini artinya, primordialisme tidak hanya berkaitan dengan sesuatu yang berlatar belakang kelahiran, melainkan juga bisa berkaitan dengan masalah profesi, misalnya. Primordialisme sebenarnya adalah sesuatu yang wajar yang dipunyai oleh setiap anggota kelompok atau bangsa. Primordialisme menjadi berbahaya ketika ia menjadi acuan yang berlebihan dan tidak mengindahkan kaidah-kaidah rasionalitas yang berlaku dalam segi-segi kehidupan masyarakat.

Karena primordialisme adalah sikap yang dipunyai seseorang, kadarnya akan berbeda antara orang yang satu dan orang lainnya. Begitu pula ia bisa berubah dengan berkembangnya baik kepribadian orang bersangkutan maupun lingkungan sosialnya. Modernisasi yang sangat berkaitan dengan perubahan baik lingkungan fisik maupun sosial yang mengitari seseorang, karenanya, merupakan faktor yang akan mempengaruhi kadar primordialisme yang berkembang dalam masyarakat. Menurut para pendukungnya (lihat Inkeles, 1966), proses modernisasi yang terjadi dalam masyarakat bukan hanya akan merubah lingkungan sosial masyarakat bersangkutan tetapi juga kapasitas mentalnya. Karena terjadi perubahan tadi, masyarakat modern selalu memberikan tempat bagi munculnya alternatif-alternatif dan cenderung bersikap kosmopolitan. Perubahan-perubahan yang dibawa oleh kemoderenan di antaranya juga memperkecil kecenderungan primordialisme yang berkembang dalam masyarakat karena kemoderenan lebih menghargai *achievement* daripada primordialisme.

1.7. Metode Pengumpulan data

Penelitian ini pada dasarnya lebih menekankan pada analisa kualitatif. Oleh karenanya data yang digunakan lebih bertumpu pada hasil wawancara mendalam dengan para nara sumber atau informan kunci dan 'elit strategis' lainnya di lokasi penelitian. Tetapi, karena

penelitian ini juga ingin melihat kecenderungan umum berkaitan dengan primordialisme, dua (2) lokasi telah dipilih dengan maksud untuk mendapat gambaran variatif dari masalah primordialisme yang diteliti.

Penelitian ini akan dilakukan di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Kedua daerah ini cukup variatif dilihat dari keislaman para penduduknya maupun afiliasi politik mereka. Jawa Timur adalah daerah dengan penduduk yang beragam. Meskipun dari sisi jumlah, penduduk yang berlatarbelakang NU mungkin lebih banyak, di sana juga banyak dari mereka yang masuk dalam kategori Islam nominal atau abangan. Adapun Sulawesi Selatan dipilih karena di sini variasi afiliasi politik juga cukup besar. Di sana ada penduduk yang beraliran modernis Islam, Muhammadiyah, dan banyak juga yang berorientasi NU. Penduduk di sini juga kelihatannya telah berketetapan menerapkan syariat Islam, meskipun dalam pilihan politik banyak dari mereka yang mendukung Golkar.

Dari dua lokasi ini akan turun 4 peneliti, yang berarti dalam masing-masing kota akan ada dua orang yang meneliti masalah yang ada. Perbedaan kedua lokasi ini disamping diharapkan bisa saling melengkapi, juga bisa memberikan bandingan mengenai masalah primordialisme yang berkembang. Para peneliti akan menggunakan para pembantu lapangan, termasuk untuk melakukan wawancara, dengan terlebih dahulu dibriefing mengenai masalah yang harus mereka tanyakan kepada para informan. Para pembantu diutamakan berasal dari penduduk local yang punya sedikit pengetahuan tentang masalah yang diteliti.

1.8. Arti Penting Penelitian

Kedewasaan dalam berpolitik merupakan prasyarat penting bagi kelangsungan pembangunan yang sedang digalakkan di

Indonesia, karena tanpa itu pembangunan akan sering dilanda hambatan. Kedewasaan berpolitik biasanya ditandai di antaranya oleh menurunnya kecenderungan primordialisme dan keterikatan ideologis. Dalam kedewasaan seperti itu berkembang kesadaran akan kesatuan sebagai bangsa dan partisipasi aktif masyarakat diarahkan untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, kedewasaan seperti itu akan menyingkirkan kepentingan sempit golongan.

Penelitian tentang primordialisme ini mengungkap tentang faktor yang mempengaruhi berkembang dan menurunnya primordialisme. Dengan diketahuinya faktor-faktor tadi dan ke arah mana kecenderungan primordialisme yang hidup dalam masyarakat berkembang, suatu strategi kebijakan bisa ditetapkan. Masyarakat harus diarahkan bukan saja untuk memperkuat kesatuan tetapi juga menyingkirkan situasi yang kondusif bagi berkembangnya primordialisme.

Daftar Pustaka

- Anderson, B and Andrey Kahin
1982 *Interpreting Indonesian Politics: Thirteen Contribution to the Debate*. Ithaca: Cornell Modern Indonesian Project.
- Echols, J.M and Hassan Shadily
1975 *An English Indonesian Dictionary*. Ithaca, London: Cornell University Press.
- Effendi, Bachtiar
1998 *Islam dan Negara*. Jakarta : Paramadina

Feith, H

1970 "Introduction". In Feith and Lance Castle ed. *Indonesian Political Thinking, 1945-1965*. Ithaca: Cornell University Press.

Gaffar, Afan

1992 *Javanese Voters: A Case Study of Election under a Hegemonic Party System*. Yogyakarta: Gadjahmada University Press.

Geertz, Clifford

1960 *The Religion of Java*. Glencoe: The Free Press.

1959 "The Javanese Village". In Skinner, G. William ed. *Local, Ethnic and National Loyalties in Village Indonesia: A Symposium*. Yale University Cultural Report Series, Southeast Asian Studies.

1973 "Religion as a Cultural System". In *The Interpretation of Culture*. New York: Basic Book.

1965 *The Social History of an Indonesian Town*. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

Hisyam, Muhamad

1989 *Perubahan Aspirasi Kemasyarakatan dalam Komunitas Muslim Pedesaan: Kasus Desa Segaralangu Cilacap*. Unpublished MA thesis, Indonesian University, Jakarta.

Jay, Robert

1963 *Religion and Politics in Rural Java*. Cultural Report Series No. 12, Southeast Asia Studies, Yale University

Noer, Deliar

1987 *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*. Jakarta: Grafiti Pers.

Pennock, J. Rolland

1979 *Democrartic Political Theory* New jersey: Princeton University Press.

Pranowo, Bambang

1991 *Creating the Tradition of Islam in Java*. Ph.D. Thesis, Monash University, Victoria.

Turmudi, Endang

2004 *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*. Yogyakarta: LKis.

2004a *Patronage, Aliran and Islamic Ideologies during Election in Jombang, East Java*. London: Routlage Curzon

BAB II

STUDI KASUS KABUPATEN MALANG

Oleh M. Asfar Marzuki

2.1. Pendahuluan

Berbagai fenomena sosial dan politik yang berkembang beberapa waktu belakangan ini seyogyanya menyadarkan kita semua, bahwa sebagai bangsa, kita tidak bisa menjadikan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai sesuatu yang dapat bertahan dan berkembang dengan sendirinya atau *taken for granted* tanpa penanganan yang serius dan dikerjakan bersama-sama. Agenda kerja pemantapan dan pendewasaan diri sebagai suatu bangsa termasuk didalamnya kedewasaan berpolitik masih tetap merupakan prioritas dan amat penting ke depan.

Pembangunan nasional mensyaratkan adanya situasi sosial politik yang stabil dan kondusif melalui ditumbuh-kembangkannya kedewasaan berpolitik warga masyarakat. Kedewasaan berpolitik masyarakat sangat penting artinya bagi keberhasilan pembangunan nasional. Sebab tanpa kedewasaan berpolitik warga masyarakat pembangunan nasional akan mengalami hambatan yang cukup berarti. Kedewasaan berpolitik antara lain ditandai dengan makin menurunnya atau bahkan hilangnya kecenderungan primordialisme dan keterikatan ideologis yang kuat. Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa kedewasaan berpolitik dapat dilihat dari sikap-sikap politik yang rasional, dan dengan makin hilangnya spirit primordial. Artinya sikap politik bukan saja harus semakin tidak ideologis melainkan juga harus melepas ikatan-ikatan primordial tradisional.

Di panggung politik nasional primordialisme telah memunculkan konflik politik terutama pada saat diselenggarakannya Pemilu. Masyarakat pendukung partai politik tertentu baik langsung ataupun tidak telah terlibat konflik hanya karena para elit partai yang mereka dukung berkonflik dengan elit partai lain. Persaingan yang diwarnai konflik-konflik kecil antara para pendukung partai-partai politik Islam dengan partai politik yang berkarakter nasionalis sekuler berlangsung cukup seru selama Pemilu berlangsung. Bahkan di dalam partai Islam sendiripun terjadi konflik dikarenakan perbedaan paham keagamaan diantara mereka.

Tampak jelas bahwa konflik yang kemudian muncul saat itu menggambarkan hadirnya primordialisme keagamaan. Penelitian ini diarahkan untuk melihat masalah primordialisme keagamaan yang terekspresikan melalui dukungan terhadap partai politik. Sejauh mana aspirasi kelompok keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Al Irsyad dan lainnya terekspresikan dalam kehidupan berpolitik masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa dua organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah keduanya sama-sama pernah terlibat membidani lahirnya partai politik. Nahdlatul Ulama terlibat dalam pendirian Majelisul Islam Ala Indonesia (MIAI), Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), bahkan NU pernah menjadi partai politik *independent*. Demikian juga Muhammadiyah, ia terlibat dalam pendirian MIAI, PII, Masyumi, Parmusi dan Sekber Golkar.

2.2. Deskripsi Daerah Penelitian

Penelitian tentang “Primordialisme Keagamaan Dalam Masyarakat Islam Indonesia” ini mengambil lokasi di wilayah Daerah Tingkat II Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Untuk

mengetahui gambaran umum Daerah Tingkat II Kabupaten Malang maka secara singkat akan di jelaskan kondisi fisik atau geografi, kondisi sosial ekonomi dan politik daerah ini.

2.2.1. Kondisi Geografi

Kabupaten Malang terletak antara 112°17" sampai dengan 122°57" Bujur Timur dan 7°44" sampai dengan 8°26" Lintang Selatan. Kabupaten Malang memiliki luas wilayah sekitar 3.347,8 KM², dan merupakan kabupaten yang memiliki luas terbesar kedua setelah Kabupaten Banyuwangi di wilayah Provinsi Jawa Timur. Dari seluruh total luas tersebut, lebih dari 50 persen merupakan lahan pertanian yang berupa sawah, tegalan dan perkebunan. Sedangkan pemanfaatan lahan untuk pemukiman penduduk sekitar 13,68 persen.

Batas wilayah Kabupaten Malang dikelilingi oleh enam kabupaten dan Samudera Indonesia. Di sebelah Utara-Timur berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lumajang, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Blitar, dan sebelah Barat-Utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Mojokerto.

Letak geografis sebagaimana diuraikan di atas menjadikan Kabupaten Malang memiliki posisi yang cukup strategis. Hal ini ditandai dengan makin meningkatnya jalur transportasi yang melalui Kabupaten Malang dari waktu ke waktu.

Ditinjau dari aspek topografinya, Kabupaten Malang terdiri dari gunung-gunung dan perbukitan. Kondisi topografi yang demikian mengindikasikan potensi hutan yang besar. Hutan yang merupakan sumber air yang cukup mengalir sepanjang tahun melalui sungai-sungainya mengairi lahan pertanian yang demikian luas. Beberapa gunung yang berada dekat dan berada di wilayah Kabupaten Malang yang secara nasional sudah cukup dikenal diantaranya

gunung Semeru, yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa yang mempunyai ketinggian (3.676 meter), gunung Kelud (1.731 meter), gunung Welirang (3.156 meter), gunung Arjuno (3.339 meter) dan beberapa gunung lagi yang secara nasional belum dikenal.

Kondisi topografi pegunungan dan perbukitan menjadikan Kabupaten Malang terkenal sebagai daerah sejuk dan banyak diminati sebagai tempat tinggal dan tempat peristirahatan. Dengan ketinggian rata-rata pusat pemerintahan kecamatan 524 meter dari permukaan air laut, suhu rata-rata Kabupaten Malang relatif rendah. Pada tahun 2003 rata-rata suhu udara yang dicatat enam stasiun klimatologi mencapai 23,52°C. Dengan suhu tertinggi 29,32°C dan suhu terendah 19,50°C. Bagi orang yang terbiasa dengan udara panas seperti di Jakarta atau Surabaya tentu saja udara di Malang ini sungguh sangat dingin. Namun demikian dinginnya, sejuknya Malang ini justru ada yang beranggapan bahwa daerah ini sangat tepat sekali sebagai salah satu pilihan objek wisata birahi yang menakjubkan.

2.2.2. Kondisi Sosial Ekonomi

Berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun 2003, penduduk Kabupaten Malang berjumlah 2.264.757 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki 1.128.347 jiwa (49,46 persen) dan perempuan 1.146.410 jiwa (50,54 persen). Bila dibandingkan dengan tahun 2002, maka terjadi kenaikan jumlah penduduk sebesar 0,65 persen. Diantara 33 kecamatan di Kabupaten Malang. Kecamatan Singosari memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu sekitar 131.560 jiwa dengan komposisi laki-laki 49,9 persen dan perempuan 50,09 persen. Sedangkan Kecamatan Kasembon adalah Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terkecil yakni 29.160 jiwa terdiri dari 50,03 persen laki-laki dan 49,97 persen perempuan.

Sebagian besar penduduk Kabupaten Malang bermata pencaharian sebagai petani. Banyaknya penduduk yang bermata

pencapaian di sektor pertanian ini sangat boleh jadi dikarenakan tersedianya lahan pertanian yang subur dan cukup memadai. Luas lahan pertanian di Kabupaten Malang 50 persen lebih dari seluruh total luas wilayah Kabupaten Malang. Sektor pertanian merupakan kontributor terbesar Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang disusul sektor perdagangan.

Selain sektor ekonomi, agama merupakan hal mutlak yang harus dimiliki oleh setiap penduduk negeri ini tak terkecuali di Kabupaten Malang dan menuntut perhatian ekstra demi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Perhatian utama yang dibutuhkan adalah kebebasan untuk memilih dan beribadah sesuai dengan keyakinan tanpa ada intervensi apapun dan oleh siapapun, kapanpun dan di manapun. Bahkan dalam satu agamapun orang bebas menganut paham atau aliran tertentu, misalnya pemeluk agama Islam di Indonesia banyak yang mengikuti ajaran atau paham Nahdlatul Ulama, ada yang mengikuti ajaran Muhammadiyah, ada pula yang beraliran Al Irsyad.

Dengan nilai luhur yang dimilikinya, agama hendaklah menjadi bingkai bagi subjek pembangunan dan pemersatu bangsa. secara demikian pembangunan Indonesia jangan hanya berorientasi pada pembangunan fisik material saja melainkan juga harus berorientasi pada pembangunan mental spiritual. Kalau kita perhatikan dengan seksama dalam bait lagu kebangsaan Indonesia Raya, disana terdapat kalimat atau bait yang berbunyi bangunlah jiwanya bangunlah badannya. Dari sini kiranya dapat dipahami bahwa betapa pembangunan mental spiritual juga sangat penting. Oleh karena itu pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya, WR. Soepratman, bukan tanpa alasan menempatkan syair lagu bangunlah jiwanya lebih dulu baru bangunlah badannya.

Agama yang dipeluk oleh penduduk di Kabupaten Malang pada tahun 2004 tercatat Islam 2.338.923 orang (97,02 persen)

Kristen Protestan 87.593 orang, Khatolik 18.910 orang, Hindu 13.348 orang, Budha 3.416 dan lain-lain 1.523 orang.

Dari 2.338.923 orang pemeluk agama Islam di Kabupaten Malang dilihat dari paham keagamaan atau kelompok keagamaan tampak sebagian besar adalah warga Nahdlatul Ulama dan sebagian kecil adalah warga Muhammadiyah dan Al Irsyad. Jumlah lembaga pendidikan (pesantren) milik NU jumlahnya relatif lebih banyak dibandingkan dengan lembaga pendidikan milik Muhammadiyah. Bahkan ada pesantren khusus untuk mahasiswa yakni Al Hikam yang syarat menjadi santri disana harus anak orang NU. Setidaknya itulah yang di sampaikan oleh salah seorang pengasuh PP Al Hikam, Muhammad Nafi’.

Lembaga pesantren sangat boleh jadi merupakan ciri khasnya NU, sangat jarang ditemui anak orang Muhammadiyah belajar di pesantren milik NU, namun sebaliknya banyak anak orang NU yang sekolah di lembaga pendidikan Muhammadiyah. Beberapa pesantren di Singosari yang peneliti kunjungi tidak ada satupun santrinya yang berasal dari anak orang Muhammadiyah, sebaliknya di SD dan SMP Muhammadiyah Singosari dan Lawang, terdapat beberapa orang siswanya adalah anak orang NU. Seorang Muhammadiyah bernama Muhammad Maksum menuturkan bahwa orang-orang Muhammadiyah umumnya khawatir kalau anaknya di pesantrenkan di pesantren NU, ibadahnya akan mengikuti cara-cara NU dalam mana cara-cara tersebut menurut paham Muhammadiyah adalah bid’ah. Sebagai contoh dalam shalat, menurut tokoh Muhammadiyah ini bacaan shalawat dengan mengucapkan kata *sayyidina* dalam shalat adalah bid’ah. Peneliti belum memperoleh penjelasan dari tokoh-tokoh Muhammadiyah yang lain di daerah ini berkaitan dengan masalah ini. Oleh karena itu adalah terlalu dini menyimpulkan bahwa tidak adanya anak Muhammadiyah yang nyantri di pesantren NU dikarenakan alasan kekhawatiran sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Maksum tadi. Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan

pembaharuan di Indonesia, oleh Deliar Noer dimasukkan dalam gerakan modern di Indonesia. Ide-ide pembaharuan Muhammadiyah diwujudkan dalam dua dimensi, yaitu dimensi purifikasi dan modernisasi. Purifikasi dengan cara memberantas bid'ah, khurafat dan tahayul serta berbagai amalan yang bersifat sinkretis. Pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah yang sangat tegas dalam masalah kemurnian aqidah dan ibadah mempengaruhi warna gerakan pembaharuan Muhammadiyah. Salam bidang sosial, pendidikan dan politik mendapat inspirasi dari gerakan yang dilakukan oleh pembaharu dari Mesir yakni Jamaluddin Al Afghani, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. (Shobron, 2003: 38).

2.2.3. Kondisi Sosial Politik

Kalau dilihat dari afiliasi politik pada saat dulu di Malang Raya ini tidak jauh berbeda dengan Blitar yang nota bene adalah basisnya merah. Dari dulu sejak 1950an hingga 1960 partai politik yang berhaluan nasionalis sekuler yakni Partai Nasional Indonesia (PNI) pimpinan Soekarno dan Partai Komunis Indonesia (PKI) pimpinan DN Aidit, menguasai daerah ini. Perlu diketahui bahwa di Malang Raya ini meskipun sebagian besar penduduknya beragama Islam, akan tetapi keislaman mereka masih awam. Menurut H. Imam Syafi'i, tokoh Islam Malang, di pelosok-pelosok desa di Kabupaten Malang ini sebagian besar masyarakatnya masih sangat awam dalam keislamannya. Sehingga karena keawamannya itu, yaa abangan itu, maka afiliasinya cenderung ke merah.

Pada masa Orde Baru di mana saat itu hanya ada tiga partai politik yakni PPP, Golkar dan PDI. Kendatipun PDI merupakan fusi dari PNI, Murba dan lainnya tetapi pendukung partai ini sebagian besar beralih mendukung Golkar. Larinya pendukung PNI ke Golkar terutama dikarenakan adanya rekayasa dan rekapaksa pihak penguasa pada waktu itu dan mungkin juga karena relatif kurang kuatnya ikatan primordial pendukung partai PNI tersebut yakni kaum abangan.

Sehingga pada masa rezim Orde Baru partai ini hampir-hampir tidak memiliki pendukung. Golkar selalu berjaya dan selalu menjadi pemenang Pemilu di daerah ini selama Orde Baru, dan PPP menduduki posisi kedua dan PDI berada di urutan terbawah (ketiga). PPP pada waktu itu cukup banyak mendapat dukungan terutama dukungan yang cukup signifikan dari warga nahdliyin yang sangat kuat ikatan primordialnya. Dibandingkan dengan unsur lain di tubuh PPP seperti Muslimin Indonesia, Perti, PSII dan Parmusi, NU lebih berhasil dalam merebut suara pemilih dan sekaligus membendung perolehan suara partai pemerintah, Golkar. Warga nahdliyin tetap mendukung partai dari kalangan sendiri (PPP). Para ulama NU mengukuhkan kesetiaan pengikutnya dengan berbagai cara. Beberapa ulama yang menyeberang ke Golkar berhasil dikucilkan (Noeh, 2002: 137). Meskipun di kalangan NU terdapat beberapa kyai yang menyeberang ke Golkar tetapi tidak dengan serta merta umatnya ikut dengannya. Bahkan kyai-kyai yang ke Golkar disebutkan sebagai kyai NU kuning dan ditinggalkan umatnya. Menurut Dra. Hajjah Mahmudah Baidlowi, mubalighah dari PPP Malang, menjelaskan bahwa pada saat-saat warga nahdliyin baik di kota maupun terutama di desa-desa menyelenggarakan peringatan Hari Besar Islam seperti peringatan Maulid dan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, maka kyai-kyai NU yang menyeberang atau mendukung Golkar diboikot dengan cara mereka tidak dijadikan pembicara atau penceramah pada acara tersebut. Padahal ketika mereka belum menyeberang ke Golkar, mereka adalah kyai-kyai atau mubaligh-mubaligh yang sangat dihormati dan disenangi oleh umatnya dan selalu dijadikan pembicara atau penceramah inti dalam setiap acara peringatan hari-hari besar Islam tersebut. Bahkan banyak yang beranggapan bahwa kyai-kyai NU Kuning itu (yang menyeberang ke Golkar) berkurang karomahnya hal ini terbukti pengajian rutin yang diselenggarakannya berkurang jamaahnya, demikian pula dengan pesantren yang dimiliki menjadi berkurang peminatnya dan ada pula yang satu-persatu ditinggalkan santrinya. Dukungan warga nahdliyin kepada PPP semakin mantap tatkala pada Pemilu tahun 1977 dan 1982 ulama NU

mengeluarkan fatwa yang menyatakan memilih PPP adalah kewajiban bagi umat Islam. Sehingga pada waktu itu muncul pernyataan bahwa kalau daerah merah - maksudnya basisnya PNI - dengan mudah dapat di kunningkan (di Golkarkan) tidak demikian halnya dengan daerah hijau (basisnya NU) sangat sulit di Golkarkan. Golkarisasi atau kunningisasi hanya relatif berhasil di daerah merah sedangkan di daerah hijau kurang berhasil.

Dalam pada itu kaum santri yang berasal dari Muhammadiyah yang berorientasi Islam kuat, ini bisa dilihat dari politik Islamnya terutama pada era 1950an, sejak 1971 sudah mulai memudar. Dan cenderung tidak memilih partai politik dari kalangan sendiri (partai politik Islam) melainkan cenderung mendukung partai politik non Islam yakni partai nasionalis sekuler dalam hal ini partai pemerintah, Golkar. Perlu diketahui bahwa Muhammadiyah merupakan salah satu komponen yang terlibat dalam pendirian Sekber Golkar (Shobron, 2002). Faktor historis inilah barangkali yang menjadi salah satu sebab mengapa warga Muhammadiyah lebih cenderung mendukung partai politik non Islam yakni partai pemerintah, Golkar tersebut, di samping faktor telah memudarnya ikatan primordial keagamaan mereka.

Dalam pada itu, di Kabupaten Malang pada era reformasi para pendukung PNI yakni kaum abangan atau nasionalis sekuler menemukan alternatif lain untuk menyalurkan aspirasi politiknya yakni ke partai politik nasionalis sekuler pimpinan Megawati Soekarnoputri yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sedangkan golongan santri terutama warga nahdliyin hampir semuanya menyalurkan aspirasi politiknya ke partai politik dari kalangan sendiri yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), pimpinan KH. Abdurrahman Wahid, cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU).

2.3. Agama dan Politik

Salah satu pusat perhatian dalam kajian ilmu politik yang di pandang sangat penting dan sentral adalah negara, di samping masalah demokrasi dan *civil society*. Dalam pada itu agama adalah bagian yang tak terpisahkan atau bagian yang integral dari negara, sebab negara yang memiliki tujuan untuk mengatur kehidupan rakyatnya sudah barang tentu tidak bisa mengabaikan rakyat yang beragama. Bahkan acap kali agama dijadikan instrumen (alat) negara untuk memperlancar kebijakan-kebijakannya. Dan sebaliknya agama seringkali juga ingin mempengaruhi kebijakan negara. Oleh karena itu hubungan agama dan negara bagaikan dua sisi mata uang, saling mengisi dan melengkapi dan tak terpisahkan.

Dalam sejarah dilukiskan bahwa hampir semua negara dikawasan Timur Tengah dahulunya adalah kawasan Kristen yang dapat ditaklukkan oleh tentara Islam. Akan tetapi dalam perjalanan sejarah selanjutnya dapat dikuasai kembali oleh dunia Barat melalui gerakan imperialisme, kolonialisme terhadap negara-negara Islam.

Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, dua lembaga sosial keagamaan ini juga memiliki konsep tentang negara, hal ini setidak-tidaknya tercermin pada waktu tokoh kedua organisasi sosial keagamaan ini menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diberi wewenang untuk merumuskan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bersikukuh mempertahankan Piagam Jakarta.

KH. Wahid Hasyim dari kalangan Nahdlatul Ulama dalam sidang BPUPKI mengusulkan bahwa Presiden haruslah beragama Islam, dan agama negara adalah agama Islam. Ki Bagus Hadikusuma dari Muhammadiyah mengusulkan negara berdasarkan ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya.

Kedua tokoh yang mewakili dua lembaga sosial keagamaan besar di Indonesia tersebut tidak memisahkan agama dan negara.

Bagi mereka hubungan agama dan negara bersifat organik, tidak dapat dipisahkan. Perlu diketahui bahwa dua lembaga sosial keagamaan tersebut sama-sama pernah terlibat membidani lahirnya partai politik yang berkiprah mewarnai sejarah perpolitikan nasional. Nahdlatul Ulama terlibat dalam pendirian MIAI, Masyumi, Parmusi, PPP, bahkan pernah menjadi partai politik. Pada era reformasi membidani dan memfasilitasi lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Muhammadiyah juga terlibat dalam pendirian MIAI, PII, Masyumi, Parmusi dan Sekber Golkar. Dan pada era reformasi Muhammadiyah memberikan rekomendasi untuk melakukan ‘ijtihad politik’, maka lahirlah Partai Amanat Nasional (PAN).

Hubungan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tidak selamanya harmonis, kadang bermesraan dengan mengadakan pengajian bersama seperti tabligh akbar di stadion utama Senayan Jakarta yang diselenggarakan bersama oleh Pemuda Anshar dan Pemuda Muhammadiyah menjelang pemilihan Presiden tahun 1999 yang dihadiri oleh tokoh-tokoh kedua organisasi sosial keagamaan besar tersebut seperti KH. Abdurahman Wahid, KH. Sahal Mahfudz, KH. Hasyim Muzadi, Syaifullah Yusuf dari kalangan NU dan Prof. Dr. Syafi’i Ma’arief, Dr. HM. Amien Rais, MA, Dr. Dien Syamsudin, Imam Addaruqutni, dari Muhammadiyah. Akan tetapi hubungan keduanya kadang juga tidak harmonis, terjadi pula konflik yang melibatkan warganya di bawah atau di akar rumput, sehingga terjadi pengrusakan terhadap aset atau amal usaha Muhammadiyah seperti gedung Sekolah Muhammadiyah, Panti Asuhan dan Rumah Sakit Muhammadiyah oleh “warga” atau simpatisan NU.

2.4. Peta Politik Islam

Politik Islam merupakan penghadapan Islam dengan kekuasaan negara yang melahirkan sikap dan prilaku politik (*political behaviour*) serta budaya politik (*political culture*) yang berorientasi pada nilai-nilai Islam.

Secara historis realitas aspirasi politik umat Islam baik mereka yang beraliran Nahdlatul Ulama (NU) maupun yang berpaham Muhammadiyah dan aliran lainnya, sejak pra kemerdekaan Indonesia hingga saat ini (masa reformasi) menunjukkan kecenderungan yang tidak berubah alias tetap. Aspirasi politik umat Islam Indonesia sangat beragam dan tidak terakomodasi dalam wadah tunggal partai politik Islam. Kecenderungan ini terjadi pula di Kabupaten Malang.

Keberadaan kelompok politik Islam dalam perpolitikan Indonesia merupakan kelanjutan dari adanya dikotomi santri-abangan di kalangan umat Islam. Dikotomi ini merupakan konsekuensi logis dari proses islamisasi di berbagai wilayah Indonesia yang tidak merata dan corak tantangan budaya yang dihadapinya. Di daerah pesisir Jawa dan di luar Jawa yang terbuka dengan tantangan budaya pra-Islam yang eksoteris, islamisasi menghasilkan komunitas santri yang memiliki rasa dan komitmen keislaman yang relatif tinggi. Sedangkan di daerah pedalaman Jawa khususnya yang menjadi pusat kekuasaan pra Islam, islamisasi menghadapi tantangan kultural yang eksoteris dari masyarakat agraris sehingga menghasilkan komunitas Islam abangan yang cenderung sinkretis dengan komitmen keislaman yang rendah (Syamsuddin, 2002).

2.4.1. Masa Orde Lama

Pada masa Orde Lama yaitu pada Pemilihan Umum tahun 1955 sebagian besar aspirasi politik umat Islam disalurkan ke partai politik non Islam yakni Partai Nasional Indonesia (PNI) pimpinan Soekarno, salah seorang tokoh nasionalis sekuler pada waktu itu. Berkat dukungan besar dari umat Islam maka partai nasionalis sekuler tersebut secara nasional memperoleh suara 22,3 persen dan keluar sebagai pemenang Pemilu 1955. Sedangkan Masyumi yang merupakan partai politik Islam hanya berada di posisi kedua dengan perolehan suara 20,9 persen dan NU yang juga partai politik Islam

memperoleh suara 18,4 persen berada di urutan ketiga (Shobron, 2003).

Kondisi semacam itu tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di daerah Kabupaten Malang. Pemenang Pemilu 1955 di daerah ini adalah PNI, yang menang dengan perolehan suara cukup signifikan yaitu 20,6 persen. Berbeda dengan skala nasional di mana peringkat kedua pemenang Pemilu 1955 diduduki oleh Masyumi dan peringkat ketiga adalah NU, di daerah ini peringkat kedua diduduki oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) yang memperoleh suara 19,8 persen, NU di peringkat ketiga dengan perolehan suara 12,7 persen. Dalam pada itu partai politik Islam Masyumi hanya berada di posisi ke empat dengan perolehan suara 6,8 persen. (Soewignyo, 1962). NU sebagai partai politik Islam di daerah ini cukup lumayan dalam perolehan suara. Hal ini sangat boleh jadi disebabkan karena adanya dukungan dari selain warga nahdliyin sendiri juga dukungan dari beberapa kaum Islam abangan. Pada waktu itu hubungan antara kaum santri Nadlatul Ulama dan kaum Islam abangan cukup harmonis di daerah ini, berbeda dengan hubungan antara kaum santri Masyumi atau Muhammadiyah dengan kaum Islam abangan yang cenderung konfrontatif. Kondisi semacam itu mungkin dipengaruhi oleh paham keagamaan mereka. Muhammadiyah dengan tegas anti terhadap praktek-praktek keIslaman yang dianggapnya menyimpang dari ajaran Islam, seperti amalan-amalan yang bersifat sinkretis (Hindu-Islam) yang diamalkan oleh kaum Islam abangan. Sementara NU bersikap moderat dalam masalah tersebut. Bahkan beberapa warga nahdliyin mempraktekkan hal-hal yang hampir serupa dengan kaum Islam abangan tersebut. Misalnya ziarah kubur dengan meminta pertolongan kepada orang yang sudah meninggal dunia (para wali).

Dalam kampanye Pemilu 1955 di daerah Malang khususnya dan Jawa Timur serta Jawa Tengah pada umumnya ulama-ulama berusaha mencari dukungan bukan hanya dari warga nahdliyin sendiri tetapi juga dari kalangan Islam awam (abangan). Kampanyepun disesuaikan dengan kondisi sosial budaya mereka kaum abangan

dengan sedikit sentuhan keislaman. Misalnya ajakan para ulama juru kampanye NU kepada mereka agar supaya mereka selamat dunia akhirat dengan syair lagu sinom, dandang gula; seperti syair sebagai berikut;

*Kuncung-Bawuk podo nyoblos jagat
supoyo makmur cing dunyo lan ayo akherat
oh kuncung lan bawuk ojo kepencut gebyaring dunyo
yen kepencut cing kowe bakal cilaka*

Dalam bahasa Indonesia berarti mari Kuncung-Bawuk mencoblos gambar jagat (bola dunia) -- tanda gambarnya NU. Agar makmur didunia maupun diakhirat. Kuncung dan Bawuk anda jangan silau atau terpedaya dengan gemerlapnya dunia, kalau anda silau dan terpedaya maka anda kelak akan celaka, maksudnya diakhirat nanti akan celaka yakni masuk neraka Kuncung- Bawuk adalah nama yang menggambarkan orang Jawa Islam abangan. Pendek kata dalam memilih partai dalam pemilu nanti pilihlah partai yang akan membawa kemakmuran dunia dan akhirat. Jadi jangan hanya milih partai yang berorientasi keduniaan saja melainkan yang berorientasi keukhrowian juga yaitu partai Nahdlatul Ulama. Upaya para ulama yang gigih itu hanya mengantarkan NU memduduki posisi ketiga dalam perolehan suara Pemilu 1955 di daerah ini.

Kemenangan Partai Nasional Indonesia dan Partai Komunis Indonesia yang kedua-duanya bukanlah partai politik Islam melainkan partai politik nasionalis sekuler di daerah ini menunjukkan kegagalan Islam Politik.

2.4.2. Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru, kecenderungan aspirasi politik umat Islam tetap tidak berubah yakni sebagian besar aspirasi politik mereka disalurkan ke partai politik non Islam dalam hal ini adalah partai nasionalis sekuler, partai pemerintah, Golkar. Golkar

merupakan partai politik yang sangat kuat karena didukung sepenuhnya oleh pemerintah dan militer.

Dalam perjalanan sejarah Orde Baru, Golkar selalu menang dalam setiap Pemilu yang diselenggarakan. Sedangkan partai politik Islam yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan fusi dari parpol-parpol Islam yakni NU, Parmusi, Perti, dan PSII, secara nasional tidak mendapat dukungan yang signifikan dari umat Islam, sehingga dalam setiap Pemilu selama sejarah perjalanan Orde Baru, partai politik Islam ini selalu keok dari Golkar.

Sebagaimana yang terjadi di daerah lain pada umumnya di Indonesia, peta politik di Malang selama Orde Baru juga dikuasai oleh Golkar. Meskipun mayoritas penduduk Malang adalah Muslim, akan tetapi partai politik Islam (PPP) tidak mendapat dukungan yang signifikan dari umat Islam di daerah ini. Partai politik Islam ini selalu kalah dalam setiap Pemilu yang diselenggarakan selama Orde Baru. Bahkan pada Pemilu tahun 1987, PPP kalah telak dari Golkar. PPP kehilangan kursi dari semula 14 tinggal hanya 8 kursi di DPRD.

Kekalahan PPP yang sangat telak ini salah satunya disebabkan karena adanya upaya para ulama NU untuk menggembosi PPP. Ini dilakukan sebagai reaksi ulama NU atas tindakan Ketua Umum DPP PPP yakni Jailani Naro dalam masalah Daftar Calon Sementara untuk posisi DPR RI dalam mana tokoh-tokoh NU dipinggirkan atau ditaruh di nomor urut bawah, sehingga ada kemungkinan gagal jadi anggota DPR RI (Al-Barbasy, 2004). Pada masa kampanye Pemilu tahun 1987 ini di beberapa kantong NU merebak istilah *jurkam* (juru kampanye) dan *jurkem* yaitu *jurukempes*. Pada waktu itu mubaligh-mubaligh NU yang di Pemilu sebelumnya adalah jurkam-jurkam andalan dan tangguh, pada Pemilu 1987 mereka jadi jurkem-jurkem yang hebat pula. Apalagi lawan politik PPP yakni Golkar memahami betul situasi tersebut sehingga Golkar mengambil kesempatan yang baik ini untuk mendulang suara baginya.

Runtuhnya bangunan supra kokoh rezim otoriter Orde Baru yang dikomandani Soeharto pada akhir Mei 1998 menghantarkan era reformasi dan memproduksi peta kekuatan politik baru di pentas nasional. Sistem multipartai hadir ke permukaan seiring dengan marak dan gegap-gempitanya masyarakat. Partai-partai politik yang berbasis Islam bermunculan di arena politik nasional., diantaranya partai Umat Islam (PUI) pimpinan Dr. Deliar Noer, Partai Keadilan (PK) pimpinan Dr. Nurmahmudi Ismail, Partai Nahdlatul Ummat (PNU) yang dikomandani oleh KH. Syukron Makmun, Partai Kebangkitan Umat (PKU) diketuai KH. Yusuf Hasyim, Partai Bulan Bintang (PBB) dipimpin oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan partai di masa Orde Baru, yang pada awalnya berazaskan Islam tetapi dengan di berlakukannya kebijakan azas tunggal Pancasila oleh penguasa Orde Baru maka PPP terpaksa harus berganti azas yakni berazaskan Pancasila. Dan pada masa reformasi PPP muncul lagi dengan azas Islam. Partai-partai politik Islam tersebut semuanya berazas Islam.

Kemudian muncul pula partai politik Islam terbuka yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dibidani oleh tokoh besar Nahdlatul Ulama KH. Abdurrahman Wahid, dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang dinahkodai tokoh besar Muhammadiyah Prof. Dr. H.M. Amien Rais, MA. Kedua partai ini dilihat dari perspektif konstitusi partai adalah bukan partai politik Islam dalam arti sesungguhnya, sebab keduanya tidak berazaskan Islam. Tetapi realitas politik jelas bahwasanya baik PKB maupun PAN keduanya sangat mengandalkan kekuatan dukungan politiknya dari massa Islam. Bahkan secara spesifik dapat dikatakan bahwa PKB mengandalkan kekuatan dukungan politiknya dari warga Nahdlatul Ulama (kaum Nahdliyin) dan PAN mengandalkan dukungan politiknya dari warga Muhammadiyah. Secara demikian kedua partai politik ini dapat disebut sebagai partai politik berbasis massa Islam. Primordialisme keagamaan sangat boleh jadi dapat dilihat dalam hubungan ini. Seorang Muhammadiyah sangat mungkin lebih

cenderung berafiliasi atau memilih partai politik yang memang merupakan manifestasi dari pengejawantahan aliran keagamaannya di bidang politik yaitu Partai Amanat Nasional, sementara sangat boleh jadi seorang Nahdliyin lebih condong bergabung dan memilih partai yang dianggap cerminan aliran agamanya dalam politik yakni PKB. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa partai politiknya orang NU yaitu PKB dan partai politiknya orang Muhammadiyah adalah PAN. Gus Dur, yang oleh beberapa kyai NU dianggap sebagai tokoh Islam kontroversial, pada suatu kesempatan di awal berdirinya PKB pernah melontarkan pernyataan yang cukup membuat lawan politiknya gregetan. Ia menyatakan bahwa jikalau NU itu diibaratkan ayam maka PKB adalah telurnya. Sedangkan yang lain (agakny yang dimaksud waktu itu adalah Partai Kebangkitan Umat (PKU), Partai Nahdlatul Umat (PNU), Partai Solidaritas Uni Indonesia (SUNI) adalah kotoran nya (Shobron, 2003: 155).

2.4.3. Masa Reformasi

Bilamana pada masa rezim otoriter Orde Baru sebagian besar aspirasi politik umat Islam disalurkan ke partai politik non-Islam yakni Golkar, maka pada masa reformasi pun yaitu pada pemilu 1999 dan pemilu 2004, aspirasi politik umat Islam sebagian besar disalurkan ke partai politik non-Islam atau partai nasionalis sekuler yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golongan Karya. Pada Pemilu 1999 PDIP berjaya menjadi pemenang sedangkan partai Golkar menduduki peringkat kedua atau sebagai *runner up*. Sedangkan partai politik Islam seperti PPP, PBB, PK dan lainnya berada di urutan ketiga dan seterusnya. Pada Pemilu tahun 2004, kembali partai politik Islam terpuruk di urutan ketiga dan seterusnya. Sedangkan partai Golkar yang di awal reformasi agak terpuruk, pada Pemilu tahun 2004 justru kembali bangkit dan berjaya menjadi pemenang pertama menggeser posisi PDIP yang di Pemilu ditahun 1999 menjadi pemenang. Tetapi kondisi bahwa aspirasi

politik sebagian besar umat Islam disalurkan ke partai politik non-Islam tetap tidak berubah.

Kecenderungan semacam itu terjadi pula di daerah Kabupaten Malang yang mayoritas penduduknya adalah umat Islam. Pada Pemilu tahun 1999 secara meyakinkan PDIP mendapat dukungan yang signifikan dari umat Islam di daerah ini, sehingga partai nasionalis sekuler ini menang dengan memperoleh 510.420 suara atau 16 kursi di DPRD Tingkat II Kabupaten Malang, demikian pula pada Pemilu tahun 2004 kembali partai politik nasionalis sekuler pimpinan Megawati Soekarnoputri ini menang, meskipun sedikit ada penurunan jumlah perolehan suara yakni 382.345 atau 15 kursi di DPRD. PDIP di daerah ini bukan hanya berjaya sebagai pemenang Pemilu dua kali berturut-turut tetapi telah berhasil pula mendudukkan kader terbaiknya menjadi ketua DPRD, bahkan menjadikan kader terbaiknya pula menjadi orang nomor satu (Bupati Kepala Daerah) di Kabupaten Malang.

Dalam pada itu ada perbedaan antara kondisi secara nasional dan kondisi lokal (Malang) di mana secara nasional dua posisi teratas pemenang Pemilu diduduki dua partai nasionalis sekuler yakni PDIP dan Partai Golkar, sedangkan di Malang peringkat kedua justru diduduki partai berbasis massa Islam yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang pada Pemilu tahun 1999 memperoleh 392.532 suara atau 13 kursi di DPRD. Sedangkan partai Golkar berada di peringkat ketiga dengan perolehan suara 242.640 atau 8 kursi, disusul partai-partai politik Islam yakni PPP yang hanya memperoleh 45.939 (1 kursi) Partai Amanat Nasional mendapat 39.294 suara (1 kursi) dan Partai Keadilan (PK) mendapat 38.431 suara (1 kursi). Pada Pemilu tahun 2004 kembali PKB menduduki peringkat kedua pemenang Pemilu di daerah ini dengan memperoleh 346.719 suara (13 kursi), sementara Partai Golkar meskipun kembali berada di urutan ketiga namun mengalami penurunan jumlah perolehan suara yang pada Pemilu sebelumnya tahun 1999 memperoleh 242.640 suara (8 kursi) turun menjadi 223.672 suara (7 kursi). Diduga keras

turunnya perolehan suara PDIP dan Partai Golkar karena suara itu lari ke partai nasionalis sekuler pendatang baru yakni Partai Demokrat. Partai nasionalis sekuler yang dibidani kelahirannya oleh tokoh militer nasionalis Susilo Bambang Yudhoyono dan dikomandani oleh tokoh nasionalis sekuler Subur Boedhisantoso tersebut cukup populer dan mendapat dukungan yang mengagumkan dalam pentas politik nasional di era reformasi ini. Sebab meskipun sebagai pendatang baru partai politik ini secara nasional mampu mengalahkan popularitas partai-partai lama seperti Partai Amanat Nasional maupun Partai Bulan Bintang. Di daerah Kabupaten Malang maupun Malang Raya yang meliputi Kotamadya Malang dan Batu partai pendatang baru tersebut telah mampu menggeser kedudukan PPP. Di Kabupaten Malang pada Pemilu tahun 2004 Partai Demokrat ini menduduki posisi keempat dengan memperoleh 103.719 susra (6 kursi). Dalam pada itu dua partai politik Islam yaitu PPP dan PKS masing-masing hanya memperoleh 3 kursi dan 1 kursi. Padahal partai Keadilan Sejahtera secara nasional cukup spektakuler. Yang sungguh mengejutkan adalah Partai Amanat Nasional yang di tengarai sebagai partainya orang Muhammadiyah justru tidak memperoleh satu kursipun di daerah ini. Apakah ini berarti bahwa primordialisme di kalangan warga Muhammadiyah di daerah ini tidak sekuat primordialisme di kalangan warga Nahdlatul Ulama?. Penelitian yang dilakukan Abdul Munir Mul Khan di basis Muhammadiyah yakni di daerah Pekajangan, Pekalongan memperlihatkan bahwa sebagian besar aspirasi politik warga Muhammadiyah pada masa Orde Baru disalurkan ke partai politik non-Islam yakni Golkar bukan ke partai politik Islam saat itu yaitu PPP. Sedangkan warga Nahdliyin di daerah yang dikenal cukup kuat Islamnya ini sebagian besar menyalurkan aspirasi politiknya kepartai politik Islam yakni PPP. Adalah sebuah prestasi yang cukup mengagumkan bahwa semasa Orde Baru, PPP sering mengungguli Golkar di Pekalongan ini. Keunggulan PPP atas Golkar di daerah ini lantaran dukungan yang cukup signifikan dari umat Islam terutama warga Nahdlatul Ulama. Sedangkan warga Muhammadiyah sebagaimana halnya yang

terjadi di daerah lainnya sebagian besar aspirasi politik mereka disalurkan ke Golkar. Sangat boleh jadi hal itu dikarenakan faktor historis bahwa Muhammadiyah merupakan salah satu komponen yang terlibat dalam pendirian Sekber Golkar. Dan barangkali ini adalah faktor dominan yang menyebabkan warga Muhammadiyah cenderung memilih partai politik non Islam adalah bahwa secara sosiologis warga Muhammadiyah sebagian besar hidup di daerah perkotaan. Mereka acapkali menyerap dan mengkonsumsi diskursus pemikiran-pemikiran liberal dan sekuler sehingga mereka sulit didikte dan diarahkan (dimobilisasi). Kondisi sosiologis ini tentunya berbeda dengan NU di mana sebagian besar warga Nahdliyin hidup di daerah pedesaan.

Dengan melihat keadaan di Malang tampak ada kecenderungan bahwa ikatan primordial warga Nahdliyin terhadap partai politik yang di anggap partainya warga NU yakni PKB lebih kuat dibandingkan dengan ikatan primordial warga Muhammadiyah terhadap partai yang dianggap partai politiknya warga Muhammadiyah yaitu PAN. Kuatnya ikatan primordial warga Nahdliyin tersebut sangat boleh jadi dikarenakan adanya sikap paternalistis yang kuat di kalangan warga Nahdliyin. Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama yang dikenal sebagai kyai atau ulama memang sangat kharismatis dan dipatuhi oleh para pengikutnya. Para ulama menurut hadist nabi Muhammad SAW adalah pewaris nabi. Dengan keterangan semacam itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa tugas para ulama adalah meneruskan misi dan perjuangan nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan agama Allah kepada umat manusia .Oleh karena itu, kepatuhan kepada ulama atau kyai di kalangan warga Nahdliyin dianggap pula sebagai kepatuhan kepada Rasulullah SAW. Barang kali inilah salah satu diantara barbagai macam faktor yang menjadikan kuatnya ikatan primordial warga Nahdliyin. Penelitian yang dilakukan oleh Turmudi (2004) memberikan gambaran yang cukup jelas bahwa pilihan politik (*electoral behaviour*) kalangan Islam santri lebih didasari oleh kesamaan identitas antara si pemilih

dengan partai yang dipilih. Mereka mendukung partai tertentu karena partai bersangkutan adalah berideologi atau berazas Islam. Secara demikian tampak bahwa Islam sebagai agama telah membentuk sikap primordial para penganutnya termasuk dalam wilayah politik. Bilamana dikerucutkan yakni kepada aliran keagamaan maka tampak sekali bahwa kalangan Nahdlatul Ulama masih sangat kuat berorientasi aliran ini. Terbukti perolehan suara partai politik yang berorientasi atau berafiliasi kepadanya yakni PKB dan PPP, dengan jelas menunjukkan bahwa warga Nahdliyin tetap mendukung partai dari kalangan sendiri. H. Imam Syafi’I, Lc, SH. MA, anggota DPRD Kabupaten Malang termuda (32 tahun) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merasakan betapa amat sulitnya menggaet Nahdliyin untuk mendukung PKS pada Pemilu tahun 2004 kemarin. Menurutnya ikatan primordial kaum Nahdliyin sangat kuat. Segala sesuatu kalau sudah yang namanya kata Yaai (maksudnya kyai) ya sudah itulah yang dipatuhi dan ditaati. Sehingga jangan heran kalau di Malang Raya ini PKB yang diklaim sebagai partainya orang NU tetap akan unggul dari PKS. Beliau menambahkan bahwa di Malang ini mengapa yang dominan adalah PDIP dan PKB, pertama karena di pelosok-pelosok desa sebagian besar masyarakatnya masih sangat awam dalam keagamaan. Sehingga karena keawamannya itulah seperti yang telah saya sampaikan tadi yaitu abangan yaa afiliasinya yaa ke merah itu (PDIP), ditambah lagi jargon politik yang mereka usung adalah partainya wong cilik. Dan juga tidak lepas dari momen nasional ketika itu di mana ibu Mega dianggap sebagai simbol tokoh nasional yang dizalimi oleh penguasa Orde Baru, Soeharto yang harus dibela. Sehingga dukungan dari warga masyarakat Kabupaten Malang yang mayoritas adalah Islam ini, tetapi ya yang Islam awam tadi demikian besarnya, sehingga partainya Mbak Mega (PDIP) menang secara meyakinkan di daerah ini. Adapun posisi kedua diduduki oleh PKB lantaran kalangan santri terutama warga nahdliyin di daerah ini hampir seluruhnya mendukung partai ini yang memang sangat diyakini sebagai partainya warga nahdliyin.

Kurangnya dukungan terhadap partai-partai Islam baik ditingkat lokal maupun nasional dari umat Islam sendiri sejak dulu hingga sekarang ini, menurut fungsionaris DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Malang ini, adalah berawal dari pemahaman yang parsial terhadap Islam itu sendiri oleh orang Islam sendiri. Ini jujur saja saya sampaikan bahwa mayoritas masyarakat kita terutama kaum muslimin masih membedakan ini yang urusan agama, ini yang urusan politik, ini urusan pemerintahan begitu, sehingga faham sekulerisme itulah yang menggejala di masyarakat kita, sehingga mereka beranggapan bahwa kalau itu sudah menyangkut urusan politik ya politik begitu, jangan dicampur-adukkan dengan agama. Kalau sudah ngurus masalah agama, pengajian itu adalah permasalahan yang lain. Sementara kalau kita di PKS ingin menggabungkan itu, agama dan politik, jangan dipisahkan, karena hubungan keduanya bersifat organik, saling melengkapi dan tak dapat dipisahkan supaya menjadi baik. Bagaimana kita menjadikan politik itu sebagai alat untuk agama, dan bukan sebaliknya agama dipergunakan sebagai instrumen atau alat untuk kepentingan politik. Yang jelas ketika seorang muslim pemahamannya semakin utuh dengan Islam maka afiliasinya juga akan cenderung kepada partai Islam, tetapi kalau pemahamannya itu parsial dengan Islam yang mana mereka memahami Islam hanya majelis ta'lim, masjid, hanya sekedar shalat, rukun Islam yang lima itu, tidak perlu ngurusi pemerintahan, tidak perlu ada undang-undang yang Islami, tidak perlu ada Perda yang Islami, maka sudah barang tentu afiliasi politiknya ke partai politik non Islam alias partai politik nasionalis sekuler.

2.5 Kegagalan Islam Politik

Pemilu legislatif dan Presiden 2004 memperlihatkan kegagalan Islam Politik. Setelah partai-partai Islam dikalahkan dalam Pemilu Legislatif, keadaan yang sama terjadi pula dalam Pemilu Presiden secara langsung, dua calon Presiden yang acap kali disebut

mewakili kelompok Islam yakni Amien Rais dari Partai Amanat Nasional (PAN), dan Hamzah Haz dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), kalah secara telak dari calon Presiden yang lebih dikenal berhaluan nasionalis sekuler sejak putaran pertama yaitu Megawati Soekarnoputri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Susilo Bambang Yudhoyono dari Partai Demokrat. Dua kandidat Presiden yang dari kalangan nasionalis sekuler inilah yang maju ke babak kedua atau putaran kedua pilpres. Dan akhirnya Susilo Bambang Yudhoyono yang terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 2004-2009. Lengkap sudahlah kekalahan Islam Politik di Indonesia.

Kondisi semacam itu memperlihatkan betapa kesadaran politik Islam dikalangan sebagian besar umat Islam masih sangat lemah. Hal ini sangat boleh jadi disebabkan karena meskipun penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, akan tetapi sebagian besar dari mereka itu adalah masuk dalam kategori awam keislamannya, sebagaimana dinyatakan oleh tokoh Islam Malang, H. Imam Syafi'i tadi. Oleh sebab itulah sebenarnya tidaklah mengherankan bilamana mereka cenderung atau lebih suka dipimpin oleh tokoh-tokoh sekuler ketimbang tokoh-tokoh Islam. Karena keawaman dalam keislamannya itu pulalah yang menjadikan mereka dalam memilih pemimpin lebih didasarkan pada pertimbangan yang emosional dan irrasional seperti misalnya calon Presiden tertentu ganteng, bisa menyanyi, kalem, dan faktor-faktor penampilan luar lainnya termasuk 'murah dalam membagi-bagikan uang dan lain-lain'. Sebagian besar kaum Muslimin sangat mengesampingkan latar belakang, ideologi atau visi-misi calon Presiden tersebut. Mereka tampaknya tidak begitu peduli, apakah calon Presiden itu memperjuangkan syari'at Islam ataukah tidak, memiliki kepribadian islami (*syakhshiyah islamiyyah*) yang kuat ataukah lemah. Seorang pemimpin yang memiliki kepribadian Islami yang kuat adalah dia yang memiliki cara berfikir Islami (*'aqliyyah islamiyyah*) yang tinggi dan cara pengendalian diri Islami (*nafsiyyah islamiyyah*) dengan

ketaqwaan dan kedekatan kepada Allah SWT (Khathah, 2004: 19). Menurut Ir. Farhan Ali dan Abdullah Fathoni, tokoh muda Hizbut Tahrir Indonesia Malang, sebenarnya kita tidak boleh sepenuhnya menyalahkan umat Islam mengapa kesadaran politik Islam pada sebagian besar umat Islam Indonesia sangat lemah. Menurut keduanya kesalahan juga terutama terletak pada mereka yang dikenal sebagai kaum intelektual Islam dan yang menamakan dirinya sebagai politisi Islam. Sebab selama ini mereka lupa atau tidak sungguh-sungguh membangun kesadaran politik Islam di tengah-tengah umat.

Kesadaran politik Islam yang dimaksudkan disini adalah kesadaran umat memelihara seluruh urusan kehidupan mereka berdasarkan aqidah dan syari'at Islam. Kesadaran semacam inilah yang akan mendorong umat untuk memilih pemimpin Islam sekaligus sistem Islam. Dengan kesadaran politik Islam, umat tidak saja akan memilih pemimpin Islam, tetapi juga bentuk negara, sistem pemerintahan, politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan yang didasarkan pada Islam. Dan sebaliknya, kesadaran politik Islam akan mendorong umat Islam untuk menolak pemimpin sekuler sekaligus mencampakkan sistem sekuler yang kufur, sebagaimana yang diterapkan atas mereka saat ini. Mereka hanya mau hidup di bawah sistem Islam, yakni di bawah naungan Daulah Khilafah Islam yang akan mengatur urusan kehidupan mereka berdasarkan syari'at Islam.

Dan satu hal lagi yang banyak dilupakan dalam kerja dakwah dan politik para tokoh Islam dan parta-partai politik Islam selama ini, seperti misalnya pada saat Pemilu, mereka minta dukungan umat Islam untuk memilih partai politik Islam dan pemimpin Islam. Akan tetapi sekularisasi dan leberalisasi ajaran Islam malah gencar dipropagandakan dengan tujuan memisahkan syari'at Islam dari politik. Akibatnya umat tidak memandang perlu terikat dengan syari'at Islam yang mewajibkan mereka untuk memilih pemimpin Islam dan sistem politik berdasarkan syari'at Islam. Mengacu pada

pemikiran Azyumardi Azra, intelektual Islam terkenal, Farid Wajdi (2004) menyatakan bahwa minimnya dukungan suara Muhammadiyah kepada Amien Rais pada Pemilu Presiden 2004 disebabkan faktor sosiologis dan tradisi politik. Secara sosiologis warga Muhammadiyah sebagian besar hidup di daerah perkotaan. Oleh karena itu mereka acapkali menyerap dan mengkonsumsi wacana pemikiran-pemikiran liberal dan sekuler. Dalam bahasa Al Mauududi mereka itu disebut pengikut *jahiliyyah modern*. Secara demikian mereka tidak mudah didikte dan diarahkan atau dimobilisasi.

Hal sama terjadi pada Nahdlatul Ulama. Liberalisasi yang selama ini dikembangkan di Nahdlatul Ulama, terutama di era kepemimpinan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), telah melepaskan sedikit demi sedikit keterikatan warga nahdliyin dengan ulama, kyai dan syari'at Islam. Secara sosiologis kini banyak warga NU yang melakukan urbanisasi ke kota-kota besar. Di kota besar inilah mereka mengkonsumsi wacana pemikiran-pemikiran liberal dan sekuler. Akibatnya dapat dilihat dari semakin tidak dominannya kepemimpinan kyai dikalangan mereka.

Secara umum buah liberalisasi dan sekularisasi yang menimpa bangsa terutama umat Islam Indonesia adalah hilangnya ideologis. Yang ada hanya sekedar fanatisme, bahkan sindrom 'UUD' ('ujung-ujungnya duit') semakin cenderung mendominasi cara mereka mengambil keputusan.

Dengan demikian apa yang dipetik oleh pemimpin Islam dan partai-partai politik Islam selama ini merupakan buah dari liberalisasi dan sekularisasi yang selama ini dipropagandakan, justru oleh para pemimpin Islam itu sendiri.

Kita ingin mengajak umat saat Pemilu untuk menjadikan Islam sebagai pertimbangan dalam politik. Akan tetapi, selama ini

kita kurang mengajarkan kepada umat bahwa Islam dan politik tidak dapat dipisahkan. Kita justru sibuk dengan istighosah dan dzikir berjamaah untuk meratapi kemaksiatan individual, akan tetapi kita kurang sekali mengajak umat untuk menangisi dosa kolektif kita, yakni dosa karena tidak menegakkan syari'at Islam secara total dalam kehidupan kita. Padahal bukankah tidak tegaknya syari'at Islam dalam kehidupan merupakan kemaksiatan yang besar?

Kurangnya kesadaran politik umat juga disebabkan karena ketidaktegasan kita dalam menyerukan syari'at Islam. Kita seringkali beralasan, gagasan syari'at Islam masih belum laku, kontroversial, belum dipahami, dan lain-lain. Tidak sedikit diantara kita dan ini justru datangnya dari tokoh-tokoh Islam yang enggan mengatakan secara tegas bahwa syari'at Islam wajib ditegakkan dalam negara. Padahal tatkala kita melihat umat belum tertarik dengan gagasan penerapan syari'at Islam dalam negara, tugas kitalah agar mereka tertarik dan memahami. Pendek kata kita perlu menyadarkan umat bahwa aqidah Islam bukan hanya wajib menjadi dasar bagi kehidupan individual kita melainkan juga wajib menjadi landasan dalam kehidupan kolektif kita, dalam bidang politik, pemerintahan, ekonomi, sosial budaya dan aspek publik lainnya. Di samping itu kita juga perlu menyadarkan umat bahwa kita wajib menolak secara tegas penerapan ideologi dan sistem sekuler yang kufur seperti saat ini, yang selama ini telah menjerumuskan kita kedalam berbagai macam kenistaan dan penderitaan tidak hanya di dunia tapi juga kelak diakhirat.

Dan *last but not least* kita perlu juga menyadarkan umat bahwa kita tidak cukup hanya membutuhkan pemimpin Islam melainkan juga butuh sistem pemerintahan Islam yang akan menerapkan seluruh syari'at Islam, yakni Daulah Khilafah Islam. Sebab hanya dengan itu, insya Allah semua persoalan umat akan dapat diatasi.

2.6. Islam dan Negara

Selanjutnya dalam menyikapi adanya keinginan yang kuat dari sebagian umat Islam tentang perlunya mendirikan negara Islam, H. Imam Syafi'i memandang bahwa untuk memosisikan atau melegalkan Islam menjadi sebuah institusi sampai pada level pemerintahan itu harus dimulai dari bawah dulu. Sebab kalau orang-orang, masyarakat yang di bawah ini belum siap dengan hukum atau nilai-nilai Islam justru mereka itu nanti yang menjadi korban. Mungkin dapat saya beri contoh di Afganistan, Taliban. Mereka semangat untuk mendirikan negara Islam walaupun saat itu kita tahu mereka melakukan kudeta terhadap kaum Mujahidin yang mana kaum Mujahidinlah yang berjuang mati-matian untuk memerdekakan negaranya dari Rusia, setelah mereka berhasil akhirnya dikuasai oleh Taliban, mereka mahasiswa-mahasiswa yang dari Pakistan itu datang ke kampungnya dan bahkan membunuh saudara mereka yang Mujahidin itu. Akhirnya mereka mengambil alih kekuasaan dan dengan membabi buta mereka menerapkan hukum Islam, yang tentunya tidak lepas dari provokasi Amerika. Masyarakat, rakyat belum siap saat itu dan mereka menerapkannya dengan kaku, wanitanya tidak boleh keluar rumah, penuh dengan aturan-aturan yang sangat kaku, dalam perjalanan sejarahnya kekuasaan atau pemerintahan Taliban ini tidak bertahan lama, dan lagi-lagi ada pihak ketiga yang menunggangi dan akhirnya pemerintahan Taliban itupun runtuh. Ini mencoreng nama Islam. Kenapa, karena masyarakat belum siap, sehingga dalam hal ini yang kita persiapkan masyarakatnya dulu sebelum mendirikan negara Islam. Hal ini berkaitan dengan hukum-hukum dan aturan-aturan serta nilai-nilai Islam yang hendak di terapkan. Hal ini dikarenakan begini pak, hukum Islam itu tidak bisa diterapkan parsial, misalnya untuk menerapkan hukum pidana yang berupa hukum potong tangan bagi yang mencuri itu tidak bisa serta merta kita lakukan sebelum penataan ekonomi itu kita perhatikan. Kan begitu. Nanti kalau ekonominya masih morat-marit kemudian masyarakat masih belum sejahtera maka hukum pidana itu terus diterapkan nanti betapa banyak yang menjadi korban potong tangan

itu justru kaum muslimin sendiri, apabila ada yang melakukan zina yang masih perawan atau yang bujang itu kan di cambuk 100 kali, dan bagi yang sudah menikah dirajam. Nah, sementara wanita-wanita masih membuka aurat di jalan-jalan, bahkan mereka pun dibiarkan keluar rumah malam-malam karena alasan pekerjaan, hal itu kan memancing reaksi. Jadi kalau kita mau menerapkan yang namanya hukum Islam itu tidak bisa serta merta sekaligus tapi melalui proses yang cukup lama. Itu harus ada kesiapan masyarakat terhadap sisi-sisi dan nilai-nilai Islam yang lain juga harus diperhatikan begitu. Selama ini yang menjadi sorotan dari orang-orang yang sentimen dengan hukum Islam itu karena mereka hanya melihat sisi kejahannya saja, hukum pidana dengan macam-macamnya itu, malah itu yang dilihat sementara sisi rahmatnya itu dilupakan.

Persepsi masyarakat terhadap Islam itu tidak lepas dari pelakunya, Sebagai ilustrasi, beliau menceritakan ada salah seorang terkenal yang sebelumnya adalah orang non-muslim dari Inggris yang kemudian masuk Islam, dia suatu ketika pernah berkunjung ke Mesir. Ketika dia berjalan-jalan di kota Kairo lalu kebetulan saat itu terdengar kumandang adzan dari masjid untuk shalat Jum'at. Tapi dia melihat banyak toko-toko yang masih buka dan banyak pedagang yang tidak menghiraukan panggilan itu. Padahal mereka muslim, kemudian dia mengucapkan *Alhamdulillah* segala puji bagi Allah yang menjadikan aku muslim sebelum aku tahu kondisi kaum muslimin. Artinya beliau menyayangkan kok kaum muslimin tidak mencerminkan Islam yang sesungguhnya. Sehingga kalau menurut saya ada mayoritas masyarakat kita menilai bahwasanya pelaku pengeboman atau pelaku teror adalah kaum muslimin dan Islam itu identik dengan kekeerasan, terorisme dan sebagainya, itu tidak bisa seluruhnya kita salahkan. Karena watak dan perilaku sebagian dari kaum muslimin memang ada yang mempunyai sifat begitu, yang keras misalnya, yang dalam memberantas kemaksiatan tidak memikirkan dampaknya, padahal kita disuruh untuk *'ud uw ilaa sabili rabbika bilhikmati wal mauidlotil hasanati wajaadilhum*

billaati hiya ahsan, disuruh berdakwah dengan hikmah, dengan tutur kata yang lembut, pada suatu saat kita memang perlu keras tapi sesuai dengan kondisi. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, salah seorang ulama kita yang terkenal, pernah memberikan beberapa qaidah dalam mengingkari kemungkaran adalah beliau memberikan rambu-rambu ketika seorang itu dalam memberantas kemungkaran akan berdampak kepada kemungkaran yang lebih besar maka itu terlarang. Malah nggak boleh, beliau saat itu dalam suatu peperangan dengan orang Tartar dan mereka pasukan Tartar tersebut sedang mabuk-mabukan. Maka ada sebagian kaum muslimin yang geram, kata mereka kita habisi saja pasukan Tartar yang sedang mabuk-mabukan itu, tetapi oleh Ibnu Taimiyah malah dicegah, beliau justru membiarkan mereka dalam kemabukan, padahal mabuk-mabukan kan dilarang dalam Islam. Tetapi pada waktu itu, kalau larangan tersebut diberlakukan terhadap pasukan Tartar akan sangat berbahaya bagi kaum muslimin, sebab kekuatan mereka jauh lebih besar dan kuat dibandingkan kekuatan kaum muslimin. Sehingga kalau itu dilarang mereka justru akan marah dan akan menghabisi kaum muslimin saat itu yang kekuatannya tak seimbang, karena waktu itu kaum muslimin kekuatannya kecil, maka dibiarkan saja mereka melakukan kemungkaran. Sebab saat itu kalau kita berantas mereka, malah justru kitalah yang diberantas oleh mereka. Dan itu pula yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat berada di kota Makkah, kekuatannya masih kecil, ketika beliau melihat kemungkaran yaitu berhala yang disembah dan sebagainya, sebenarnya itu suatu kemungkaran tetapi beliau tidak langsung melarang, karena kalau dilarang saat itu mereka akan marah. Komunitas kaum muslimin yang masih masih kecil dan lemah itu bisa dihabisi. Maka disini perlu adanya strategi. Perlu dibedakan mana yang *Fiqhul Ahkam* dan mana yang *Fiqhud Da'wah*. Kalau *Fiqhul Ahkam* itu bicaranya boleh atau tidak. Tapi kalau *Fiqhud Da'wah* itu memungkinkan atau belum.

Secara demikian, *Fiqhul Ahkam* itu boleh atau tidak, contohnya seorang perempuan yang belum memakai jilbab. Menurut

hukum Islam nggak boleh, haram. Sedangkan Fiqhud Da 'wahnya adalah memungkinkan atau belum, kita da'wahi sekarang. Jadi kalau *Fiqhud Da'wah* ini mencakup strategi bagaimana mengkondisikan seseorang dari melakukan kemungkaran menjadi meninggalkan, dari meninggalkan yang wajib menjadi melakukan. Itu strateginya *Fiqhud Da'wah*. Tetapi memang masih banyak dikalangan umat Islam yang hanya menggunakan logika *Fiqhud Ahkam*. Jadi mereka hanya menggunakan logika hitam di atas putih saja. Prostitusi itu haram, miras itu haram, panti pijat itu haram, titik. Karenanya harus diberantas. Mereka tidak berpikir dampak sesudah itu. Sekarang ini kita mengetahui tentang betapa dahsyatnya penyebaran virus HIV dan AIDS. Setidaknya hal itu dikarenakan oleh dua faktor. Menurut Departemen Kesehatan RI penyebab makin menyebarnya virus HIV/AIDS adalah pertama karena pergaulan bebas dari prostitusi dan sebagainya. Yang kedua karena jarum suntik. Sebab yang pertama ini menjadi dilema bagi pemerintah, dan kalau hal itu kita kerucutkan di Pemerintah Daerah (Pemda), Perda begitulah, wanita-wanita tunasusila (WTS) atau istilah sekarang Pekerja Seks Komersial itu kan dilokalisir ditempat-tempat tertentu. Hal ini menjadi dilema kalau tempat-tempat itu dibubarkan atau ditutup, akhirnya mereka para Pedagang Seks Komersial itu menyebar kemana-mana, akan menjalar kemana-mana, dan ini berarti sama halnya dengan menyebarkan penyakit menyebarkan dan mematikan tadi yang belum ada obatnya. Sedangkan kalau dilegalkan, seakan-akan kita melegalkan kemaksiatan. Jadi ini dilema bagi pemerintah. Sehingga kita berpikir, bukan hanya memberantas kemungkaran tetapi apa solusi yang kita tawarkan. Kita harus mencari tahu mengapa mereka menjadi Pekerja Seks Komersial, apakah karena faktor ekonomi misalnya, kalau karena faktor ekonomi maka carikan solusi yang baik misalnya dengan menyediakan lapangan kerja. Jikalau karena faktor moral maka bagaimana pembinaan akhlaqnya. Jadi mereka itu harus di da'wahi.

2.7. Daulah Islamiyah (Negara Islam)

Di dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Nisa ayat 58-59 Allah berfirman: "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu supaya menyerahkan amanat-amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menghakimi diantara manusia hendaklah kamu memutuskan dengan adil. Sesungguhnya Allah menasehatimu sebaik-baiknya dengan cara itu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya, dan kepada ulu amri diantaramu dan jika kamu berselisih mengenai sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu memang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Itulah langkah yang paling baik dan ta'wil (Allah dan Rasul-Nya) adalah yang paling bagus akibatnya.

Dari hasil wawancara mendalam terhadap tokoh-tokoh Islam, dan ulama dari berbagai kalangan di daerah Malang terutama kalangan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Al Irsyad dapat dianalisis bahwa ayat tersebut di atas merupakan salah satu sandaran hukum atau dalil naqly bagi mereka kaum muslimin yang setuju Islam politik dan sekaligus bagi kaum muslimin yang kontra Islam politik yaitu Islam kultural. Islam politik menganggap bahwa hubungan agama dan negara bersifat organik sehingga tidak dapat dipisahkan. Sedangkan Islam kultural cenderung memisahkan agama dan negara atau sekuler.

Tokoh muda Nahdlatul Ulama Malang, KH. Imran yang oleh beberapa ulama NU Malang dianggap NU fundamentalis, berpandangan bahwa ayat tersebut di atas sudah dengan tegas menerangkan kepada kita umat Islam, bahwasannya kita *gak keno gak (la budda)* harus miliki ulil amri atau pemimpin pemerintahan yang berarti juga bola kehidupan umat Islam harus bersatu di bawah naungan pemerintahan atau negara Islam (Daulah Islamiyah). Sebab sudah dengan tegas Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, di samping harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya, juga harus taat kepada ulil amri minkum (ulil amri dari golongan kamu), ini sudah jelas mengandung pengertian adanya keharusan

pemerintahan Islam. Hal ini sebagaimana yang di amalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Selanjutnya dia menegaskan bahwa dienu Islam harus ditegakkan. Menegakkan dienu Islam berarti keharusan menegakkan kekuasaan Islam atau Politik Islam. Tanpa tegaknya kekuasaan Islam, maka dienu Islam tidak akan dapat ditegakkan, hukum Islam, syari'at Islam tak akan berjalan dengan baik.

Untuk memantapkan pandangannya, kyai muda Nahdlatul Ulama ini menyitir surah Al Baqarah ayat 208 sebagai dalil naqlinya bahwa seluruh syari'at Islam harus diamalkan, tidak boleh ada yang sengaja ditinggalkan walau hanya satu hukumpun karena pertimbangan untung rugi keduniaan.

Meskipun beliau ini berlatar belakang aliran keagamaan NU, tetapi pandangannya dalam masalah Islam dan Negara (Politik) sungguh sangat berbeda dengan tokoh-tokoh senior NU seperti KH. Abdurrahman Wahid, KH. Hasyim Muzadi dan lain-lain yang lebih cenderung kepada Islam Kultural bukan Islam Politik. Pandangan ulama muda NU ini justru sangat mendekati pandangan tokoh-tokoh Islam Politik seperti Ustadz Abu BakarBaasyir dan Irfan Suryahady Awwas dari Majelis Mujahidin Indonesia, serta Ismail Yusanto dari Hizbut Tahrir Indonesia yang secara tegas menyatakan bahwa hukum menegakkan Pemerintahan atau mendirikan negara Islam adalah wajib, yang mengabaikannya adalah merupakan kemaksiatan yang paling besar. Dan Allah akan mengazab dengan azab yang paling pedih. Tindakan mengabaikan tegaknya atau berdirinya Pemerintahan Islam sebagai keluar dari Islam. Siapapun orang Islam yang menolak terwujudnya kekuasaan Islam sama halnya dengan menolak perintah Nabi Muhammad SAW untuk berjamaah, dan itu berarti telah melepaskan tali Islam dari lehernya.

Tidak jauh berbeda dengan tokoh muda NU tadi, Umar Bafaqih, tokoh muda Muhammadiyah dari Lawang, Malang ini,

dalam memaknai surat An Nisa ayat 58-59 tersebut sebagai perintah membangun sebuah negara atau pemerintahan Islam yang didirikan oleh kaum muslimin, dikepalai oleh seorang Khalifah yang menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum-hukum Islam (*syari'at* Islam) bukan hukum jahiliyah. Menurut pendapatnya negara Islam adalah sebuah institusi formal yang merupakan kekuatan politik praktis berfungsi untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum Islam, serta mengemban dakwah Islam keseluruh penjuru dunia sebagai sebuah risalah dengan dakwah dan jihad *fis sabilillah*. Daulah Islamiyah adalah satu-satunya *thariqah* yang dijadikan Islam untuk menerapkan sistem dan hukum-hukumnya secara kaffah atau menyeluruh dalam kehidupan dan masyarakat, sebagai sebuah ideologi bagi negara, masyarakat dan kehidupan, Islam telah menjadikan negara beserta kekuasaannya sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dari eksistensi Islam. Hubungan Islam dan negara bersifat organik, tak dapat dipisahkan, sebab keduanya saling melengkapi atau menyempurnakan.

Tokoh lain yang juga agak sejalan dengan pemikiran kedua tokoh tersebut di atas adalah H. Imam Syafi'i, Lc, SH, MA, anggota DPRD Kabupaten Malang, dan fungsionaris DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memandang bahwa wacana pemikiran dan *political action* (tindakan politik) tidak bisa dilepaskan begitu saja dari agama terutama Islam. Agama dalam hal ini harus dipahami sebagai value (nilai) dan etika berpolitik. Yang menjadi persoalan sekarang adalah bahwa dalam praktiknya, politik acapkali dipahami sebagai sesuatu yang kotor, karena berisi taktik yang licik sebab kental warna kekuasaannya (*power*), kekerasan, dominasi, eksploitasi, hegemoni, dan sebagainya. Sehingga karakter politik yang sebenarnya suci, yang bersih dan bernuansa spiritual ini menjadi jatuh dan kotor. Menurut saya politik itu tidak kotor. Maaf saya mengatakan ini, bukan lantaran saya orang politik, orang yang terjun di dunia politik praktis, bukan. Karena politik sesungguhnya adalah sebuah cara suatu pengorganisasian pengarahan untuk menggerakkan masyarakat.

Politik itu menggerakkan masyarakat kearah tertentu untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Tidak ada seorang pun baik secara pribadi maupun kelompok yang bebas dari keterlibatannya dalam politik baik praktis maupun tidak. Dalam Islam Rasulullah sendiri adalah seorang politikus, seorang negarawan. Hanya saja dalam masalah perlu tidaknya secara formal mendirikan negara Islam saya sepanjang yang saya pelajari dari berbagai kitab tidak diketemukan rumusan atau tidak satu katapun diketemukan perkataan Rasulullah SAW mengenai Daulah Islamiyah. Beliau tidak memperdulikan atau mempermasalahakan masalah nama, yang ditekankan oleh beliau adalah essensinya yang Islam, bentuk atau nama negara tidak harus Islam tetapi yang penting essensinya Islam. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh beliau tatkala beliau hijrah dari Makkah ke Madinah, saat itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah dengan tiga strategi untuk membangun masyarakat baru di Madinah. Yang pertama adalah dengan membangun masjid, yang berfungsi untuk menghubungkan manusia dengan Allah Sang Pencipta (*hablun minallah*). Yang kedua adalah dengan membangun atau mempersatukan kaum muslimin yaitu dengan cara mempersaudarakan antara kaum anshar dan muhajirin. Hal ini dilakukan untuk memperkuat kekuatan internal kaum muslimin. Yang ketiga adalah membuat perjanjian dengan kaum non muslim di mana kaum non muslim ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan agama termasuk Yahudi ada didalamnya, singkat kata merupakan masyarakat yang majemuk dilihat dari aspek suku bangsa maupun agamanya (masyarakat plural). Dan mereka itu sudah sejak lama telah lebih dulu tinggal disana. Ini diikat dengan perjanjian tersebut yang dikenal dengan Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah.

Strategi Nabi Muhammad SAW tersebut sebenarnya dapat kita adopsi sekarang ini. Terutama itu masjid. Pada jaman Rasulullah, masjid memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang cukup menonjol adalah bahwa masjid itu berfungsi sebagai *markazul ibadah* sebagai pusat ibadah dan sebagai *markazul qiyadah* atau sebagai pusat

kepemimpinan. Nah fungsi yang kedua ini yang sekarang hilang. Masjid sebagai markazul ibadah, okeylah sekarang ini, meskipun menurut saya masih belum sempurna, sebab yang saya amati ibadah shalat yang lima waktu itupun hanya Maghrib, Isya dan Shubuh, sedangkan dua waktu lainnya di siang hari yakni Dhuhur dan Ashar seringkali masjid itu sepi dari jamaah shalat. Kalau memfungsikan masjid sebagai markazul ibadah saja kurang bisa atau masih jauh dari sempurna, apalagi memfungsikan masjid sebagai markazul qiyadah. Inilah problematikanya umat Islam terutama di Indonesia. Rasulullah SAW memimpin masyarakat lewat masjid, ada permasalahan yang terjadi diantara para sahabat diselesaikan disana, pada saat itu istana kepresidenan lah kalau sekarang ya di masjid itu. Pemahaman bahwa masjid hanya dipakai sebagai tempat shalat saja adalah pemahaman yang keliru. Pemahaman yang parsial seperti itu adalah benar-benar pemahaman yang keliru. Kalau di jaman Rasulullah SAW dulu masjid juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Bahkan latihan perang dilakukan di masjid pada jaman Nabi itu, dan itu boleh nggak apa-apa. Itulah fungsi yang pertama. Dan yang kedua kalau kita adopsi sekarang adalah mempersaudarakan atau mempersatukan umat Islam. Di era sekarang ini umat Islam kan terdiri dari kelompok-kelompok. Ini dulu yang kita garap, sebelum kita melangkah lebih jauh untuk mendirikan negara Islam atau negara yang bukan bernama Islam tetapi essensinya adalah negara Islam sebab isi didalamnya adalah nilai-nilai dan syari'at Islam yang dijalankan, maka terlebih dipersaudarakan atau dipersatukan semua komponen yang ada di kaum muslimin tersebut. Apapun golongan mereka, apapun suku bangsanya, apapun alirannya, dari manapun asalnya, yang penting mereka bersyahadat, mereka itu aqidahnya lurus, mereka itu bertauhid, mereka itu beribadah secara benar, yahh mereka adalah saudara kita, mereka berada dalam barisan kita. Adapun yang ketiga ini otomatis membuktikan bahwa Islam tidak anti pluralisme, tetapi ingat bukan pluralisme seperti yang dimaksudkan oleh kelompok Islam Liberal, ini berbeda. Pluralisme dimaksud adalah dalam arti Islam menerima kemajemukan, Islam sangat toleran dan dapat hidup

rukun dan damai berdampingan dengan dengan penganut agama lain. Sebagaimana telah dibuktikan pada jamannya Rasulullah di Madinah di mana warga masyarakat Madinah saat itu sangat beragama baik suku bangsanya maupun agamanya. Ini sekaligus untuk menepis anggapan sementara orang yang tidak suka dan anti Islam yang beranggapan bahwa kalau Islam berkuasa maka kelompok di luar Islam atau non muslim akan dihabisi atau ditindas.

Dalam pada itu tokoh Islam lain yakni KH. Drs. Mahfudz Zubaidi, MA, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang, justru mempunyai pandangan yang berbeda dengan tokoh-tokoh Islam tersebut dimuka. Beliau ini lebih cenderung mengedepankan Islam Kultural yang cenderung memisahkan agama (Islam) dan negara. Menurutnya konsep negara Islam tidak ada, sebab Al Qur'an tidak menyebut-nyebut sebuah negara Islam (Daulah Islamiyah), dan juga tidak pernah ada doktrin, Nabi Muhammad SAW sendiri tidak memperlihatkan watak politik, tetapi moral, dan yang jelas nabi Muhammad SAW tidak pernah merumuskan secara definitif mekanisme penggantian jabatannya. Jika memang Rasulullah SAW menghendaki berdirinya negara Islam, mustahil masalah suksesi kepemimpinan dan peralihan kekuasaan tidak dirumuskan secara formal, Rasulullah SAW hanya memerintahkan bermusyawarahlah kalian dalam persoalan. Masalah sepenting ini bukannya dilembagakan secara konkret, melainkan dicakupkan dengan sebuah diktum saja yaitu "masalah mereka haruslah dimusyawarahkan antara mereka". Tentu saja tidak ada negara dalam bentuk seperti itu.

KH. Drs. Mahfudz Zubaidi, MA, menawarkan salah satu cara untuk meneropong kaitan antara wawasan Islam yang universal dan supranasional dengan wawasan kebangsaan dari sebuah masyarakat bangsa dengan mengambil sudut pandang nasional antara keduanya. Rumusan fungsi tersebut termaktub di dalam fungsi keteladanan Rasulullah SAW sebagai *rahmatan lil 'alamien* (pembawa kesejahteraan bagi seluruh umat manusia dan jagat raya seisinya).

Untuk keperluan tugas penyejahteraan hidup tersebut, manusia diciptakan dengan kelengkapan sempurna (*ahsana taqwim*) sebagai makhluk. Secara demikian dia mampu mengembangkan kepribadian, dan melalui pengembangan kepribadian itu lahirlah pola hubungan natar manusia yang disebut pergaulan mesyarakat. Beliau melanjutkan, bahwasanya dengan kata lain wujud Islam sebagai *way of life* (pandangan hidup) memerlukan pengejawantahan dalam bentuk masyarakat yang berstruktur, sebab pada hakekatnya bentuk itulah yang merupakan konkretisasi pergaulan masyarakat.

Jikalau benar thesis bahwa wawasan Islam harus menemukan bentuknya dalam masyarakat berstruktur, maka sebenarnya menjadi tidak penting untuk mempersoalkan bentuk operasional masyarakat itu sendiri, selama tujuan mengupayakan kesejahteraan hidup masih dipegang sebagai patokan bersama. Dengan kata lain, bentuk yang paling mungkin dicapai adalah bentuk yang paling tepat digunakan, bukannya bentuk-bentuk utopis sebagaimana yang ditawarkan melalui idealisasi sebuah kontruksi Islam.

Agama Islam merumuskan konsep kegiatan sosial yang harus berstandar pada prinsip tujuan dan cara penyampaiannya. Secara demikian selama tujuan termasuk sasaran masih tetap, cara pencapaian menjadi masalah sekunder. Dilihat dari segi fungsi agama dalam masyarakat, Islam bertugas melestarikan sejumlah nilai dan pola perilaku sosial yang mempertalikan pencapaian tujuan dengan kemuliaan cara yang digunakan.

Secara khusus beliau mengatakan bahwa jelaslah dengan demikian bahwa Islam berfungsi penuh dalam kehidupan sebuah masyarakat bangsa melalui pengembangan nilai-nilai dasarnya sebagai etika masyarakat yang bersangkutan. Islam berfungsi bagi kehidupan masyarakat bangsa tidak sebagai bentuk kebangsaan tertentu, melainkan sebagai etika sosial yang akan memandu atau menjadi *guide* jalannya kehidupan bernegara dan bermasyarakat itu

sendiri sesuai dengan martabat luhur dan kemuliaan derajat manusia yang *ahsani taqwim*. Bahwasanya bentuk negara bangsa yang dipakai, bukan bentuk kemasyarakatan yang lain, semata-mata karena ia lebih efektif untuk pencapaian tujuan. Namun demikian, bentuk negara tersebut bukannya secara formal harus disebut sebagai negara Islam. Dengan demikian bukan wadahnya yang Islam tetapi yang penting isinya Islam. Beliau mengambil negara Malaysia sebagai contoh.

Dalam pada itu Drs. HM. Purnomo Anwar, MM, Ketua Komisi B dan Drs. H. Ainul Yakin, MM, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Malang agak sejalan dengan pemikiran KH. Mahfudz Zubaidi, MA. Kedua politisi dari Golkar dan PKB ini berpandangan bahwa Al Qur'an memilih kata amanah (*trust*) dalam menggambarkan konsesi Islam tentang Pemerintahan atau Negara, yang artinya bahwa Khalifah (presiden) menjalankan kekuasaan sebagai amanah rakyat bukan kekuasaan atas kehendaknya sendiri atau apalagi menganggapnya sebagai warisan. Kekuasaan berawal dari rakyat dilimpahkan kepada penguasa, bukan sebaliknya. Hak memerintah secara primer terletak pada masyarakat bukan pada penguasa.

Walaupun sebagai agama yang universal, Islam jangan dipaksakan memiliki hak prerogatif untuk menetapkan sisten tunggal pemerintahan atau kenegaraan tanpa mempertimbangkan apakah ia dapat diterapkan kepada seluruh wilayah dan komunitas di seluruh jagad ataukah tidak. Menurut kedua politisi Islam ini, Islam lebih menyukai dan sangat merekomendasikan sistem demokrasi. Oleh karena itu Islam memberi dua pilar bagi tegaknya demokrasi. *Pertama*, proses pemilihan demokratis, harus mengedepankan kejujuran dan integritas. *Kedua*, Pemerintahan harus menjalankan tugas atau prinsip keadilan mutlak.

Ide tentang penegakan Daulah Islamiyah (Negara Islam) di manapun di seantero dunia ini dapat dikatakan selalu dan selalu membenturkan Islam sebagai agama kepada peradaban dan kebudayaan di luar Islam yang acapkali diberi label non-Islam sekalipun secara pengalamannya ada yang Islami atau sekurang-kurangnya mengandung nilai-nilai yang Islam mendukungnya. Bukan hanya itu, ide mengenai penegakan Negara Islam juga memunculkan kecurigaan terhadap agama Islam.

Paham Islam sebagai sebuah kekuatan politik meyakini bahwa Islam bergantung pada kekuasaan. Secara demikian maka wajib agar Islam memiliki kedaulatan eksklusif dalam wadah pemerintahan dan kekuasaan dan juga diyakini bahwa tidak mungkin menerapkan Islam secara kaffah tanpa adanya sebuah Daulah Islamiyah yang berdaulat.

Sementara itu, pandangan yang memahami Islam sebagai sebuah kode etika moral dalam kerangka *rahmatan lil 'alamien* sesungguhnya memberi faedah bagi setiap manusia dan setiap bangsa, meskipun mereka belum bergabung kedalam pangkuan Islam dalam arti sebenarnya, mereka dapat hidup berdasarkan azas-azas keislaman dan menjadi bangsa-bangsa dan negara-negara yang Islami, bukan negara Islam.

Daftar Pustaka

- Al-Barbasy, Ma'mun Murod, "Kemelut Politik Di Tubuh NU Dalam Potret Sejarah", dalam *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial: Kajian*, Volume 21 Nomor 1 Januari 2005, hal. 1 - 31.
- Wadjadi, Farid, "Kegagalan Islam Politik Buah Sekularisasi dan Leberalisasi Islam" dalam *Al Wa'ie* Nomor 48 Tahun IV, 1 - 31 Agustus 2004, hal. 3-4.

- Ghazali, Adeng Muchtar, *Agama dan Keberagamaan*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2004.
- Ismail, H. Faisal, *Pijar-Pijar Islam: Pergumulan Kultur dan Struktur*, Yogyakarta, LESFI, 2002.
- Khathah, Abdullah, “Politisi Islam Yang Ideologis” dalam Nomor 48 Tahun IV, 1-31 Agustus 2004, hal. 23 - 29.
- Noeh, Munawar Fuad-Mastuki HS (ed), *Menghidupkan Ruh Pemikiran KH. Achmad Siddiq*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Syamsuddin, M Din, “Beberapa Catatan Problematika Politik Islam di Indonesia”, dalam Dr. H. Abuddin Nata, MA (ed), *Problematika Politik Islam Di Indonesia*, Jakarta, Grasindo, hal. 22-29.
- Shafiyah, Amatullah dan Haryati Soeripno, *Kiprah Politik Muslimah: Konsep dan Implementasinya*, Jakarta, Gema Insani, 2003.
- Shobron, Sudarno, *Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam Pentas Politik Nasional*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2003.
- Soewignyo, *Kuncung-Bawuk Coblos Jagat (NU)*, tak diterbitkan, 1962.
- Turmudi, Endang, *Perselingkuhan Kyai dan Kekuasaan*, Yogyakarta, LKiS, 2004.

BAB III

STUDI KASUS KOTA MALANG

Oleh Abdussomad

3.1 Pendahuluan

Kota Malang adalah salah satu kota terbesar di Jawa Timur yang berada pada ketinggian 400-650 di atas permukaan laut. Dengan pemandangan yang indah dan suhu udara yang sejuk (rata-rata 24,13 derajat Celcius), kota ini sangat sesuai untuk dikembangkan sebagai kota pendidikan dan wisata. Kenyataan ini tampaknya disadari benar oleh pemerintah Kota Malang. Pada tahun 1962 kota ini ditetapkan sebagai kota pariwisata dan pendidikan, di samping sebagai kota industri. Secara simbolik ketiga cita-cita pembangunan tersebut tersurat dalam motto Tribina Cita Kota Malang.

Secara historis, nama Kota Malang merupakan kependekan dari Malang Kucecwara¹ yang berarti Tuhan menghancurkan yang batil dan menegakkan yang hak. Nama tersebut diambil dari nama sebuah tempat di sekitar candi Malang sebagaimana tersebut dalam piagam Dinoyo (750 – 908). Meskipun letak candi tersebut belum diketahui dengan jelas, dalam piagam Dinoyo digambarkan bahwa sejak 760 daerah Malang dan sekitarnya, termasuk Singosari, merupakan bagian dari pusat kegiatan politik dan budaya berbagai dinasti, seperti Singasari dan Majapahit (Pemda Malang, 1998: 3-4).

¹ Sesanti Malang Kucecwara disahkan menjadi semboyan kota Malang pada tanggal 1 April 1914 dan tercantum dalam lambang kota Malang.

Seperti halnya daerah-daerah lainnya Kota Malang juga pernah menjadi bagian dari wilayah jajahan Belanda. Pada tahun 1767 Kota Malang ditetapkan Belanda sebagai bagian dari wilayah residensi Pasuruan. Tetapi, baru pada tahun 1824 untuk pertama kalinya kota ini memiliki seorang asisten Residen sendiri. Selanjutnya berdasarkan ketetapan pemerintah jajahan Belanda pada tahun 1914 Kota Malang diresmikan sebagai kotamadya (*gementee*). Peresmian ini merupakan konsekuensi dari undang-undang desentralisasi yang dibuat pemerintah Belanda sendiri pada tahun 1903. Meskipun demikian, hingga 1918 kota ini masih dijabat oleh Pamong Praja. Baru pada tahun 1919 kota ini dipimpin oleh seorang walikota (Pemda Malang, 1998: 4).

Seperti di banyak kota lainnya di Indonesia pada masa kolonial tata ruang Kota Malang memperlihatkan sifat diskriminatif. Sejumlah kawasan tengah kota yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum, seperti kawasan Ijen Boulevard dan sekitarnya, ditetapkan sebagai pusat pemukiman bagi keluarga orang-orang Eropa. Adapun mayoritas penduduk pribumi harus puas bertempat tinggal di pinggiran kota. Tetapi, sepeninggal Belanda segregasi sosial seperti ini secara perlahan mengalami perubahan. Kini segregasi pemukiman penduduk Kota Malang tak lagi didasarkan atas ras, tetapi cenderung atas dasar kelas sosial (http://id.wikipedia.org/wiki/Malang_kota).

Perkembangan Kota Malang mulai kelihatan pesat sejak pemerintah kolonial Belanda mengoperasikan kereta api pada tahun 1879. Dengan adanya sarana transportasi tersebut, kota ini menjadi semakin terbuka. Mobilitas masyarakat dari dan ke Kota Malang menjadi semakin lancar. Kondisi ini menimbulkan daya tarik di mata para pendatang. Lebih-lebih mengingat wilayahnya yang sejuk dan subur. Tetapi, sebagai konsekuensi dari pertumbuhan penduduk dan arus urbanisasi yang cukup tinggi banyak lahan pertanian akhirnya berubah fungsi menjadi kawasan perumahan dan industri.

Dalam dua dekade terakhir ini kota ini semakin menampakkan kemodernannya. Sejumlah mal dan supermarket modern menghiasi sudut-sudut kota yang dilengkapi dengan rumah makan aneka siap saji dari negara Barat dan Asia Timur. Sebagai salah satu kota tujuan wisata yang penting di Jawa Timur, kota ini memiliki 6 hotel berbintang, 38 hotel melati, dan 13 akomodasi lainnya (BPS, 2005:111). Taksi berarga lalu lintas di sejumlah sudut kota guna melayani pelanggannya. Selain itu, meskipun hanya berjarak dua jam dengan mobil ke Surabaya, belakangan ini lapangan terbang Abdurrahman Saleh telah pula disinggahi pesawat komersial.

Berdasarkan hasil registrasi penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik Malang (2005: 23), pada tahun 2004 Kota Malang yang luasnya mencapai 110,06 km² berpenduduk sekitar 789.348 jiwa, terdiri atas 392,994 laki-laki dan 396,354 perempuan. Dengan kepadatan penduduk yang berkisar antara 4210-12.261 jiwa per kilometer persegi, rata-rata jumlah penduduk per keluarga mencapai 3.3% per tahun (BPS, 2004: 26). Secara umum penduduk Kota Malang tersebar di lima kecamatan yang ada, yakni Klojen, Blimbing, Kedungkandang, Sukun dan Lowokwaru. Tetapi, seperti halnya di kota-kota lainnya, persebaran penduduk Kota Malang juga tidak merata. Kecamatan Klojen yang terletak di jantung Kota Malang menjadi kecamatan yang terpadat (12.261 jiwa per km²). Adapun tingkat kepadatan penduduk terendahnya berada di Kecamatan Kedungkandang dengan 4.210 jiwa per km².

Sebagai salah satu kota besar di Jawa Timur penduduk Kota Malang cukup heterogen, termasuk di dalamnya penduduk keturunan Cina dan Arab. Sesudah etnik Jawa, etnik Madura merupakan etnik terbesar kedua penduduk kota ini. Kenyataan ini juga tercermin dari bahasa utama penduduk Kota Malang yang berbahasa dialek Jawa Timuran dan Madura. Berbeda dengan persepsi kebanyakan orang tentang bahasa Jawa, gaya bahasa Jawa Timuran Malang ini kurang memperlihatkan gaya bahasa unggah-ungguh. Hal ini menunjukkan sikap berbahasa mereka yang langsung dan kurang menyukai basa-

basi. Sikap tersebut bisa jadi dipengaruhi oleh sikap berbahasa penduduk pesisir Jawa Timur yang didominasi oleh penduduk keturunan Madura yang letaknya berbatasan dengan Kota Malang.

Berdasarkan data statistik 2003 (BPS: 2004) Islam merupakan agama paling dominan yang dianut oleh 88,5% penduduk Kota Malang. Sisanya adalah penganut agama Kristen (6,24%), Katolik (3,7%), Hindu (0,8%) dan Budha (0,73%). Seperti halnya banyak kota di Jawa Timur, di kota ini juga terdapat banyak pesantren dan lembaga pendidikan Islam lainnya. Dalam catatan BPS (2004: 40-42) setidaknya terdapat 28 sekolah ibtidaiyah, 16 sekolah tsanawiyah, dan 9 sekolah aliah dengan jumlah murid keseluruhannya 12.003 orang (BPS, 2004: 40-42). Selain itu, terdapat pula 389 taman pendidikan anak (TPA)/taman pendidikan al Qur'an (TPO), 51 madrasah diniyah, 168 lembaga dakwah, 331 majelis taklim, dan 22 buah pondok pesantren. Dua Pesantren yang cukup terkenal, seperti pesantren al Hikam yang dipimpin oleh ketua PBNU, Hasyim Muzadi, dan pesantren Darul Hadis juga terdapat di kota ini.

Selain memiliki banyak madrasah dan pesantren, Kota Malang juga berhasil menjadikan dirinya sebagai kota pendidikan terpenting di Jawa Timur setelah Surabaya. Dengan iklim yang relatif sejuk dan tingkat hidup yang cukup murah Malang menjadi salah satu kota pendidikan yang diminati pelajar pendatang, khususnya dari sekitar kota tersebut, seperti Blitar, Pasuruan, Kediri, Probolinggo, dan Jember. Hal ini dimungkinkan oleh tersedianya fasilitas lembaga pendidikan yang cukup memadai. Sejauh ini kota ini memiliki tak kurang dari 301 SD negeri, 58 SD swasta, 100 SLTP negeri, dan 21 SLTP swasta. Selain itu terdapat pula 10 SMU negeri, 41 swasta, dan 37 sekolah kejuruan. Jumlah perguruan tinggi mencapai 48 buah, lima di antaranya adalah perguruan tinggi negeri (PTN). Kelima PTN tersebut adalah Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Islam Negeri Malang, Politeknik Negeri Malang, dan Politeknik Negeri Kesehatan Malang. Menurut salah seorang pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Malang, jumlah pelajar

pendatang di Kota Malang diperkirakan mencapai seperdelapan dari keseluruhan penduduk Malang.

Meskipun Islam merupakan agama yang paling dominan di Kota Malang, agama-agama lain juga memperoleh tempat berkembang. Di samping terdapat pusat pendidikan seminari Alkitab, terdapat pula gereja tua yang telah berdiri sejak masa kolonial Belanda, tak jauh dari masjid Agung Malang dan klenteng yang terletak di kota lama. Bisa jadi karena dinilai sebagai masyarakat yang agamis, ketika meresmikan Malang sebagai kotamadya (*gemeente*) pada tahun 1914, pemerintah jajahan Belanda memberikan motto Malang Kucecwara yang berarti Tuhan menghancurkan yang batil dan menegakkan yang hak.

3.2. Dikotomi Santri – Abangan dan Hubungannya Sosialnya

Menurut Emile Durkheim, agama adalah sebuah sistem kepercayaan dan ritual sakral yang mengikat orang-orang secara bersama-sama ke dalam sebuah kelompok sosial (Abercrombie, Nicholas et.al, 1984: 356). Sebagai sebuah identitas kelompok agama dapat bersifat integratif dan sebaliknya dapat pula bersifat disintegratif. Secara normatif, ketaatan suatu masyarakat beragama dalam menjalankan ajaran agamanya akan berdampak positif pada ketertiban, persatuan, dan keamanan lingkungan sosialnya. Hal ini bisa dipahami karena agama mengajarkan nilai dan norma yang baik tentang kehidupan. Tetapi, dalam kenyataannya hampir selalu terjadi kesenjangan antara tataran normatif dan empiriknya. Fanatisme keagamaan yang berlebihan tak jarang menimbulkan sikap hidup eksklusif, pengkotakan ruang sosial, dan prasangka. Bisa dipahami bila kemudian terdapat sejumlah ketegangan dan konflik sosial, baik antarumat beragama, maupun antarumat yang seagama.

Sebagaimana di daerah lainnya umat Islam di Kota Malang juga mengelompok dalam berbagai organisasi dan aliran pemikiran. Di samping NU dan Muhammadiyah, terdapat sejumlah organisasi

Islam yang juga mewadahi berbagai paham keagamaan umat Islam Malang, seperti Al Irsyad, Pembinaan Imam Tauhid Islam (PITI), Majelis Dakwah Islam, dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Keragaman organisasi tersebut setidaknya mencerminkan bahwa umat Islam Kota Malang tidak bersifat monolit. Tidak seperti dalam agama Katolik, Islam tak mengenal adanya kelompok yang memegang otoritas tertinggi sebagai penafsir tunggal. Lebih dari itu, selain terbuka terhadap penafsiran, persentuhan antara agama dunia ini dengan masyarakat lokal telah melahirkan aneka tradisi. Ketika melakukan penelitian di Jawa Timur pada tahun 1950-an, Clifford Geertz menemukan ada tiga varian penting dalam masyarakat Islam di Jawa, yakni santri, priyayi dan abangan.

Klaim Geertz dan sejumlah ilmuwan sosial lainnya, seperti Harold Crouch, bahwa mayoritas masyarakat Jawa adalah abangan mendapat dukungan empiriknya di Kota Malang. Hasil pemilu 1955 tingkat Kota Malang, misalnya, menunjukkan adanya dominasi komunitas abangan di kota tersebut sebagaimana tampak pada dominasi suara Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam pemilu 1955. Pada pemilu tersebut PKI memperoleh 12 kursi. Adapun dua partai Islam terbesar, yakni NU dan Masyumi hanya memperoleh 7 dan 2 kursi (Arsip Kota Malang). Adapun PNI sendiri meraih 4 kursi sehingga bila suara kedua partai abangan tersebut digabungkan, suara keduanya 77% lebih besar daripada suara partai Islam terbesar tersebut.

Tabel 1
Hasil Pemilu Empat Parta Besar Kota Malang
Tahun 1955

Nama Partai	1955 (kursi)
PKI	12
NU	7
PNI	4
Masyumi	2

Sumber: Arsip Pemerintah Kota Malang

Sebagai kelompok paling dominan hubungan sosial kelompok abangan di Kota Malang relatif terjalin dengan baik. Bagi masyarakat abangan hal ini dapat dipahami mengingat bagi mereka agama adalah kepercayaan yang mengajarkan kebaikan kepada semua orang dan yang sifatnya pribadi. Meskipun kelompok santri tradisional umumnya berpendapat bahwa agama tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga bersifat publik, berbeda dengan kelompok santri modernis, mereka lebih adaptif dan permisif pada sejumlah tradisi lokal. Sebagai sama-sama pendukung tradisionalisme Jawa, santri tradisional umumnya lebih mementingkan keharmonisan sosial daripada membiarkan terjadinya konflik sosial. Kalaupun terdapat dikotomi santri tradisional, dikotomi tersebut lebih dipandang sebagai dinamika keimanan yang bisa meningkat atau menurun. Dengan cara pandang tersebut kehidupan beragama masyarakat Kota Malang hampir tak mengalami persoalan berarti.

Secara historis, hubungan dan toleransi yang baik antara penganut Islam dan Kristen, khususnya, telah terjalin baik sejak masa kolonial. Hal ini terlihat dari adanya gereja tua yang berlokasi dekat alun-alun dan tak jauh dari masjid Agung Malang. Di Kota ini pusat pendidikan seminari Alkitab juga telah lama berdiri tanpa adanya resistensi yang berarti dari umat Islam Malang. Kehadiran pusat pendidikan tersebut menunjukkan bahwa sejak masa kolonial telah menjadikan Kota Malang sebagai salah satu pusat penyebaran Kristen.

Dalam sejarahnya ketegangan hubungan sosial antarsesama Muslim di Jawa Timur, khususnya, justru lebih tampak pada sesama santri, yakni antara anggota Muhammadiyah yang modernis dan NU yang tradisional. Hal ini kiranya dapat dipahami karena tidak seperti kelompok abangan yang menyadari keterbatasan pengetahuan agamanya, kedua kelompok santri tersebut sama-sama mengklaim sebagai memiliki pengetahuan agama yang cukup. Oleh sebab itu, dengan argumentasi agama yang dimilikinya, gerakan purifikasi Islam yang dilancarkan Muhammadiyah memperoleh resistensi yang

cukup keras dari kalangan santri tradisional hingga melahirkan organisasi Islam tradisional NU. Sebagaimana diketahui, setidaknya sampai tahun 1950-an kekurangharmonisan hubungan di antara keduanya tampak pula dalam ranah politik. Sebagai akibat dari ketidakpuasannya pada dominasi kelompok Islam modernis di tubuh partai Masyumi, pada tahun 1952 NU menyatakan keluar dari partai Islam tersebut dan selanjutnya mendirikan partai sendiri.

Sebagai organisasi keagamaan yang tak lagi terlibat langsung dalam politik, hubungan NU dan Muhammadiyah berjalan cukup baik di era reformasi ini. Kedua organisasi tersebut bukan saja gencar mengkampanyekan pandangan hidup yang inklusif, melainkan juga telah menjalin kerjasama dalam program gerakan pemberantasan korupsi dan gerakan moral lainnya (Koran Tempo, 3 Januari 2002). Kenyataan ini bisa dipahami mengingat dewasa ini kedua tokoh utamanya semakin sering bertemu untuk sama-sama berperan lebih aktif dalam membangun integritas bangsa (Mu'ti, 2004: 63). Dan dalam kaitan ini pula di Kota Malang sebagai ketua umum NU Hasyim Muzadi mendirikan pesantren mahasiswa yang santrinya berasal dari berbagai aliran keagamaan. Sebagaimana diketahui sejak munculnya era reformasi ada sejumlah kelompok Islam garis keras, seperti kelompok Hizbut Tahrir. Di kampung Kauman, Kecamatan Klojen, Malang, misalnya kelompok ini ditengarai banyak memperoleh pengikut dari anggota organisasi Islam Al Irsyad². Salah seorang ulama muda kharismatik dari Al Irsyad, Kauman, yang sempat diwawancarai secara terang-terangan menilai banyaknya organisasi Islam, seperti NU dan juga Muhammadiyah, yang tak lagi berjalan di atas ajaran Islam. Sebagai kelompok yang eksklusif, ulama muda tersebut juga menilai bahwa tak satu partai Islam pun, termasuk PKS, yang ideologinya sesuai dengan Islam karena menurutnya di negara yang bukan Islam seperti Indonesia umat Islam tidak layak

² Sebagaimana diketahui, Ja'far Umar Thalib, mantan pimpinan Lasykar Jihad, pernah menjadi anggota Al Irsyad Malang.

terlibat dalam parlemen. Seperti halnya Lasykar Jihad, ia sendiri memilih gerakan apolitik.

3.3. Masalah Kerukunan Hidup Beragama di Kota Malang

Tidak seperti era sebelumnya, sejak awal tahun 1970-an dikotomi santri dan abangan menjadi tak relevan lagi untuk dipertentangkan. Lebih-lebih setelah terjadinya puncak kebangkitan Islam yang secara simbolik ditandai dengan kelahiran Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Secara historis, fenomena ini terjadi sejak digulirkannya pembaruan pemikiran Islam yang dilakukan sejumlah pemikir dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Bertolak dari kondisi sosial umat Islam yang tersingkirkan, sebagai ketua umum HMI dan sekaligus tokoh utama pembaruan Islam, Nurcholish Madjid melontarkan pemikiran yang dipandang dapat menjadi *psychological striking force* bagi umat Islam. Dengan gagasan “Islam, yes; politik Islam, no”, ia berharap umat Islam tidak lagi terjebak dalam persengketaan yang tak mendasar antarsesama umat. Dikotomi santri-abangan dan dikotomi santri tradisional-modernis yang mengejawantah, terutama, dalam kotak-kotak politik umat Islam dipandang telah semakin memperlemah kekuatan politik umat Islam itu sendiri. Secara tidak langsung, ia menunjuk tersingkirnya umat Islam dalam rezim politik Orde Baru yang kelahirannya justru terbentuk melalui dukungan besar umat Islam, termasuk HMI.

Adalah sulit untuk dielakkan bahwa gagasan pemikiran Nurcholish Madjid dan pembaharu muda Islam era 1970-an telah memberikan makna penting dalam memperbaiki hubungan antarsesama umat. Desakralisasi politik yang digagasnya telah membantu menciptakan hilangnya batas antara santri dan abangan yang sebelumnya dirasakan cukup mengganggu dalam pembentukan hubungan sosial dan politik. Melalui pendekatan kultural proses Islamisasi umat Islam dapat berjalan tanpa adanya nuansa ketegangan dan kecurigaan sosial yang berlebihan. Kebijakan politik Orde Baru

yang represif secara tak langsung turut mempercepat keberhasilan gerakan politik kultural dan proses Islamisasi umat Islam. Lebih dari itu, elit dan pimpinan umat Islam, khususnya, juga makin tersadari bahwa perbedaan pemahaman keagamaan yang muncul di antara mereka dipandang sebagai sebuah kewajaran dan bukan dianggap sebagai persoalan yang perlu dipertentangkan satu sama lainnya. Dengan demikian, tak ada lagi kelompok tertentu yang berhak memonopoli pemahaman keagamaan.

Pemahaman keagamaan yang seperti ini juga dirasakan oleh warga NU dan Muhammadiyah yang menjadi konstituen utama umat Islam Kota Malang. Hal ini dapat terjadi karena masing-masing pihak semakin berusaha untuk membuka diri dengan melakukan dialog dan diskusi melalui berbagai sarana sosial. Meskipun sejarah kelahirannya sempat memperoleh kritik, disadari atau tidak Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menjadi salah satu sarana penting yang memungkinkan terjembatannya berbagai aliran keagamaan. Proses pendewasaan yang dilakukan berbagai organisasi keagamaan sangat terbantu oleh peranan berbagai media massa, terutama kehadiran sejumlah siaran televisi. Kedewasaan sikap umat Islam Kota Malang, misalnya, tampak ketika terjadi pertikaian politik antara Gus Dur dan Amin Rais, tokoh utama kelompok Poros Tengah berkenaan dengan kasus Bruneigate yang berakhir dengan tersingkirkannya Gus Dur dari kursi kepresidenannya. Menurut penuturan responden³, pada waktu itu hampir setiap hari terjadi demonstrasi di depan masjid Agung Kota Malang yang dilakukan pendukung Gus Dur. Tetapi demonstrasi tersebut tidak diarahkan sebagai serangan kepada warga Muhammadiyah, tetapi sebagai kritik kepada pribadi Amien Rais yang dinilai telah mengkhianati dukungannya terhadap Gus Dur.

Di era reformasi yang demokratis ini masyarakat Kota Malang tampak cukup menghormati hak-hak politik masing-masing

³ Hasil wawancara dengan Imam Muzakkir, seorang aktivis LSM Malang.

kelompok masyarakat beragama. Kalaupun terdapat konflik politik, konflik tersebut umumnya cenderung terjadi antarsesama umat yang berasal dari organisasi keagamaan yang sama, seperti antara PPP dan PKB yang umumnya sama-sama warga NU atau antara PAN dan Partai Bulan Bintang (PBB)⁴ yang umumnya simpatisan Muhammadiyah. Sebagai contoh, dalam pemilu legislatif 2004, seorang calon anggota legislatif dari PBB yang juga ketua ranting Muhammadiyah Kelurahan Kauman menuturkan bahwa partainya tak memiliki masalah berarti dengan partai yang konstituen utamanya tak berasal dari organisasi keagamaan yang sama dengannya. Persoalan yang dirasakannya justru muncul dengan partai politik yang konstituen utamanya sama-sama dari Muhammadiyah, yakni PAN. Menurutnya, pada pemilu legislatif 2004 banyak brosur kampanye PBB yang dirobek secara sengaja dan ditutupi dengan brosur kampanye PAN.

Secara umum kekurangharmonisan hubungan sosial antarumat Islam di Kota Malang terjadi pada masa pemilu. Di luar masa itu tersebut hubungan sosial mereka relatif cukup baik, termasuk dalam hal beribadah. Sebagai kelompok minoritas, salah satu pimpinan Muhammadiyah yang juga salah satu ketua MUI Kota Malang bisa memahami kedudukan imam masjid Agung Kota Malang yang selalu dijabat oleh orang NU. Tetapi, ini tidak berarti bahwa orang Muhammadiyah tidak bisa menjadi khatib Jumat di masjid tersebut.

Tingkat toleransi beragama yang cukup baik di Kota Malang bukannya tanpa tanpa cacat. Pada sekitar tahun 1986 atau tak lama setelah terjadinya peristiwa berdarah Tanjung Priok 1984, misalnya, di Kelurahan Kasin, Kecamatan Sukun pernah pula terjadi pemboman terhadap gereja/seminari yang dilakukan kelompok Islam garis keras, yang ditengarai sebagai pengikut Husein al Habsyi, yang pernah

⁴ Bila konstituen utama PPP dan PKB adalah warga NU, konstituen utama PAN dan PBB adalah warga Muhammadiyah.

terlibat dalam pemboman candi Borobudur. Selain itu, sekitar akhir Oktober 2004 lalu juga terjadi demonstrasi yang dilakukan umat Islam yang menolak pembangunan gereja di Kedungkandang karena gereja tersebut dinilai menyalahi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Tetapi, selain frekuensi insidennya yang terlalu kecil, kedua fenomena tersebut kiranya juga tak bisa dikatakan menggambarkan tingginya tingkat ketidaktoleranan masyarakat Islam Malang. Terjadinya kedua fenomena tersebut kiranya lebih merupakan ekspresi kekecewaan sebagian umat Islam terhadap pemerintah yang dinilainya kurang mampu menegakkan keadilan pada masyarakatnya.

Tingkat toleransi dan keterbukaan masyarakat Kota Malang yang cukup tinggi sedikit banyaknya telah turut mempengaruhi pembangunan kota ini yang sejak tahun 1962 telah mencanangkan kotanya sebagai pusat pendidikan, pariwisata dan industri yang dikenal dengan nama tribina cita Kota Malang. Tanpa toleransi dan keterbukaan yang tinggi dari masyarakatnya, sulit dibayangkan kota ini dapat mewujudkan cita-citanya, khususnya untuk menjadi kota wisata dan pendidikan terpenting di Jawa Timur. Keberhasilan pembangunan pariwisata Kota Malang salah satunya dapat dilihat dari data statistik fasilitas hotel di kota ini. Data statistik tahun 2004 memperlihatkan bahwa jumlah kamar hotel berbintang di Kota Malang mencapai 12.958, sedangkan hotel tak berbintang 18.104. Dalam hubungan dengan hal ini, pada tahun 2004 jumlah wisatawan domestik/asing tamu yang datang mencapai 103.342 orang (BPS, 2005: 112 dan 115).

Keberhasilan yang sama juga ditunjukkan dalam bidang pembangunan pendidikan. Kota Malang telah menjadi salah satu kota pendidikan utama yang diminati banyak pelajar di Jawa Timur, khususnya. Seperti disebutkan di atas jumlah pelajar pendatang di kota ini mencapai sekitar seperdelapan dari penduduk Malang atau sekitar 100.000 orang. Adalah sulit dipungkiri bahwa keberhasilan kedua hal tersebut dapat terjadi berkat adanya tingkat toleransi sosial yang cukup tinggi dari masyarakatnya.

Seperti dikatakan di atas, dalam sejarah kehidupan beragama di Jawa, khususnya, persoalan kerukunan hubungan umat beragama di Indonesia juga terjadi antarsesama santri, yakni antara santri tradisional dan modernis. Kelahiran organisasi Islam tradisional NU pada tahun 1926 dapat dikatakan sebagai antitesis atas kehadiran organisasi Islam modernis, Muhammadiyah, yang lahir pada tahun 1912. Dengan mengusung tema purifikasi Islam, kritik Muhammadiyah atas tradisi keagamaan kelompok Islam tradisional dipandang sebagai ancaman serius atas pendekatan kultural yang diusung warga NU. Perbedaan penafsiran dalam masalah keagamaan, seperti ziarah kubur, selamatan, dan qunut subuh telah menimbulkan ketegangan sosial yang dampaknya meluas ke persoalan sosial lainnya dan bahkan ke persoalan politik. Dalam kehidupan sosial, tidak sedikit warga NU yang enggan menjalin ikatan perkawinan dengan warga Muhammadiyah dan demikian pula sebaliknya. Provokasi yang dilakukan banyak dai dalam ceramahnya dengan saling menyerang satu sama lainnya membuat suasana kerukunan hidup beragama menjadi terganggu. Di tataran lapisan umat yang paling bawah tak sedikit yang menganggap Islam seolah-olah identik dengan NU atau Muhammadiyah.

Tetapi pandangan seperti itu kini telah semakin ditinggalkan banyak orang. Melalui forum-forum dialog dan diskusi semakin tumbuh kesadaran di kalangan umat Islam tentang perlunya penghormatan terhadap orang yang memiliki perbedaan pemahaman. Seperti disebutkan di atas, sebagai salah satu organisasi yang mewadahi berbagai latar belakang pemahaman keagamaan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang pendiriannya disponsori Suharto, telah menjadi wadah yang amat penting dalam membangun saling pengertian di antara mereka dan sekaligus sebagai sarana utama dalam meredakan ketegangan di antara berbagai penganut aliran keagamaan. Sebelum terbentuknya MUI, dialog dan komunikasi antara pimpinan Islam tradisional dan modernis kurang memperoleh tempat. Masing-masing pihak cenderung membangun komunitasnya secara eksklusif. Walaupun terdapat komunikasi di antara mereka,

komunikasi tersebut lebih cenderung bersifat personal ketimbang institusional. Sejak terbentuknya MUI, kebisuan hubungan sosial dan komunikasi di antara mereka menjadi semakin cair dan berbagai persoalan keagamaan umat dapat dibicarakan dengan baik meskipun tidak selalu menghasilkan kesamaan pendapat.

Selain faktor tersebut di atas, keterbukaan sikap di kalangan santri tradisional dan modernis tampaknya juga dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan mereka yang semakin baik. Meskipun pesantren masih tetap menjadi lembaga pendidikan kalangan Islam tradisional, sejak awal 1970-an semakin banyak orang NU yang berhasil mengenyam pendidikan modern. Sebaliknya, tidak sedikit pula orang Muhammadiyah yang mendalami kitab kuningnya NU. Melihat hal tersebut, sejumlah pengamat sosial melihatnya sebagai terjadinya proses pendoktoran orang-orang NU dan pengkayaan orang-orang Muhammadiyah (Mas'ud, 2004: 83-88).

Keterbukaan orang-orang NU terhadap pendidikan modern telah menimbulkan dampak yang positif. Meskipun mayoritas mereka masih tergolong ortodoks, sejak awal tahun 1970-an banyak pembaharu Muslim yang lahir dari latar belakang keluarga NU. Hal ini misalnya terlihat dari dua pembaharu Muslim terdepan, yakni Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid, yang berlatar belakang NU. Lebih dari itu, para aktivis muda dan pemikir Islam liberal yang muncul di awal abad ke 21, terutama juga berasal dari latar belakang keluarga NU. Dari sisi ini, Muhammadiyah yang dikenal sebagai organisasi Islam modernis justru berada selangkah di belakang anak-anak muda NU. Sejak berakhirnya era Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, Muhammadiyah boleh dikatakan telah kehilangan jati dirinya sebagai organisasi pemikiran modernis Islam. Karena hal inilah pula yang mendorong Nurcholish Madjid memproklamasikan gagasan pembaruan pemikirannya.

Keterbukaan sikap kalangan santri tradisional dalam menerima lembaga pendidikan modern telah mengantarkan

kesuksesan organisasi Islam NU dalam membangun lembaga pendidikan modern yang telah lebih dahulu dilakukan Muhammadiyah. Seperti halnya Muhammadiyah, NU juga telah berhasil membangun lembaga pendidikan modern dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Di Kota Malang sendiri, misalnya, baik Muhammadiyah maupun NU sama-sama memiliki universitas besar, yakni Universitas Muhammadiyah Malang dan Universitas Islam Malang (Unisma) yang dibangun oleh NU.

Dengan cara pandang yang semakin dewasa kini umat Islam dari berbagai aliran dan latar belakang pandangan keagamaan mereka bukan saha sering bertemu dan berdiskusi secara ilmiah, tetapi juga semakin dapat bekerja sama. Di banyak universitas Islam negeri (UIN), seperti UNI Syarif Hidayatullah, Jakarta, sejumlah intelektual NU dan Muhammadiyah, misalnya, saling bekerja sama dalam membangun pusat kajian dan penelitian Islam. Hal yang sama juga terjadi di Kota Malang. Banyak dosen dan pejabat universitas Muhammadiyah Malang, misalnya, yang berasal dari keluarga NU. Seperti dituturkan salah satu ketua ranting Muhammadiyah Kauman, rumah sakit bersalin Muhammadiyah yang terletak di keluarahan tersebut juga banyak mempekerjakan warga NU. Alasan pertimbangan profesionalitas yang dikemukakan pimpinan rumah sakit tersebut telah melunakkan protes yang dilakukan warga Muhammadiyah yang merasa lebih berhak ketimbang warga NU.

Kedua gambaran tersebut memperlihatkan bahwa dewasa ini kendala budaya (*cultural barrier*) antara NU dan Muhammadiyah telah semakin mencair. Mereka semakin mampu menghargai adanya perbedaan pendapat di antara mereka. Apalagi secara substansi mereka melihat bahwa perbedaan pendapat yang terjadi selama ini lebih bersifat khilafiyah dan bukan mendasar. Kedewasaan sikap seperti ini antara lain juga diperlihatkan para anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Malang yang berasal dari berbagai aliran keagamaan dalam membahas persoalan solat berbahasa Indonesia yang

diperkenalkan Mochammad Yusman Roy (Gus Roy), pimpinan pondok iktikaf Ngaji Lelaku Lawang. Meskipun pagi-pagi sekali MUI Malang telah memberi label sesat kepada Gus Roy, namun dalam rapat selanjutnya anggota MUI tidak bisa memberikan fatwa yang bulat. Seperti dikatakan salah satu ketua MUI yang merangkap pula sebagai salah satu ketua Muhammadiyah Kota Malang⁵, para anggota MUI akhirnya tidak berhasil memperoleh kesatuan pendapat mengenai persoalan tersebut. Di satu pihak, ada yang menganggap bahwa solat berbahasa Indonesia hukumnya haram dilakukan, tetapi di pihak lain ada pula yang menganggapnya sah⁶. Oleh sebab itu, hakim pengadilan negeri Malang juga tak berhasil membuktikan adanya unsur penodaan agama yang dilakukan Gus Roy. Meskipun ia divonis 2 tahun penjara, alasannya karena secara subsider ia dianggap telah menyebarkan gambar atau selebaran yang menyebarkan permusuhan kepada pihak lain (Detikcom, 30 Agustus 2005).

Untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah antara warga NU dan Muhammadiyah, NU Malang, misalnya, turut berpartisipasi dalam membantu keberhasilan muktamar Muhammadiyah ke 45 yang diselenggarakan pada bulan Juli 2005 di universitas Muhammadiyah Malang. Banser NU, misalnya, turut berperan dalam menjaga keamanan muktamar tersebut. Hubungan kerjasama antara kedua organisasi besar Islam ini telah pula dilakukan dalam beberapa bentuk. Pada tahun 1999, misalnya, Pimpinan Pemuda Muhammadiyah dan Anshor NU mengadakan pengajian bersama dalam rangka memuluskan pencalonan Gus Dur ke kursi Presiden. Selanjutnya pada tahun 2002 ketua umum NU, Hasyim Muzadi, dan

⁵ Hasil wawancara dengan ustaz M. Nidzom, Juni 2005.

⁶ Yang menganggapnya sah bertolak dari pertimbangan bolehnya umat Islam menambahkan bacaan dalam solat sebagaimana yang banyak dilakukan ulama NU. Memberikan tambahan terjemahan dalam solat yang dilakukan Gus Roy kedudukannya dipandang sama dengan menambahkan bacaan dalam solat. menggunakan bahasa Arab.

ketua umum Muhammadiyah, Syafii Maarif, juga mengadakan kerjasama gerakan moral antikorupsi (2004: 159).

3.4. Studi Kasus Kehidupan Beragama Masyarakat Kauman

Kauman adalah sebuah kampung (sekaligus kelurahan) yang terletak di jantung Kota Malang. Di kelurahan yang terletak di Kecamatan Klojen ini juga terdapat masjid agung Kota Malang. Sebagaimana layaknya sebuah kampung, rumah-rumah penduduk tampak saling berhimpitan dengan akses jalan yang sempit yang hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda dua. Di ketiga kampung tersebut terdapat sejumlah masjid yang menjadi pusat peribadatan masing-masing kelompok keagamaan dan 16 kelompok majelis taklim. Sebagai basis NU di kampung Kauman terdapat ranting NU, sedangkan di kampung Tongan yang menjadi basis warga Muhammadiyah tidak saja terdapat ranting Muhammadiyah, tetapi juga kantor cabang NU Kota Malang. Selain itu, di Kelurahan Kauman terdapat pula beberapa ranting partai politik yang meliputi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Damai Sejahtera (PDS).

Sekadar gambaran dengan komposisi penduduk Islam yang mencapai 8247 jiwa (89,02%), Kauman dapat dikatakan sebagai kampung santri. Mayoritasnya beretnik Jawa (90,76%), disusul oleh etnik Cina (3,47%) dan Arab (1,27%). Sebagai kampung yang didominasi oleh penduduk Muslim, komunitas Muslim di kampung Kauman tidak satu. Setidaknya terdapat empat komunitas Muslim yang tinggal di kampung tersebut. Masing-masing dilengkapi dengan masjid sendiri. Yang pertama dan paling dominan adalah penduduk pribumi yang secara kultural berafiliasi ke tradisi keagamaan NU. Kedua, yang tergolong minoritas adalah penduduk pribumi yang

secara kultural berafiliasi ke Muhammadiyah. Ketiga, penduduk keturunan Arab Alawiyyin yang secara kultural dekat dengan tradisi keagamaan NU. Dan terakhir, penduduk keturunan Arab non-Alawiyyin yang secara kultural lebih berafiliasi ke Al Irsyad. Yang terakhir ini juga sering disebut penduduk Kauman sebagai pengikut organisasi Islam Hizbut Tahrir yang dinilainya eksklusif.

Sebagai kampung yang heterogen komunitas Islam di Kelurahan Kauman dapat memperlihatkan suasana kerukunan hidup beragama yang baik. Hanya 10% saja responden yang menilainya cukup mengkhawatirkan. Untuk sebagian hal ini disebabkan oleh letak perkampungannya yang berada di jantung Kota Malang. Toleransi yang tinggi diperlihatkan, terutama oleh warga NU dan Muhammadiyah yang menjadi *mainstream* utama di kampung tersebut. Sebagai kelompok yang lebih minoritas, warga Muhammadiyah cukup memiliki toleransi yang tinggi terhadap tradisi keagamaan yang diperlihatkan warga NU, seperti penggunaan pengeras suara yang keras dalam acara-acara pengajian. Menurut penuturan pengurus masjid Muhammadiyah di kampung tersebut, kini banyak anak muda NU, khususnya, yang melakukan ibadah solat di masjid mereka, termasuk solat subuh dan tarawih.

Tabel 2
Penilaian Responden tentang Hubungan
Antarkelompok Umat Islam

Jawaban	Persentase
Cukup mengkhawatirkan	10
Dalam batas wajar	24
Saling pengertian	60
Tidak menjawab	6
Total	100

Meskipun secara umum masing-masingnya memiliki afiliasi politik yang berbeda, mereka juga cukup mampu memperlihatkan suhu politik yang dingin. Suasana yang damai seperti ini ditunjukkan,

misalnya, oleh warga NU pendukung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam menyikapi kemelut politik di tingkat pusat antara PKB dan Partai Amanat Nasional (PAN). Meskipun jumlah pendukung PKB di kampung Kauman jauh lebih besar daripada PAN, konflik politik di tingkat nasional tersebut tidak sampai menimbulkan konflik sosial yang horizontal di dalam masyarakat Kauman. Sebab, dalam pandangan sebagian responden (37%), konflik tersebut dianggapnya tidak dimaksudkan untuk mendeskreditkan pihak lain, tetapi lebih merupakan ekspresi kepentingan politik sekelompok elit dan bukannya kepentingan umat yang lebih besar.

Tabel 3
Penilaian Responden tentang Konflik

Jawaban	Persentase
Adanya kepentingan politik	37
Masih dalam batas kewajaran	39
Mendeskreditkan kelompok lain	16
Tidak menjawab	7
Total	100

Sejak era reformasi sebagian responden (37%) yang dimintai komentarnya menilai memang terdapat peningkatan konflik di kalangan umat Islam dewasa ini. Tetapi, peningkatan ini tak berarti bahwa kerukunan umat beragama di antara mereka memburuk. Hal ini dipandang sebagai konsekuensi dari dinamika sosial yang hidup dalam iklim demokrasi. Sebab, meskipun terdapat peningkatan, seperti tercermin dalam table di atas, dalam pandangan 37% responden konflik tersebut masih berada dalam batas kewajaran. Konflik sosial antar pendukung partai politik yang terjadi dalam pemilu umumnya, misalnya, tak berlangsung lama dan menimbulkan benturan fisik. Umat Islam Kauman cukup menyadari bahwa konflik yang berkepanjangan dapat melemahkan persatuan di kalangan mereka sendiri. Pengajian mingguan dan selamatan merupakan salah satu sarana sosial yang mampu meredam konflik di antara mereka.

Tingkat kerukunan sosial yang semakin membaik, khususnya antarwarga NU dan Muhammadiyah merupakan hal yang sangat penting. Seperti halnya kota-kota di Jawa pada umumnya keduanya juga merupakan *mainstream* utama umat Islam di Kota Malang. Di Kelurahan Kauman bukti warga NU dan Muhammadiyah merupakan kelompok sosial yang lebih sering berkomunikasi satu sama lainnya (masing-masing 35% responden) ketimbang dengan kelompok Islam lainnya. Fenomena ini sekaligus pula memperlihatkan kualitas keterbukaan sikap di antara mereka yang semakin baik. Hanya sebagian kecil responden saja (16%) yang mengaku lebih suka melakukan komunikasi dengan kelompok Islam lainnya, seperti dengan kelompok Al Irsyad yang ada di kelurahan tersebut.

Salah satu sebab utama yang melahirkan keterbukaan sikap di antara sesama umat Islam di Kauman adalah oleh semakin berkurangnya dai (penceramah agama) yang melakukan serangan pada kelompok Islam lainnya. Sebagai pimpinan dan juru bicara umat, dai bisa menjadi faktor pemersatu dan juga faktor pemecah belah umat. Dakwah yang provokatif bisa dengan mudah membangkitkan amarah umat. Tetapi, menurut pengakuan mayoritas responden (68%), dai yang suka memprovokasi umat dan melakukan serangan kepada pihak lainnya menunjukkan penurunan. Hanya kurang dari sepertiga (28%) responden yang masih melihat adanya dai yang suka memprovokasi massa. Gambaran ini memperlihatkan bahwa semakin banyak dai yang memiliki kesadaran yang tinggi tentang realitas pluralisme masyarakat.

Tabel 4
Tentang Dai yang Suka Menyerang Kelompok Lain

Jawaban	Persentase
Sering	2
Pernah	28
Tidak Pernah	68
Tidak menjawab	2
Total	100

Sebagai masyarakat yang beragama, peranan para tokoh agama dalam menciptakan kerukunan hidup beragama menjadi sangat penting. Di mata responden (41%) dai yang mampu memperlihatkan keteladanan diri dipandang sebagai hal yang paling penting. Tokoh agama yang mampu memberikan keteladanan diyakini akan memberikan pengaruh yang besar pada kerukunan antar umat beragama. Menurut mereka contoh keteladanan tersebut antara lain perlu diwujudkan dalam dakwah yang lebih menitikberatkan pada misi kemanusiaan dan cinta kasih dan bukannya pada misi yang menonjolkan fanatisme dan perbedaan agama. Dakwah yang menyejukkan hati umat yang dilengkapi dengan dialog dan pertemuan antarpimpinan umat beragama merupakan faktor penting yang dianggap dapat meredam timbulnya konflik sosial yang tak diinginkan dan sekaligus mempererat jalinan hubungan sosial antar umat beragama.

Kesadaran untuk membangun kerukunan hidup beragama yang semakin baik tersebut diperlihatkan masyarakat Muslim Kauman dengan menjadikan masjid sebagai rumah ibadah untuk semua umat Islam dan bukan untuk sekelompok umat. Beberapa pengurus masjid Muhammadiyah di Kauman mengakui bahwa kini semakin banyak warga NU, terutama kalangan mudanya, yang tak enggan lagi untuk solat tarawih dan subuh berjamaah di masjid mereka. Ada kecenderungan bahwa masing-masing mereka tidak lagi melihat qunut sebagai persoalan prinsip yang menghambat tegaknya solat berjamaah mereka. Hal yang sama juga terjadi dalam solat tarawih. Untuk menggenapkan bilangan rakaat solat tarawihnya, tidak sedikit warga NU yang bersolat di masjid Muhammadiyah melakukannya sepulangnya mereka ke rumah. Sebaliknya tidak sedikit pula warga Muhammadiyah yang solat tarawih di masjid NU yang berhenti pada rakaat kedelapan dan kemudian melanjutkan solat witrnya di rumah atau menunggu sampai imam masjid menggenapkan solat tarawihnya untuk kemudian melakukan solat witr secara bersama-sama.

Di daerah Kauman sikap sosial yang dirasakan agak mengganggu umumnya terjadi dengan warga Al Irsyad yang kebanyakan warga keturunan Arab dari golongan non-Alawiyin. Tidak seperti Muhammadiyah, pimpinan Al Irsyad di daerah tersebut masih belum bisa mentolerir perbedaan penafsiran keagamaan dengan kelompok tersebut, seperti masalah ziarah kubur. Sikap ini ditunjukkan karena menurutnya masalah tersebut bukan merupakan hal yang bersifat khilafiyah atau yang bisa diperdebatkan, melainkan bersifat mendasar yang sudah jelas (*got'i*). Meskipun tak sampai menimbulkan konflik terbuka, salah seorang ulama Al Irsyad yang sempat diwawancarai menilai bahwa banyak praktek keagamaan warga NU dan golongan keturunan Arab Alawiyin yang tinggal di sekitar mereka dikategorikan sebagai sebuah kemusyrikan, seperti masalah ziarah kubur, termasuk ke makam wali-wali.

Walaupun telah terjadi keterbukaan sikap yang semakin baik, umat Islam Kauman menganggap hubungan komunikasi yang lebih baik antarsesama santri perlu ditingkatkan. Hal ini dinyatakan karena dari pernyataan separuh responden (54%) mengaku jarang berhubungan dengan kelompok Islam lainnya. Masalahnya karena selama ini tidak ada upaya signifikan yang dilakukan pimpinan mereka dalam memperkecil perbedaan sebagaimana dinyatakan oleh sekitar separuh responden (49%). Sebagai anggota masyarakat Islam, mereka mengakui kalau mereka juga kurang memperlihatkan inisiatif yang besar untuk menjalin hubungan sosial yang lebih baik dengan kelompok lain guna memperkecil perbedaan di antara mereka. Salah satu sebabnya karena tidak banyak di antara responden (hanya 12%nya saja) yang sering menghadiri pengajian yang diselenggarakan kelompok Islam lainnya. Oleh sebab itu, bisa dipahami bila kadang-kadang mereka memiliki prasangka negatif terhadap kelompok Islam lainnya.

Rendahnya tingkat kesadaran untuk saling berkomunikasi di kalangan kelompok-kelompok umat Islam di daerah Kauman tersebut sebenarnya tidaklah unik. Sebab di tataran elit lokal dan nasional

kesadaran tersebut juga boleh dibidang baru dan belum sepenuhnya baik. Boleh dikatakan baru belakangan ini umat Islam dapat menyaksikan pimpinan mereka duduk dan bekerja sama dalam memecahkan masalah umat. Secara khusus, kesadaran yang lebih tinggi untuk itu lebih berada di kalangan elit aktivis dan pemikir muda NU dan Muhammadiyah. Gagasan Islam liberal yang gencar dikampanyekan pemikir muda NU dan Muhammadiyah pada dasarnya merupakan bagian dari upaya mereka untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya makna pluralisme bagi bangsa Indonesia yang multi etnik, ras, bahasa, dan agama. Tetapi, seperti diketahui dari pemberitaan media massa, gagasan tersebut masih memperoleh resistensi yang cukup besar dari mayoritas masyarakat dan pimpinan agama dari generasi yang lebih tua.

3.5. Potret Politik Umat Islam Kota Malang

Dibandingkan dengan persoalan hubungan agama dan budaya, persoalan hubungan antara agama dan politik merupakan persoalan yang sering menimbulkan ketegangan sosial. Hal ini karena agama yang sejatinya lebih berkenaan dengan masalah moral, sering dimanipulasi oleh berbagai pihak untuk kepentingan politik kelompok tertentu. Pada pemilu 1955, misalnya, kelompok santri mengancam keras umat Islam yang tidak mendukung partai Islam karena dukungan tersebut dinilainya wajib atau sebuah keharusan agama. Pertentangan tentang hal ini, termasuk tentang asas dan bentuk negara, telah membuat terjadinya pembelahan umat Islam atas dasar aliran keagamaan dan afiliasi politik yang dianutnya. Jauh sebelum terbentuknya Negara kesatuan RI telah terjadi perdebatan tentang hal ini, terutama antara Mohammad Natsir dan Sukarno. Di satu pihak, kelompok santri memandang bahwa agama dan politik merupakan sesuatu yang tak bisa dipisahkan karena agama tidak hanya menyangkut soal ritual, tetapi juga mengatur semua aspek kehidupan, termasuk politik. Oleh sebab itu, bagi mereka masalah asas negara merupakan masalah krusial yang tak dapat diingkari oleh setiap umat

Islam. Tetapi, di pihak lain, pandangan ini tak disetujui oleh kelompok abangan. Sebab bagi mereka masalah agama adalah masalah pribadi yang tak sepatutnya diangkat ke dunia publik dalam bentuk yang formal.

Perdebatan tentang asas negara tersebut bukan saja telah menyita energi umat Islam, melainkan juga telah menimbulkan banyak korban, khususnya di kalangan santri. Sebab, hasil pemilu pertama 1955 memperlihatkan bahwa secara statistik kelompok santri tak mampu mendominasi suara karena mereka hanya mampu memperoleh 43,5% suara. Ketidakmampuan yang sama juga diperlihatkan kelompok santri di Kota Malang. Bila di tingkat nasional, PNI mendominasi perolehan suara, di Kota Malang dominasi tersebut diperlihatkan oleh PKI dengan 12 kursi, jauh di atas NU dan Masyumi yang masing-masingnya hanya memperoleh 7 dan 2 kursi. Sementara itu, PNI memperoleh 4 kursi (Arsip Kota Malang) (lihat tabel 1 di atas).

Meskipun Kota Malang berbatasan langsung dengan wilayah tapal kuda yang menjadi basis utama kelompok santri, pengaruh santri di kota ini tampak tak cukup kuat. Kuatnya tradisionalisme Jawa di kota ini untuk sebagian karena secara historis Kota Malang dan sekitarnya merupakan bagian dari wilayah kerajaan Singasari dan Majapahit yang lebih sedikit mengalami proses Islamisasi. Hal ini berbeda dengan kota-kota di pesisir Timur Jawa, seperti Gersik, Sidoarjo, Pasuruan dan Probolinggo yang didominasi oleh kelompok santri.

Kemenangan kelompok partai politik non-Islam di Kota Malang terus berlanjut dalam setiap pemilu yang diselenggarakan oleh rezim Orde Baru. Seperti di banyak kota lainnya, dalam pemilu Orde Baru Golkar selalu menguasai perolehan kursi sekitar dua kali lipat dari perolehan partai Islam PPP. Kecuali pada pemilu terakhir Orde Baru 1997 saja yang memperlihatkan kenaikan perolehan kursi PPP (menjadi 15 kursi) yang signifikan karena hanya berselisih 4

kursi dari Golkar (19 kursi). Meskipun demikian, hasil tersebut tak dapat dikatakan sebagai penurunan kekuatan politik Golkar karena hasil perolehan suara Golkar pada pemilu 1977 justru sedikit lebih besar daripada pemilu sebelumnya. Naiknya perolehan kursi PPP lebih merupakan akibat dari ekspresi kekecewaan sesaat dari pendukung PDI. Terjadinya pelimpahan suara ke PPP dapat dikatakan karena massa PDI tak memiliki pilihan saluran politik lain, kecuali ke PPP. Oleh sebab itu, kenaikan perolehan suara PPP tak dapat disimpulkan sebagai peningkatan politik Islam.

Tabel 5
Hasil Pemilu Kota Malang
Tahun 1971, 1987, 1992, dan 1997

Nama Partai	1971 (kursi)	1987 (kursi)	1992 (kursi)	1997 (kursi)
Golkar	18	23	17	19
PPP	9	6	8	15
PDI	4	7	11	2

Sumber: Arsip Pemerintah Kota Malang

Sejak era reformasi gambaran peta kekuatan politik di Kota Malang tetap dikuasai oleh partai politik non-Islam. Dalam dua pemilu yang demokratis, 1999 dan 2004, secara umum kekuatan politik Islam di Kota Malang mengalami penurunan yang signifikan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang merupakan pengejawantahan utama PNI secara berturut-turut memenangi pemilu 1999 dan 2004. Seperti tampak pada tabel di bawah pada pemilu 1999 yang demokratis PDIP memperoleh 41,2% suara dan 11 kursi pada pemilu 2004. Sementara itu, posisi kedua ditempati oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang pendiriannya disponsori oleh NU dengan perolehan suara 19,2% pada pemilu 1999 dan 8 kursi pada pemilu 2004. Sebagai partai yang disponsori oleh Muhammadiyah, Partai Amanat Nasional (PAN) hanya menduduki peringkat ke empat pada pemilu 1999 (10,8%) dan kemudian turun ke posisi ke lima pada pemilu 2004 dengan 5 kursi.

Partai non-Islam lainnya, yakni Partai Golkar menempati posisi ke tiga pada pemilu 1999 (14,8%) dan posisi ke empat pada pemilu 2004 (5 kursi). Pada pemilu 2004 posisi ke tiga diduduki oleh Partai Demokrat (7 kursi). Sementara itu, sejak pemilu demokratis 1999 tak satu partai Islam pun di Kota Malang yang berhasil masuk ke dalam empat partai terbesar. Bila pada pemilu 1999 ketiga partai Islam, yakni PPP, PKS, dan PBB, masing-masing memperoleh 1 suara, pada pemilu 2004 hanya PKS yang mengalami peningkatan perolehan suara yang berarti karena partai tersebut berhasil memperoleh 5 kursi, sampai dengan PAN.

Meskipun pada pemilu 2004 PKS mengalami peningkatan suara yang signifikan, fenomena tersebut kiranya tak dapat dimaknai sebagai telah terjadinya peningkatan kekuatan politik partai Islam. Fenomena tersebut lebih menggambarkan terjadinya perpindahan suara, terutama dari partai yang pendiriannya disponsori oleh dua organisasi Islam terbesar, yakni PKB dan PAN, ke PKS. Bila dilihat lebih dalam, secara keseluruhan partai Islam dan partai yang ditengarai sebagai partai Islam dalam bentuk lain mengalami penurunan kekuatan politik yang signifikan karena pada pemilu 2004 PKB mengalami penurunan suara lebih dari 50% dan PAN lebih dari 30%. Dalam pemilu 2004 tampak sebagian suara partai Islam berpindah ke partai nasionalis, terutama ke partai baru, partai Demokrat yang secara fantastis berhasil memperoleh 7 kursi.

Tabel 6
Hasil Pemilu Legislatif 10 Partai Terbesar
Tahun 1999 dan 2004 Kota Malang

Nama Partai	1999 (%)	2004 (kursi)
PDIP	41,2	11
PKB	19,2	8
Partai GOLKAR	14,8	5
PAN	10,8	5
PPP	1	1
PKS	1	5
PKP	1	
PBB	1	
Partai Demokrat		7
PDS		2

Sumber: Arsip Pemerintah Kota Malang

Mengamati peta politik tersebut kiranya peta politik umat Islam tak dapat lagi dibedakan atas kekuatan politik santri dan abangan. Sebab, setidaknya sejak diberlakukannya asas tunggal 1984 mayoritas umat Islam tak lagi terjebak dalam perdebatan ideologi agama dalam politik. Rendahnya perolehan suara partai Islam yang diperlihatkan pada pemilu 1999 dan 2004 menunjukkan bahwa keislaman sebuah partai tak lagi ditentukan oleh bentuk asas kepartaiannya. Dua organisasi Islam terbesar, yakni NU dan Muhammadiyah, secara konsisten juga telah mengakui Pancasila sebagai bentuk final negara Indonesia. Bahkan, ketika sejumlah organisasi massa dan partai politik Islam melakukan gerakan politik untuk menghidupkan kembali Piagam Jakarta, gerakan politik tersebut juga memperoleh tentangan dari kedua organisasi Islam terbesar NU dan Muhammadiyah. Perubahan sikap politik kedua organisasi Islam terbesar itu secara jelas tercermin dari dukungan moralnya terhadap pendirian partai terbuka, yang tidak berasaskan Islam, yakni PKB dan PAN.

Terjadinya perubahan politik umat Islam dewasa ini memiliki latar belakang sosiologisnya sendiri. Untuk sebagian, ini merupakan hasil politik belah bambunya Soeharto yang di awal pemerintahannya ia berhasil merangkul sebagian elit politik Islam, terutama elit politik Masyumi ke dalam Golkar melalui kebijakan *to discredit or to co-opt*. Kegagalan pimpinan partai politik Masyumi untuk merehabilitasi partainya dan ketidakbolehan elit politik Masyumi untuk memimpin partai bentukan Suharto, Parmusi, telah membuat sebagian bekas pimpinan dan kader Masyumi masuk ke dalam partai politik bentukan Orde Baru, yakni Golkar.

Menanggapi kebijakan pamarjinalan politik terhadap tokoh-tokoh politik Islam yang dilakukan rezim Orde Baru telah mendorong para pemikir muda Islam yang dimotori oleh Nurcholish Madjid untuk melakukan gerakan desakralisasi politik Islam. Para pemikir muda Islam tersebut melihat bahwa keterlibatan agama dalam politik selama ini bukan saja telah memperlemah kekuatan politik umat Islam itu sendiri, melainkan juga telah mematikan karier dan usaha potensial umat Islam. Dengan gerakan politik kultural yang berusaha mendudukkan agama sebagai sumber moral bagi kehidupan berbangsa dan juga bernegara, mereka berharap bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara yang Islami dapat pula diwujudkan tanpa perlu meng-Islamkan ideologi negara.

Meskipun secara statistik sulit untuk diukur, setidaknya sejak awal 1990-an telah terjadi Islamisasi partai politik yang sebelumnya dianggap sebagai partai abangan. Diawali dengan kelahiran Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada tahun 1990, hasil pemilu 1992 memperlihatkan banyaknya tokoh politik Islam yang menduduki jabatan strategis di tingkat legislatif dan eksekutif. Persebaran yang semakin meluas dari tokoh-tokoh Islam ke berbagai partai politik yang ada semakin tampak sejak era reformasi 1999. Sulit untuk dielakkan hal tersebut memperoleh legitimasinya yang sangat kuat atas dukungan dua organisasi Islam terbesar NU dan

Muhammadiyah terhadap pendirian partai yang tak berasaskan Islam, yakni PKB dan PAN.

Semakin meluasnya polarisasi politik umat Islam juga tampak di Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Sebagai sebuah kampung yang terletak di tengah kota, sejak era reformasi penduduk Kauman tampak memiliki tingkat kesadaran politik yang cukup tinggi. Terdapat sembilan partai politik yang memiliki cabangnya di tingkat kelurahan⁷. Gambaran ini setidaknya memperlihatkan terpolarisasinya politik penduduk Kauman, khususnya penduduk Muslimnya. Hal ini tercermin dari pendapat mereka tentang konsep politik. Meskipun mayoritas responden (68%) meyakini bahwa Islam memiliki konsep politik, konsep politik tersebut tidak dengan sendirinya perlu direalisasikan dalam bentuk negara Islam. Mayoritas mereka (68% responden) justru tak setuju dengan bentuk negara Islam. Salah satu alasan utama yang diberikan mayoritas responden (43%) adalah karena dalam negara Pancasila Islam dipandang telah memperoleh porsi yang wajar. Pandangan ini dapat dipahami karena hampir semua kebutuhan umat Islam, seperti masalah warisan, perkawinan, dan bahkan bank Islam, telah memperoleh tempat yang sewajarnya.

Tabel 7
Pandangan Responden tentang Keharusan
Pendirian Negara Islam

Jawaban	Persentase
Tidak	68
ya	12
Tidak tahu	17
Tidak menjawab	3
Total	100

⁷ kesembilan partai politik tersebut adalah PDIP, PKB, Partai Golkar, PPP, PAN, PKS, Partai Demokrat, PBB, dan PDS.

Selain menolak pendirian negara Islam, lebih dari dua perlima responden (43% responden) juga kurang setuju dengan kehadiran partai yang berasaskan agama. Hanya sepertinya saja (33% responden) yang menyatakan persetujuannya. Kenyataan ini bisa jadi disebabkan oleh penampilan partai Islam selama ini yang kurang menunjukkan perilaku politik yang baik atau Islami. Sulit untuk dielakkan bahwa konflik politik yang terjadi antara Gus Dur dan Amin Rais, terutama saat pelengseran Gus Dur dari kursi kepresidenannya sedikit banyaknya telah menodai citra politik Islam. Meskipun kedua tokoh tersebut tak berasal dari partai Islam, sulit bagi keduanya untuk diidentikkan sebagai tokoh politik Islam.

Tabel 8
Pandangan Responden tentang Kehadiran Partai Agama

Jawaban	Persentase
Ya	33
Tidak	43
Tidak tahu	17
Tidak menjawab	7
Total	100

Berbeda dengan gambaran sosial politik umat Islam tahun 1950-an yang amat dipengaruhi oleh faktor ideologis, sejak era reformasi pilihan politik umat Islam umumnya lebih dipengaruhi oleh faktor ketokohan pimpinan partai politiknya daripada ideologinya. Dukungan besar pada PDIP dalam pemilu 1999 kiranya tak bisa dilepaskan dari ketokohan Megawati. Demikian pula dengan Gus Dur dan PKB-nya serta Amin Rais dan PAN-nya. Hal yang sama juga terlihat dari kemenangan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla dalam pemilihan presiden langsung 2004.

Dalam pemilihan presiden langsung 2004 mayoritas umat Islam keluarahan Kauman, Malang, tak mendukung pasangan yang salah satunya berasal dari organisasi Islam terbesar. Meskipun di kelurahan ini PDIP dan PKB mendominasi perolehan suara pada

pemilu legislatif 2004, dalam pemilihan presiden langsung putaran ke-2 pasangan Megawati Sukarnoputri dan Hasyim Muzadi mengalami kekalahan yang cukup besar karena hanya mampu memperoleh 42,07% suara.

Bagi mayoritas responden di Kauman (60%) program sebuah partai dipandang sangat pilihan politiknya ketimbang pertimbangan ideologi partai. Sebuah partai yang memiliki visi dan misi yang lebih bagus dipandang lebih layak untuk memperoleh dukungan ketimbang partai Islam yang tak memiliki kejelasan konsep tentang visi dan misinya. Pendapat ini tampaknya didasarkan atas pengamatan mereka yang melihat banyaknya partai Islam yang hanya menjual simbol-simbol agama untuk sekadar meraih fanatisme umat Islam ketimbang menjual gagasan dan program kerjanya. Ketidakjelasan konsep tersebut juga terjadi pada konsep negara Islam yang diusungnya. Sejak digulirkannya gagasan negara Islam pada tahun 1950-an, banyak umat Islam yang tidak memahami konsep negara Islam yang dimaksudkan partai-partai pendukung negara Islam. Kebanyakan umat Islam umumnya hanya memahami negara Islam sebagai negara yang memberlakukan hukum rajam bagi pezina dan hukum potong tangan bagi pencuri, seperti yang sebagiannya telah diterapkan di Nangroe Aceh Darussalam.

Lebih dari itu, bagi penduduk Kauman seorang presiden juga tidak mutlak harus Muslim. Sekitar seperempat responden (24%) menyatakan bahwa presiden bisa saja dijabat oleh orang yang beragama lain. Tetapi, pemikiran yang sejalan dengan Gus Dur tersebut tidak dengan sendirinya berarti bahwa mereka akan cenderung memilih presiden non-Muslim. Pendapat tersebut lebih memperlihatkan tingkat kedewasaan demokrasi politik umat Islam Kauman yang cukup maju karena sebuah sistem demokrasi yang baik idealnya dapat memberikan kesempatan politik yang sama pada setiap orang. Sebagai identitas sosial yang sangat penting, bisa dipastikan bahwa mayoritas umat Islam akan lebih memilih presiden non-Muslim ketimbang yang Muslim.

Erat kaitannya dengan pendapat tersebut di atas, dalam pandangan masyarakat Islam Kauman kegagalan era reformasi sekarang ini tidak dengan sendirinya perlu dicarikan pemecahannya dengan cara menerapkan hukum Islam. Kegagalan tersebut dinilai responden karena pemerintah tak mampu menerapkan hukum yang ada. Persoalan mafia peradilan, buruknya sistem hukum sejak berada di tingkat legislasi, dan kegagalan pemberantasan korupsi yang sering diberitakan media massa televisi, khususnya, telah memberikan kesadaran yang tinggi pada umat Islam Kauman bahwa persoalan kegagalan reformasi tak berkenaan dengan ada tidaknya hukum Islam, tetapi lebih berkenaan dengan masalah kegagalan penegakan hukum yang berkeadilan. Kesimpulan ini tercermin dari pendapat tiga perempat responden (75%) yang meyakini bahwa perwujudan cita-cita reformasi akan dapat berhasil dengan baik bila implementasi hukum yang ada dapat ditegakkan dengan baik.

Dengan pemikiran tersebut di atas, bisa dipahami bila partai-partai Islam tak memperoleh dukungan yang berarti. Di Kauman tak ada satu partai Islam pun yang masuk ke peringkat lima besar. Meskipun demikian, sebagai basis utama NU, hasil pemilu legislatif 2004 menunjukkan bahwa di Kelurahan Kauman PKB masih menempati peringkat pertama dengan 1357 (24,45%) suara, disusul oleh PDIP dengan 954 (17,19%) suara, PAN dengan 792 (14,27%) suara, Partai Demokrat 642 (11,57%) suara, Golkar dengan 531 (9,57%) suara. Partai Islam PKS hanya menduduki peringkat ke enam dengan 440 (7,93%) suara.

Tabel 9
Hasil Pemilu 2004 Kelurahan Kauman, Klojen, Kota Malang

Nama Partai Politik	DPRD Kota Malang	DPRD Provinsi	DPR
PKB	1357	1340	1354
PDIP	954	989	1027
PAN	792	810	789
Partai Demokrat	642	689	693
Partai Golkar	531	575	533
PKS	440	488	441
PBB	186	128	142
PDS	261	122	299
PPP	83	91	86
Lainnya	304	260	135
Jumlah Pemilih	5550	5492	5499

Sumber: Arsip Kelurahan Kauman

Melihat hasil perolehan suara tersebut, kiranya dapat dikatakan bahwa hasil pemilu 1999 dan 2004 di Kelurahan Kauman menunjukkan bahwa masalah politik aliran tak lagi relevan untuk didiskusikan. Hal yang sama juga tampak di tingkat Kota Malang yang dimenangkan secara berturut-turut oleh PDIP dan PKB. Meskipun kelahiran PKB dan PAN terutama disponsori oleh dua organisasi Islam terbesar, NU dan Muhammadiyah, sulit untuk dikatakan bahwa dukungan yang masih cukup besar pada kedua partai tersebut berkaitan erat dengan ideologi ke-Islamannya. Demikian pula dengan PDIP yang tak dapat dilepaskan dari ketokohan Megawati Sukarnoputri dan bukan ideologi yang diusungnya.

Untuk satu hal, hilangnya signifikansi politik aliran bersumber dari perubahan pemikiran politik umat Islam, terutama sejak digulirkannya pembaruan pemikiran Islam oleh sekelompok aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Sejak awal tahun 1970-an pemikiran Nurcholish Majid (Cak Nur) dan kawan-kawan telah memperoleh pengaruhnya yang cukup besar dalam umat Islam

Indonesia. Melalui jargon politiknya, “Islam, Yes, Partai Islam, No”, ia bukan saja berhasil memisahkan masalah agama dan politik, tetapi juga berhasil memberikan dorongan psikologis pada kelompok Muslim nominal untuk mengalami proses Islamisasi. Melalui pengajian Paramadinyanya, Nucholish sendiri cukup berhasil dalam melakukan proses Islamisasi abangan.

Kebijakan depolitisasi partai Islam yang dilakukan pemerintah dengan pendekatan keamanannya telah mempercepat proses santrinisasi priyayi/abangan. Banyak aktivis politik kampus dari kelompok abangan yang mengalihkan strategi perjuangannya melalui pendekatan Islam kultural. Melalui pendekatan tersebut, partai politik Islam tak lagi menjadi pilihan utama. Kendala ideologis keagamaan pun mencair. Sebagai penduduk yang paling dominan, bukan saja mayoritas pendukung partai besar adalah Muslim, melainkan juga pimpinan utamanya. Sejak Sukarno, pimpinan partai nasionalis PDIP (dulunya PNI) selalu Muslim. Demikian juga partai Golkar.

Meskipun pengertian politik aliran dewasa ini tak lagi relevan, secara intrinsik ideologi politik umat Islam dapat dibedakan ke dalam tiga kelompok. Kelompok pertama, yakni kelompok partai berasaskan Islam seperti PKS, adalah kelompok yang masih memiliki misi untuk meng-Islamkan Pancasila dan perundang-undangannya. Kelompok kedua adalah kelompok yang berusaha untuk menjadikan Islam sebagai salah satu sumber utama dalam kehidupan sosial dan bernegara. Kelompok ini terutama diperlihatkan oleh PKB dan PAN. Adapun yang terakhir adalah kelompok yang memandang semua sumber yang ada, agama, adat, dan budaya, sebagai sumber kehidupan sosial dan bernegara. Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah partai Golkar, Demokrat, dan PDIP.

Daftar Pustaka

Abercrombe, Nicholas, et.ak. 1984. *Dictionary of Sociology*. Australia: Allen Lane.

Pemerintah Daerah Kota Malang, “Arsip Kota Malang”.

Badan Pusat Statistik Kota Malang. 2004. *Kota Malang dalam Angka 2003*.

Badan Pusat Statistik Kota Malang. 2005. *Kota Malang dalam Angka 2004*.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Kota Malang. 2004. *Basis Data 2003*.

Detikcom, 30 Agustus 2005

http://id.wikipedia.org/wiki/Malang_kota. Malang.

Koran Tempo, 3 Januari 2002.

Mas’ud, Abdurrahman. 2004. “Mengiyaikan Muhammadiyah dan Mendoktorkan NU,” dalam *Muhammadiyah–NU: Mendayung Ukhuwah di Tengah Perbedaan*. Malang: UMM Press

Mu’ti, Abdul. 2004. “Kerjasama Muhammadiyah - NU”, dalam *Muhammadiyah – NU: Mendayung Ukhuwah di Tengah Perbedaan*. Malang: UMM Press.

Pemda Kota Malang. 1998. *Kota Malang: Media dan Investasi*.

Bab III – Studi Kasus Kota Malang

BAB IV

STUDI KASUS DI MAKASSAR

Oleh Endang Turmudi

4.1. Pendahuluan

Sebagai kota besar, Makassar adalah *melting pot*, di mana di dalamnya tinggal berbagai macam suku bangsa, baik dari mereka yang berasal dari Sulawesi maupun dari bagian lain Indonesia. Masyarakat pendatang dan asli telah bercampur hidup bergandengan. Mereka bekerja di berbagai kantor baik pemerintahan maupun swasta yang ada di sana. Modernisasi dan pembangunan yang dilakukan di wilayah ini telah menjadikannya sebagai *pengawal* pertumbuhan seluruh kota-kota di jajaran Indonesia Timur. Sebagai *melting pot*, Makassar juga menjadi metropolis, karena pluralitas masyarakatnya telah memungkinkannya menciptakan kreasi-kreasi baru dan mendorong perkembangan ke arah yang lebih maju.

Makassar sekarang ini telah menampilkan diri sebagai bagian dari kota dunia dengan berbagai tampilan budaya dan kehidupan dunia pada umumnya. Meskipun bersuasana metropolis, watak religius yang menandai masyarakat Makassar tetap hidup dan bahkan terus berkembang. Simbol-simbol dan budaya Islam tetap dipelihara, dan normanya menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di sana. Pendidikan yang berbau Islam juga berkembang bahkan sampai ke bentuk Perguruan Tinggi. Bahkan perguruan yang berbau Islam ini pun tersedia untuk kalangan menengah ke atas dengan memberikan layanan kualitas yang bagus.

Sebagai *melting pot*, Makassar dihuni oleh beragam suku yang ada di Indonesia. Di samping ada suku-suku lokal yang mendiami kota dan wilayah Sulawesi Selatan sejak lama, di sana terdapat juga suku pendatang dari bagian lain wilayah Indonesia.

Dari beraneka ragam suku yang ada, suku Bugis adalah yang terbesar dari sisi jumlahnya. Untuk seluruh Sulawesi Selatan, jumlah mereka sekitar 3,5 juta, sedangkan suku Makassar sendiri sekitar 1,5 juta, disusul oleh suku Mandar ½ juta dan Toraja sekitar 1/3 juta jiwa. Selain itu ada beberapa suku kecil, seperti Wana, Mori, Kaili, Tajo, pandau, Lauje dan Kahumanoan.

Selain itu, masyarakat Makassar juga cukup heterogen dari sisi agama. Menurut sumber yang ada, dari jumlah penduduknya sebesar 1.178.327 jiwa, pemeluk Islamnya sekitar 1.022.180 jiwa (86,75%), Kristen 79.022 (6,71%), Katolik 43.826 (3,72%), Hindu 4600 (0,39%) dan Budha 28.699 (2,43%). Satu-satunya daerah di mana penduduk Islam sebagai minoritas adalah Kabupaten Tana Toraja, dimana pemeluk Islam hanya sekitar 33.661 jiwa (6,48%), sedangkan Kristen 364.526 jiwa (70,17%), Katolik 78.305 jiwa (14,07%) dan Hindu 43.024 (8,28%).

4.2. Politik Lokal

Sesuai dengan keadaannya sebagai kota dengan penduduk Islam terbanyak, Makassar memang terasa sebagai kota Muslim. Hal ini bisa dilihat dan terasa dari kehidupan sehari-hari penduduknya. Dari sekian suku yang ada di sana, Suku Makassar adalah yang sangat lekat dengan Islam, sehingga budaya dan kehidupan lainnya sangat religius Islami. Hal ini memang tidak mengherankan mengingat Islam telah dipeluk masyarakat Makassar ini sejak lama, dan kemudian secara turun temurun diwariskan kepada anak cucu mereka, sehingga wajah Makassar sekarang sangat Islami. Menurut cerita, Islam telah masuk Makassar sejak 500 tahun yang lalu melalui berislamnya Sultan Alaudin pada 22 September 1605/9 Djumad al-awal 1014 H. Pada versi yang lain, ada yang menyebutkan, bahwa agama Islam sampai di Sulawesi Selatan, terhitung sejak berkuasanya Raja Gowa X Tunipallangga (1546-1565).

Pengaruh dari perkembangan Islam di Makassar ini bisa dilihat dari apa yang terjadi setelah Indonesia Merdeka. Apa yang pasti adalah bahwa Islam juga telah masuk ke dalam dunia politik di mana Islam dikaitkan dan berusaha dijadikan sebagai sumber politik dan kehidupan lain pada umumnya. Seperti terlihat dari tuntutan penerapan syari'at Islam oleh Abdul Kahar Muzakkar (1950-1965), pengaruh Islam di zaman modern sekarang bisa dilihat dari didirikannya Komite Persiapan Penerapan Syari'at Islam (KPPSI). Organisasi yang disebut terakhir itu sangat populer di kalangan masyarakat Makassar dan Sulawesi Selatan pada umumnya. KPPSI bahkan telah menjadi kendaraan politik yang memberikan atau memfasilitasi masyarakat untuk merealisasikan keinginannya untuk menjadikan Islam sebagai sumber kehidupan mereka.

Kalau boleh dijadikan ukuran, keterikatan masyarakat Makassar dan Sulawesi Selatan pada umumnya kepada Islam bisa dilihat dari bagaimana mereka berkiprah dalam berpolitik. Di tahun 1950 an misalnya, partai yang mendominasi wajah politik di sini adalah Islam. Kalau di wilayah Jawa ada 4 partai besar yang mendominasi politik Indonesia, di Sulsel hanya dua partai Islam saja, yakni Masjumi dan NU. Dua partai lainnya, PNI dan PKI, tidak mendapatkan dukungan yang memadai. Menurut data yang ada, perolehan Masjumi dan NU pada pemilu 1955 jauh mengalahkan partai-partai lainnya. Dalam pemilu saat itu, Masyumi, NU, Perti dan PSI, sebagai partai Islam, masing-masing memperoleh 41,8%, 14,9%, dan 10,8% (PERTI dan PSI). Kalau digabung, perolehan partai Islam tersebut adalah 65,8%, mengalahkan partai nasionalis PNI dan PKI (masing-masing 4,5 dan 4,3), yang pada level nasional keduanya masing-masing memperoleh lebih dari 22 dan 16%.

Kekuatan politik Islam di Sulsel pada umumnya ini agak bergeser atau berubah dibandingkan dengan apa yang terjadi sekarang. Perubahan ini sehubungan dengan perubahan pada tingkat nasional. Terutama setelah Orde Baru berkuasa, perubahan ini memang terasa direkayasa oleh penguasa yang ada, dengan

menggunakan cara-cara yang tidak demokratis dan dalam beberapa hal terasa intimidatif. Perasaan terancam dari masyarakat Islam di Sulsel telah menyebabkan mereka berubah dari kebiasaan memegang teguh atau mendukung politik Islam menjadi berorientasi politik praktis.

Perubahan ini berkaitan dengan rekayasa Orde Baru mulai dari penyederhanaan dan merger keempat partai Islam yang ada, ditambah dengan kebijakan '*floating mass*' yang berusaha memotong keterkaitan partai dengan massa di bawah. Politik Islam yang saat itu mendapat dukungan kuat dari masyarakat diputus dengan cara mengambangkan masyarakat dari politik. Tidak boleh lagi kepengurusan partai politik ada di tingkat bawah, yang berarti tidak boleh lagi masyarakat terlibat dalam politik. Masyarakat dengan kebijakan Orde Baru ini menjadi buta politik dan karenanya juga emosi keterikatannya dengan partai dan politik Islam tercabut, sehingga dengan demikian mereka mudah diarahkan kepada partai lain yang dipersiapkan pemerintah, dalam hal ini Golkar. Tetapi perlu dicatat bahwa apa yang sangat menentukan dalam hal beralihnya dukungan masyarakat Makassar dan Sulsel dari partai Islam ke partai lain adalah intimidasi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang pendukung pemerintah Orde Baru. Begitulah di tahun 1977, PPP tidak mempunyai arti penting dalam perolehannya, karena suara masyarakat Sulsel banyak diberikan kepada Golkar.

Selain itu, apa yang cukup berpengaruh terhadap perubahan ini adalah tampilnya para tokoh Sulsel dalam barisan elit Golkar. Habibie adalah salah satu faktornya, dan kemudian Yusuf Kalla, yang keduanya menjadi orang penting dalam Golkar dan pemerintahan Indonesia. Penampilan kedua tokoh ini memang disengaja sebagai *vote getter*. Ini adalah penampilan yang cerdas mengingat masyarakat Sulsel pada umumnya masih juga menganut budaya paternalistik, sehingga komplitalah perpindahan politik mereka ini, karena disamping ada unsur paksaan di sana juga terdapat legitimasi budaya.

Meski demikian, memang perlu dicatat bahwa pergeseran orientasi politik nampaknya bukan berarti pergeseran semangat Islam yang memang sudah lama melekat dalam budaya dan adat istiadat mereka. Yang terjadi kemudian adalah meng'Islam'kan Golkar. Parpol penguasa ini, mulai dari kepengurusannya sampai wakil-wakil yang dipilih menjadi anggota DPR atau DPRD I dan II, diisi oleh para pemuka Islam setempat. Orang-orang terpelajar Muslim yang menjadi pengurus dan anggota legislatif mewakili Golkar itu adalah orang-orang yang memiliki komimen tinggi pada Islam.

Golkar akhirnya menjadi partainya orang Makassar setelah ternyata ia selama Orde Baru didukung oleh masyarakat di sana. Memang kemudian menjadi pertanyaan apakah dukungan masyarakat Makassar terhadap Golkar menjadi dukungan sungguh, tidak lagi keterpaksaan. Sekedar gambaran, pada Pemilu tahun 1971, Golkar langsung mendapat rangking teratas dengan meraih suara 78,36%. Pada Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992 dan 2004, Golkar memperoleh antara 65%-80%. Mungkin tidak salah penilaian orang bahwa kemenangan Golkar, sebagaimana analisa pengamat setempat, adalah karena faktor intimidasi dan pemaksaan. Akan tetapi adalah fakta bahwa dalam pemilu 1999 dan 2004 yang dianggap demokratis, Golkar di Makassar dan Sulsel pada umumnya tetap saja unggul.

4.3. Memudarnya Primordialisme Islam

Kalau kita melihat situasi politik di tahun 1950an, primordialisme Islam, dan bahkan primordialisme kelompok agak bisa mudah dilihat dan begitu terasa dalam kehidupan politik masyarakat. Aliranisme yang berhasil dipotret Geertz telah memberikan gambaran bahwa orientasi politik seseorang sangat dipengaruhi oleh pola orientasi ideologisnya, sehingga batas-batasnya sangat kentara dan begitu aplikabel. Kalangan Islam santri biasanya hanya mendukung partai-partai Islam, sementara yang kurang santri biasa mendukung partai nasionalis atau bahkan sekuler.

Meski adanya berbagai perubahan, pola seperti ini hampir terus bertahan untuk beberapa waktu, setidaknya untuk para pendukung partai Islam tertentu. Pada pemilu 1971, misalnya, para pendukung NU tetap bertahan dan bahkan hasil pemilu partai ini bertambah meskipun tekanan politik begitu kuat dan intimidasi terhadap para pendukungnya begitu dirasakan. Kenapa para pendukung partai lainnya melorot tajam yang berarti menunjukkan perubahan orientasi ideologis mereka, yang berarti juga berubahnya pola primordialisme adalah karena situasi politik telah menyebabkan perubahan besar dalam panggung politik Indonesia. Perubahan ini dimulai dengan dilarangnya partai Masjumi setelah para pimpinannya dianggap ikut terlibat dalam pemberontakan PERMESTA. Selain itu, apa yang paling penting dari peristiwa politik yang mendahului perubahan ini adalah dibubarkannya Partai Komunis Indonesia, setelah mereka melakukan pemberontakan melawan pemerintah Indonesia yang sah (G30S PKI).

Faktor lain yang signifikan bagi perubahan ini adalah regulasi pemerintah melalui berbagai kebijakan 'political engineering' nya. Setelah sepuluh partai politik dimerger (dilebur) menjadi dua partai saja, yakni menjadi Partai Persatuan Pembangunan untuk partai-partai Islam dan Partai Demokrasi Indonesia untuk partai non-Islam dan nasionalis, pemerintah juga melakukan depolitisasi massa melalui kebijakan massa mengambang, suatu kebijakan yang memotong pengaruh partai terhadap masyarakat pendukungnya di bawah. Politik ini pada akhirnya telah memunculkan massa atau masyarakat yang tidak lagi mempunyai fanatisme ideologis, sehingga mereka memilih partai dalam pemilu tidak lagi didasarkan pada orientasi lama mereka tetapi lebih didasarkan pada keperluan praktis, di samping karena adanya intimidasi. Dengan situasi politik seperti itu, partai Islam PPP pada pemilu 1977 hanya berhasil meraih 29 persen suara, sementara partai nasionalis (PDI) meraih lebih kecil suara.

Dengan tanpa mengecilkan adanya semangat Islamisme pada sebagian masyarakat di beberapa kota, seperti Aceh dan Sumbar,

partai Islam tidak mengalami kenaikan yang berarti atau bahkan terus menurun. Panji-panji Islam tidak lagi menjadi kebanggaan sebagai media perjuangan politik kecuali bagi sebagian kecil masyarakat. Lebih-lebih setelah pemerintah begitu kuat berusaha menghancurkan politik Islam ini dengan melalui berbagai policy yang dikeluarkannya, termasuk misalnya pelarangan menggunakan simbol agama dalam politik.

Di Makassar, perubahan ini kelihatannya telah lama terjadi, bahkan di saat masyarakat di kota lain, terutama Aceh, masih begitu kuat berorientasi politik Islam. Sejak pemilu 1977, partai Islam, PPP, tidak sanggup melebihi perolehan Golkar, padahal masyarakat di sini hampir sama dengan masyarakat Aceh dari sisi semangat keislaman mereka (setidaknya dari anggapan banyak orang). Bisa jadi masyarakat di sini sebenarnya hampir sama dengan masyarakat Indonesia kebanyakan yang dalam beberapa hal cukup pragmatis dalam melaksanakan politik mereka. Karena itu, seperti diungkap oleh seorang pengamat, situasi kepartaian di Makassar hampir sama dengan di Jawa. Golkar di sini mengungguli partai lainnya baik di jaman Orde Baru maupun jaman reformasi sekarang ini. Di zaman Orde Baru, PPP tidak bisa menyaingi Golkar, meski partai ini didukung oleh sebagian ulama. Tetapi yang penting, “PPP memang dianggap bukan mewakili umat Islam secara keseluruhan, mengingat sebagian lagi umat Islam telah berada dan mendukung Golkar sejak lama dan terus berlanjut sampai sekarang”.

Tabel 10
Hasil Pemilu Tahun 1955

NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
Masyumi	41,8
Nahdlatul Ulama	14,9
PSSI & PERTI	10,5
PNI	4,3
Partai Kristen	13,0
PKI	4,5
Partai-partai Lain	21,7

Sumber: *Profil Provinsi R.I.: Sulawesi Selatan, 1992*

Tabel 11
Perbandingan Hasil Pemilihan Umum 1955
di Wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara

Partai Politik	Persentase Jumlah Pemilih	
	Suara Sulsel & Tenggara	Suara Seluruh Indonesia
Masyumi	41,8	20,9
Nahdlatul Ulama	14,9	18,4
PSSI & PERTI	10,6	4,2
PNI	4,2	22,3
Partai Kristen	12,0	4,7
PKI	4,5	16,3
Parta-Partai Lain	21,7	13,1
Total	100	100

Sumber: *Profil Provinsi RI: Sulawesi selatan, 1992, hal. 122*

Dari Tabel 1 di atas kelihatan bahwa partai Islam di Sulsel pada pemilu 1955 sangat dominan. PNI dan PKI yang merupakan partai nasionalis dengan suara cukup besar pada tingkat nasional ternyata masing-masing hanya mendapatkan 4 persen lebih. Meskipun Partai Kristen dan gabungan partai lainnya memperoleh hampir 34 persen, hal itu masih jauh dibandingkan dengan perolehan

partai Islam secara keseluruhan yang jumlahnya berkisar 66 persen. Ini artinya bahwa kecenderungan untuk mendukung partai Islam di Sulsel pada awalnya sangat kuat.

Akan tetapi seperti sudah disebutkan, popularitas partai Islam terus menurun sejalan dengan '*political engineering*' yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Dengan '*political engineering*' tersebut, maka jelaslah bahwa basis dukungan masyarakat Islam terhadap partai-partai ini terserabut yang kemudian menyebar ke partai lain, bahkan yang sekuler. Dari tabel 3 bisa dilihat bahwa Partai Persatuan Pembangunan tidak pernah mengalahkan partai Golkar selama pemilu di jaman Orde Baru. Partai yang dianggap mewedahi suara umat Islam ini hanya menjadi pelengkap bagi legitimasi Golkar sebagai partai pemerintah.

Tabel 12
Perolehan Suara Masing-masing OPP
untuk Pemilihan Anggota DPR

Tahun Pemilu	Jumlah Perolehan Suara		
	PPP	GOLKAR	PDI
1977	393.521	2.379.834	22.484
1982	317.824	2.79.736	18.109
1987	300.629	3.049.126	37.684
1992	294.214	3.124.003	95.814
1997	322.935	4.017.369	46.103

Sumber: Profil Provinsi RI: Sulawesi Selatan, 1992, dan Dirat Kesatuan Bangsa Prop. Sulsel 2003

Kalau dukungan terhadap Golkar cukup besar, apakah hal itu memang karena masyarakat benar-benar mendukung Golkar atau karena ketakutan atau ditakut-takuti? Pertanyaan semacam ini biasa diajukan, mengingat perubahan dukungan pada umumnya di Indonesia dikarenakan adanya intimidasi politik yang luar biasa, yang dengan itu masyarakat terpaksa mendukung Golkar. Seorang tokoh yang sempat diwawancarai, Dr. Kadir, memang mengakui adanya ketakutan sebagian masyarakat oleh manuver dan aksi

sebagian tokoh dan aktifis Golkar selama pemilu. Meskipun tidak mengingkari hal itu, ia melihat sisi lain yang menyebabkan dukungan terhadap Golkar di Makassar dan Sulawesi Selatan pada umumnya cukup kuat, seperti terlihat sejak pemilu 1977. Faktor utama yang menyebabkannya, menurut Kadir, adalah karena "para ulama sudah mendukung Golkar sejak lama". "Dan seperti juga di tempat lain", ia melanjutkan, "dukungan terhadap Golkar oleh ulama didasarkan pada pilihan yang benar sesuai hati".

Dukungan ulama terhadap Golkar memang seperti menjadi jaminan akan adanya dukungan umat terhadap partai ini. Kharisma biasanya menjadi faktor utama. Seperti dalam kasus-kasus lain, kharisma telah mendudukkan ulama sebagai orang atau kelompok yang berpengaruh, sehingga semua tingkah laku dan sikap politiknya menjadi rujukan masyarakat. Golkar di Makassar telah lama berhasil memasukkan KH Abdul Rahman Abu Dalle, pimpinan Ponpes DDI, kedalam barisannya. Kiai ini adalah figur ulama yang paling kharismatik di Sulawesi Selatan, sehingga legitimasi untuk mengikutinya cukup besar yang dengan demikian pilihan rakyat pun terhadap Golkar itu tidak salah. Hal itu terjadi pada tahun 1976, pada waktu Golkar mulai muncul. Pilihannya untuk ke Golkar telah diikuti oleh para ulama lainnya.

Alasan dukungan ulama terhadap Golkar adalah karena Golkar itu partainya penguasa, yang dengan demikian bisa masuk ke dalam keputusan-keputusan politik lebih besar atau bahkan nasional. Seperti dalam sebuah permainan bola, maka masuknya ke dalam Golkar seolah ikut bermain, yang berarti bisa ikut mempengaruhi kebijakan pemerintah. Masuknya ke Golkar tentu saja karena ada kepentingan lebih besar yang bisa diraih daripada menjadi oposisi. Dengan bergabung dengan Golkar, masyarakat akan lebih mudah membangun madrasah. Jadi, apa yang disebut sebagai *mashálih al 'ám* (kemaslahatan umum) bisa lebih didapat, ketimbang ketika berada di luar lapangan.

Memang bisa dikatakan bahwa Ulama di Sulawesi Selatan, menurut Kadir Ahmad, cenderung lebih akomodatif kepada kelompok-kelompok yang lebih besar untuk keuntungan-keuntungan yang lebih besar pula. “Ini kondisi ulama kita di sini, tidak senang dengan konfrontasi”, kilahnya. Kelihatannya perjuangan ulama seperti ini berkaca dari perjuangan Kahar Muzakkar yang konfrontatif dan tidak berhasil karena harus menabrak tembok besar. Para ulama ini menyadari betul bahwa kemaslahatan umum harus didahulukan ketimbang memaksakan politik pribadi demi untuk perjuangan Islam dan kepentingan umatnya sendiri di masa mendatang.

Kadir mencoba menjelaskan pernyataannya tentang kuatnya pengaruh ulama di Makassar dan Sulsel dengan menggambarkan budaya Makassar atau Bugis yang biasanya berorientasi paternalisme. Paternalisme adalah semacam bapakisme dengan mana orientasi masyarakat didasarkan pada tindakan atau bahkan paham yang dipunyai para elit yang menjadi tumpuan mereka. Dengan kata lain, dukungan terhadap Golkar oleh masyarakat Makassar atau Bugis adalah karena mereka mengikuti dukungan dan langkah politik para elit di sana. Pola ini cukup mudah bekerjanya, yakni ketika para tokoh telah mendukung Golkar, maka bukan mustahil hal itu diikuti oleh masyarakatnya di bawah. Ini berarti bahwa berhasilnya Golkar memegang para elit Makassar bisa diibaratkan seperti jalan lurus bagi munculnya dukungan dari masyarakat bagi Golkar, karena dukungan masyarakat adalah paternalistis, di mana mereka masih melihat dan berpegang pada politik para tokoh mereka.

Dengan mengikuti keterangan Kadir, bisa dikatakan bahwa partai Islam di Makassar bisa didukung masyarakat di sini kalau ada para tokoh mereka yang mendukungnya. Para tokoh ini adalah para bangsawan yang dahulunya punya kaitan dengan tokoh-tokoh kerajaan di sini. Kebanyakan masyarakat tidak mendukung partai Islam karena para tokoh tadi tidak ikut partai Islam. Partai Islam itu tidak dianggap sebagai perwakilan untuk umat Islam atau mewakili aspirasi mereka. Jadi meskipun dalam kampanye partai-partai Islam

kelihatan cukup kuat, dukungan masyarakat tidak signifikan terhadap partai ini. Ini bisa dianggap sebagai penjelasan bahwa partai Islam bagi masyarakat Sulsel tidak identik dengan Islam, meskipun pada awalnya identifikasi seperti itu begitu kuat, setidaknya dilihat dari dikampanyekannya oleh sebagian tokoh di sana.

Pengaruh ini bisa dilihat terutama setelah munculnya ‘Golkar baru’ setelah dilakukannya reformasi politik oleh bangsa Indonesia pada umumnya. Golkar yang saat itu sedang goyah setelah reformasi seolah tertolong dengan hadirnya para tokoh tadi. Dengan budaya paternalistis itu, masyarakat Bugis dan Makassar seolah tidak peduli dengan apapun yang terjadi dengan Golkar, asalkan partai ini didukung oleh para figur berpengaruh mereka. Dalam kasus Golkar ini, kehadiran tokoh-tokoh seperti Habibie memang memperkuat dukungan masyarakat terhadap Golkar. Posisi Habibie yang justru jadi presiden dan juga Yusuf Kalla yang jadi wapres seolah telah membawa kejayaan dan keharuman bagi masyarakat di Makassar, sehingga karenanya, hal itu juga ikut memperkuat dukungan masyarakat terhadap Golkar.

Pertanyaan berikutnya, kalau figur itu ikut menentukan kemenangan Golkar, siapa di antara mereka yang paling dominan? Seperti dikemukakan di atas, ulama adalah di antara figur yang berpengaruh tadi di samping tentu saja para keturunan bangsawan Bugis dan Makassar. Perlu dikemukakan di sini bahwa golongan di Sulawesi Selatan, menurut Dr. Kadir, dibagi ke dalam dua kategori, yaitu golongan adat, yang diwakili para bangsawan, dan golongan syara’, diwakili oleh para ulama. Penggolongan semacam itu masih terjadi sampai sekarang.

Dengan penggolongan semacam itu jelaslah bahwa selain karena ketokohan, dukungan masyarakat di sini juga didasarkan pada struktur. Apa yang dimaksud dengan struktur adalah tingkatan masyarakat, di mana kalangan bangsawan merupakan kalangan tertinggi dan berpengaruh. Istilah struktur di sini sekedar untuk

membedakan dari kultur, dengan mana paternalisme yang muncul didasarkan apada kualitas ketokohan yang dalam konsep sosiologis lebih bersifat *'achieved'* daripada struktur yang biasanya dianggap *'ascribed'*. Jadi, apa yang dimaksud dengan struktur di sini adalah kalangan bangsawan kerajaan yang terus mempunyai pengaruh dalam masyarakat. Dengan begitu jelaslah bahwa selain terhadap para ulama atau tokoh penting, masyarakat di Makassar juga mengikuti tingkah laku dan sikap politik para bangsawan ini. Para tokoh dengan gelar atau nama Andi, misalnya, biasa menjadi panutan masyarakat termasuk dalam berpolitik.

Bisa dikatakan bahwa kedua faktor ini lebih kuat berpengaruh terhadap politik umat Islam di sini daripada faktor lainnya, termasuk faktor Islam. Makanya, meskipun masyarakat Makassar dan Sulsel cukup kuat Islam nya, partai Islam ternyata tidak bisa menghimpun dukungan lebih besar daripada partai sekuler, dalam hal ini Golkar. Ini terjadi, seperti sudah disebutkan di atas, karena (kedua faktor) para tokoh dan ulama telah banyak juga yang menjadi pendukung Golkar sejak tahun 1970-an.

Faktor lain yang menarik untuk dimasukkan ketika kita membaca dukungan politik di sini adalah adanya fragmentasi di kalangan umat Islam sendiri. Apa yang dimaksud dengan fragmentasi adalah adanya beragam orientasi ideologis politik di kalangan umat Islam. Perbedaan dalam PPP lebih menonjol sebagai perbedaan ideologis antara kalangan NU dan Muhammadiyah. Karena politik adalah masalah kepentingan, perbedaan ini sering memunculkan ketidak serasian atau bahkan konflik yang justru dapat memperkecil dukungan masyarakat terhadap partai ini. Fragmentasi semacam ini di masa sekarang ini lebih banyak lagi, sehingga dukungan terhadap partai Islam terpecah dan bahkan memperkecil dukungan terhadap partai-partai Islam yang ada secara sendiri-sendiri.

Kedua kelompok atau golongan masyarakat ini memang mempunyai pengaruh politik besar dalam masyarakat di kota

Makassar. Kalau tadi sudah dikemukakan tentang pengaruh ulama dalam politik, termasuk juga tokoh lainnya, seperti Habibie dan Kalla, pengaruh para tokoh dengan berlatar belakang adat, memang tidak sebesar yang disebut pertama tadi. Perannya sekarang ini telah begitu meluntur seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini terjadi karena ketokohan dengan berdasar pada ‘*ascribed*’ kurang mempunyai legitimasi kalau tidak diikuti oleh kompetensi baik dari sisi keilmuan maupun posisi sosial formal dalam masyarakat. Artinya *ascribed status* tidak dengan sendirinya berpengaruh dalam masyarakat Makassar yang modern sekarang ini.

4.4. Fragmentasi Baru

Kekuatan partai Islam memang sudah sejak lama tidak bisa mengimbangi Golkar, karena partai Islam dianggap tidak mewakili Islam. Seperti terungkap di atas, para ulama sendiri sudah banyak yang ikut Golkar bahkan sejak pemilu pertama, 1977, ketika satu partai Islam (PPP) berhadapan dengan Golkar. Di masa reformasi, kelemahan partai-partai Islam dipengaruhi oleh hadirnya banyak partai. Jadi, para pendukung PPP dulu, misalnya, sekarang ini menyebar ke PKB, PBR dan bahkan PAN serta PKS. Ini artinya tidak ada partai berbau Islam yang cukup dominan di Makassar meski harus diakui bahwa Golkar pun menurun dibandingkan dengan perolehannya di masa Orde Baru.

Apa yang terjadi sekarang ini justru seperti mengaburkan primordialisme ideologis yang biasanya muncul dan subur di tahun 1950an. Istilah santri dan non-santri yang mendominasi atau menandai politik di tahun 1950an sudah jauh berkurang, karena situasi yang ada lebih kelihatan melebur, di mana banyak orang yang berasal dari kelompok tertentu justru menjadi tokoh di kelompok lain. Banyaknya partai Islam atau juga perkembangan demografis yang begitu besar telah memungkinkan orang-orang yang berkaliber tokoh tidak bisa tertampung pada partai kelompoknya, sehingga mereka (meski sering juga disebut oportunis), masuk menjadi tokoh di partai

lain. Contoh yang bisa dikemukakan adalah PKS. Partai ini adalah didukung oleh beragam orang dengan orientasi yang berbeda. Meski pada awalnya PKS adalah partai yang lebih berorientasi modernis dengan karakter Wahabi, tidak kurang dari orang NU baik di pusat atau di daerah ada yang ikut menjadi pendukungnya. Bahkan di beberapa daerah, seperti di Makassar sendiri, mereka menjadi tokohnya.

“Saya melihat PKS itu gabungan dari berbagai macam golongan. Justru di Makassar sini anak orang NU yang pegang partai ini. Saya kira ini fenomena baru, yang menandai terjadinya konvergensi berbagai macam kelompok, yang mungkin mendapat sesuatu yg baru melalui PKS. Jadi, orang PKS itu ada yang berasal dari kelompok Muhammadiyah, NU, Golkar, dsb. Ini memang perkembangan baru yang melebur berbagai warna”. Demikian ungkap Kadir.

Agak menarik untuk melihat ketertarikan masyarakat dengan PKS. Partai baru ini secara nasional memang mengungguli partai-partai lama dan besar. Hampir sama dengan di tempat-tempat lainnya, ketertarikan orang dengan PKS kelihatannya karena tawaran-tawaran barunya. Mereka mempromosikan konsep keadilan, bagaimana kembali kepada cara beragama yang konsisten, dan juga masalah penegakan hukum. Meskipun masalah-masalah ini sebenarnya bukan baru, tetapi PKS membungkusnya dengan cara-cara baru, lebih-lebih mereka juga mengemukakannya dalam waktu yang tepat, yakni ketika bangsa Indonesia dihadapkan kepada berbagai masalah penyimpangan. Selama ini, apa yang dikemukakan oleh partai lain agak terasa konservatif, sehingga tidak mempunyai daya tarik. Dengan membungkusnya seolah gagasan-gagasan baru, PKS lebih membawa sesuatu yang bisa diharapkan ke depan, lebih-lebih karena mereka didukung oleh kalangan muda yang lebih enerjik dan terpelajar.

Kehadiran kelompok Islam seperti PKS memang tidak sendirian. Di samping partai ini, misalnya, ada kelompok Islam lainnya yang menyodorkan gagasan Islam seperti halnya PKS. Hizbuttahrir adalah kelompok Islam ini yang juga cukup mendapat sambutan. Dengan makin terbukanya masyarakat, maka orang yang ikut mendukung kelompok ini juga banyak dari mereka kalangan NU atau Muhammadiyah. Hizbuttahrir memang pendatang baru dalam kesadaran beragama. Pendatang baru yang tidak mau terkait lagi dengan orang tuanya. Jadi tidak heran kalau ada pengurus NU yang mempunyai anak yang jadi pengurus atau aktifis Hizbut Tahrir. Para orang tua berkilah bahwa mereka tidak bisa membendung, karena anak mereka sudah mempunyai pilihan-pilihan sendiri. Dan anak tersebut aktif sekali dalam mengkampanyekan program-program Hizbut Tahrir, misalnya tentang khilafah. Bahkan mereka cukup aktif melebihi aktifis Islam lainnya. Contohnya, menurut seorang informan, beberapa waktu yang lalu pada waktu shalat jum'at, aktifis Hizbut Tahrir di semua mesjid menyerukan untuk memperingati Isra' Mi'raj secara serentak.

Selain kelompok-kelompok baru ini, apa yang perlu dikemukakan berkaitan dengan perkembangan politik di Makassar adalah tampilnya KPPSI di panggung politik lokal di sini. Berbeda dengan kelompok-kelompok yang lebih khusus tadi, KPPSI adalah gabungan beragam orang yang datang dari berbagai organisasi. KPPSI cukup menjadi wacana publik saat itu karena para pendukungnya membawa masalah baru, yakni ingin menerapkan syariah Islam di bumi Makassar dan Sulsel pada umumnya.

Ide KPPSI memang menarik banyak orang di sana. Banyak tokoh yang ikut terlibat dalam KPPSI, mengingat idenya cukup baru yang membuat orang penasaran, meskipun untuk kalangan non-Islam ide itu agak merisaukan, untuk tidak mengatakan menakutkan. Sebuah tim telah dibentuk di Makassar, yang kemudian melakukan jajak pendapat ke semua kabupaten. Ini konon mencakup beragam responden baik itu umat Islam, Kristen, dan sebagainya. Apa yang

cukup menarik adalah bahwa hasilnya, 100% umat Islam di birokrasi menginginkan penegakan syari'at Islam. Meskipun demikian, jika dikaitkan dengan keterikatan mereka yang cukup kuat terhadap Islam, sikap mereka itu merupakan sesuatu yang wajar dan logis, karena penerapan syari'at Islam adalah perintah agama. Masalah pun kemudian muncul: apakah penerapan syari'at itu melalui formalisasi atau melalui penanaman nilai Islam dalam kehidupan masyarakat. Formalisasi berarti menempatkan syari'at Islam ke dalam format politik yang ada, yakni syari'at ini dijadikan rujukan hukum formal, sementara penerapan nilai adalah menjadikan semua tatanan nilai, sikap, pandangan dan yang lainnya diwarnai oleh Islam.

Dari jawaban yang muncul, ternyata konon masyarakat di sini lebih memilih untuk tidak memformalkan syari'at Islam. Jadi, apa yang menjadi perhatian mereka adalah bagaimana syari'at Islam dipertegas keberlakuannya dalam masyarakat, yakni masyarakat diharapkan melaksanakannya sebagai bagian dari keharusan agama. Kalau kita memakai bahasa kalangan santri, apa yang dilaksanakan masyarakat adalah 'hikmatut tasyri', yakni melaksanakan dasar-dasar syara dengan tanpa melakukan formalisasi syara sebagai dasar hukum formal atau biasa disebut 'lughotut tasyri'.

Dari beragam kelompok Islam yang ada ini kelihatan bahwa dari satu sisi seolah primordialisme kekelompokan menjadi meningkat tapi dari sisi keislaman sepertinya menurun. Orang-orang seperti di Makassar ini banyak yang lebih mementingkan kekelompokan masing-masing, meskipun tentu saja kekelompokan yang dimaksud bisa jadi sangat berbeda dengan hal yang sama di tahun 1950an. Hal ini bisa dibuktikan misalnya dari hasil pemilu kemaren di mana banyak anggota kelompok organisasi tertentu mendukung partai lain, khususnya partai Golkar.

4.5. Berpolitik Secara Rasional: Temuan Lapangan

Seperti sudah disinggung di atas, tingkat primordialisme yang berkembang di kalangan masyarakat sudah menurun. Asumsi ini berangkat dari kenyataan bahwa modernisasi atau bahkan globalisasi telah bisa meminggirkan sikap-sikap primordialis karena manusia modern dengan keluasan pandangan dan wawasannya akan lebih mempunyai sikap terbuka, dan melakukan segala aktifitas atau hubungannya dalam pola-pola dan perhitungan yang rasional. Apa yang dimaksud dengan rasional adalah bahwa mereka menjalankan segala sesuatunya berdasarkan sistem yang berlaku dan memenuhi segala tuntutan kompetensi seperti yang dituntut oleh sistem yang berlaku.

Tesis seperti itu memang juga masuk akal, setidaknya dengan melihat kenyataan bahwa sekarang ini makin banyak manusia Indonesia yang terdidik, yang karenanya memungkinkan mereka lebih menghargai kompetensi dan kualitas daripada memendam dan terus memegang primordialisme dalam berhubungan dengan sesamanya. Beberapa pikiran yang muncul dari mereka para tokoh di lapangan memperlihatkan keseirangan mereka dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Sikap-sikap primordialis yang biasa terekspresikan dalam sikap sukuisme, golonganisme atau koncoisme dianggap tidak sesuai lagi dalam dunia modern yang lebih mengutamakan rasionalitas. Disadari betul bahwa dunia modern menuntut kemampuan tertentu sehingga KKN tidak lagi sesuai, karena hal itu akan merugikan masyarakat sendiri. Banyak kalangan yang mengutip ajaran Islam yang jelas-jelas pada intinya menghargai kompetensi dalam banyak hal atau bidang. Menurut ajaran itu, semua masalah harus diserahkan kepada ahlinya. Artinya bahwa kompetensi memegang peranan penting dalam ajaran Islam. Kompetensi ini penting, sebab menurut mereka, jika suatu pekerjaan diberikan kepada yang tidak kompeten, maka tinggal menunggu saja kehancurannya.

Pertanyaannya apakah hal serupa berlaku dalam bidang politik? Pertanyaan ini penting mengingat politik kita pada dasarnya masih berkisar atau didukung oleh budaya politik yang parochial di mana partisipasi atau sikap-sikap politik masyarakat bergerak dalam pola yang primordialistis. Dalam hal ini apa yang dominan adalah orientasi golongan, sehingga dalam memilih (*voting*) hal itu tidak didasarkan pada baik tidaknya partai politik atau menguntungkan tidaknya partai bersangkutan bagi kehidupan politiknya atau kehidupannya sebagai warga Negara. *Voting* dalam hal ini lebih didasarkan pada semangat karena partai yang didukung adalah seideologi dengan para pemilih.

Dari hasil wawancara melalui kuesioner (lihat tabel 4) kelihatan bahwa 23.5 persen responden yang berlatar belakang NU memilih Partai Kebangkitan Bangsa saat pemilu 2004. Ini merupakan persentase terbesar dibandingkan dengan pilihan kalangan NU terhadap partai lainnya. Se;ain itu, para anggota NU juga telah memilih Partai Golkar, dan PKS. Pilihan terhadap PKB ini memang masuk akal, karena PKB sering mengklaim sebagai partai NU dan juga memang dianggap oleh sebagian besar orang NU sebagai partainya orang NU.

Table 13
Partai yang Dipilih Responden Pada Pemilu 2004

	Nahdlatul Ulama	Muhammadiyah	Organisasi Islam Lainnya
Demokrat	0.0	33.3	19.2
Golkar	17.6	14.3	15.4
PAN	5.9	9.5	11.5
PDIP	0.0	4.8	0.0
PKB	23.5	0.0	0.0
PKS	11.8	19.0	30.8
PPP	0.0	0.0	3.8
Golput	23.5	0.0	11.5
Ts	17.7	19.0	7.7
Total	100.0	100.0	100.0

Data ini cukup menarik dan memperlihatkan adanya perubahan pola memilih. Kalau dulu di jaman Orde Baru hampir mayoritas masyarakat Makassar menjadi pendukung Golkar karena Golkar telah melakukan intimidasi dan lainnya selain juga karena ada faktor keteladanan kalangan petinggi masyarakat Makassar, pada pemilu 2004 ini sebagian anggota NU mendukung PKB di samping juga PKS. Mengenai yang disebut terakhir hal itu merupakan fenomena baru. Jadi, kalau biasanya orang NU hanya memilih NU, sekarang mereka juga mau memilih orang yang dari sisi ubudiyah berbeda atau bahkan mereka di masa lalu sering menjadi lawan konflik mereka.

Perubahan *electoral behaviour* di kalangan NU ini, seperti terlihat dari data di atas, diperlihatkan dengan adanya jumlah yang cukup besar yang bersikap Golput alias tidak memberikan dukungan kepada partai politik apapun. Jadi secara keseluruhan apa yang bisa dibaca dari hasil *survey* ini adalah bahwa di kalangan NU terjadi perubahan, yang pada satu sisi kelihatan menggeliat dengan meninggalkan Golkar dan kembali kepada induk primordialnya. Pada sisi lain, kalangan NU juga memperlihatkan dukungan terhadap partai luar NU, yakni dengan memilih PKS dan Golput. Jumlah ini lebih besar daripada yang mendukung PKB sebagai partai yang dianggap kendaraannya orang NU.

Kecenderungan yang sama kelihatan juga dari kalangan Muhammadiyah. Jumlah mereka yang memilih Partai Demorat mencapai 33.3 persen, sementara responden Muhammadiyah yang memilih PAN hanya 9.5 persen. Kalau PAN sering dianggap sebagai partainya orang Muhammadiyah, meski partai ini juga bukan partai Islam, memang menarik untuk memahami data lapangan hasil *survey* ini. Lagi-lagi telah terjadi perubahan orientasi politik kalangan Islam ini, di mana mereka tidak lagi mengandalkan dan memberikan dukungannya terhadap partai yang didirikan oleh para pemimpin Muhammadiyah. Sebaliknya, mereka malah memilih partai yang orientasinya sekuler.

Kalau data tentang pemilih NU dan Muhammadiyah menunjukkan kecenderungan kurang mendukung partai Islam, hasil wawancara kuesioner di atas memperlihatkan bahwa jumlah dukungan terbesar oleh kalangan responden itu diperoleh oleh PKS. Dukungan terhadap mereka diberikan oleh kalangan Islam di luar kedua ormas besar itu. Dan dari total seluruh responden, capaian PKS sama dengan capaian Golkar. Ini juga memang capaian luar biasa mengingat partai ini cukup baru dan tidak mempunyai basis massa seperti halnya PKB atau PAN yang masing-masing mengandalkan dukungan dari masyarakat NU dan Muhammadiyah yang masing-masing mempunyai anggota 50 dan 30 juta anggota.

Untuk lebih memahami kecenderungan ini ada baiknya kita lihat alasan mereka dalam memilih partai politik itu. Meskipun terdengar sederhana, alasan memilih menunjukkan orientasi politik pemilih yang dalam banyak kasus masih memperlihatkan pola-pola konvensional dengan bersandar pada orientasi ideologis. Namun perlu dilihat bahwa hal inipun sebenarnya mengalami perubahan yang berarti.

Tabel 14
Alasan Responden dalam Mendukung Partai

	Seideologi	Dukungan Keluarga	Programnya Bagus	Tanpa Alasan	Total
Nahdlatul Ulama	29,4	5,9	29,4	35,3	100,0
Muhammadiyah	23,8	14,3	42,9	19,0	100,0
Org Islam lainnya	23,1	7,7	57,7	11,5	100,0

Data di atas memperlihatkan bahwa alasan-alasan ideologis ternyata lebih kecil untuk pendukung partai dari kalangan NU dan Muhammadiyah. Setidaknya hal itu bila alasan karena program dan tanpa alasan digabungkan. Bagi 42,9 persen responden yang berlatar belakang Muhammadiyah, alasan pilihan dan dukungan terhadap partai yang dipilihnya dalam pemilu 2004 adalah karena partai

tersebut mempunyai program yang bagus. Hal yang sama juga menjadi alasan para pendukung yang berasal dari organisasi Islam lainnya (57,7 persen). Sementara itu dari kalangan NU, mereka yang memilih parpol dengan alasan karena program partai yang dipilihnya bagus berjumlah 29,4 persen. Jumlah ini ternyata sama dengan jumlah yang pilihannya didasarkan karena kesamaan ideologis antara partai yang dipilihnya dengan ideology mereka. Meskipun demikian bisa dilihat bahwa alasan lain (yakni tidak beralasan) ternyata lebih besar jumlahnya, yakni 35,3 persen. Dengan kata lain, lepas dari tidak ada alasan yang jelas, apa yang mungkin adalah bahwa dari 35,3 persen pemilih NU, mayoritas dari mereka nyatanya sedang berusaha melepaskan diri dari keterikatan ideologis (29,4 persen karena program dan 35,3 persen tanpa alasan. Jadi jumlah mereka ini menjadi mayoritas yakni 64,7 persen).

Lepas dari adanya data di atas, pada dasarnya masyarakat kita masih berbudaya politik *parochial*. Karena itulah meski mereka cenderung tidak ideologis dengan cara memilih partai dengan alasan karena programnya bagus atau juga karena mereka hanya ingin keluar dari lingkaran ideologis, partisipasi mereka dalam berpolitik masih rendah. Dari data yang didapat mengenai kunjungan responden menghadiri kampanye, ternyata hanya 35 persen saja yang menghadiri kampanye. Mayoritas responden tidak mengikuti kampanye, yakni sebanyak 52 persen dan 13 persen yang tidak memberikan jawaban. Kenapa kampanye tidak menarik bisa jadi karena kampanye tidak memberikan apa-apa. Mungkin masyarakat kita sering dibohongi ketika kampanye, dan kalangan partai hanya mengobral janji dengan tanpa berusaha merealisirnya. Atau mungkin juga karena para responden sudah menentukan pilihannya, maka kampanye tidak diperlukan lagi. Mereka cukup dengan mendengarkan dari media TV atau Koran tentang partai yang akan dipilihnya di samping tentu juga karena mereka memang sdh memastikan partai pilihannya sesuai dengan adanya kesamaan ideologis tadi.

Tabel 15
Kehadiran Responden
dalam Kampanye Partai Politik

Jawaban	Persentase
Mengikuti	35
Tidak Mengikuti	52
Tidak Jawab	13

Berkaitan dengan dukungan responden terhadap partai politik yang ditandai dengan mengendornya sikap-sikap primordial – karena kebanyakan responden tidak memilih partai yang seideologi dengannya – data lain dari hasil *survey* ini menarik untuk dikaji lebih mendalam. Tabel di bawah memperlihatkan bahwa 56 persen dari responden yang diwawancarai menyetujui adanya partai agama. Ini merupakan pendapat mayoritas, setidaknya ini didukung oleh lebih dari separoh responden. Hanya seperempat lebih sedikit (26 persen) dari mereka yang menyatakan ketidak setujuannya, dan sebanyak 18 persen yang tidak memberikan jawabannya. Alasannya beragam mulai dari soal hak azasi sampai pada perlunya keragaman dalam hal partai politik.

Tabel 16
Sikap Responden Terhadap Partai Agama

Jawaban	Persentase
Setuju	56
Tidak Setuju	26
Tidak Tahu	18

Pertanyaanya, apakah ini tidak bertentangan dengan data di atas yang menunjukkan makin memudarnya sentiment primordial ideologis. Data-data ini memang tidak bisa dipahami kecuali dengan melihat konteks sosio-politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia sekarang. Salah satunya adalah tampilnya Partai Demokrat yang cukup mengejutkan mengingat partai ini di samping baru, ia juga tidak mempunyai dasar pendukung yang berasal dari ormas

seperti halnya PKB. Banyak spekulasi yang dikemukakan mengenai ini, dan yang cukup menarik adalah karena partai politik yang ada, termasuk yang sudah lama seperti Golkar dan PDI (P), ternyata tidak sanggup memberikan kepercayaan bahkan terhadap pendukung lamanya. Orang-orang NU tidak lagi sepenuhnya percaya dengan PKB atau PPP (yang dulu menjadi partai utamanya), karena partai-partai ini bukan saja tidak memperlihatkan arah perjuangan yang dapat menguntungkan umat tetapi juga karena mereka tidak mempunyai kader yang siap pakai. Kegamangan seperti ini terlihat lebih-lebih ketika diadakan pemilihan Presiden dan wakil Presiden. Situasi ini kenyataannya telah diperburuk oleh situasi opportunistis yang diperlihatkan sebagian elit politik untuk mendapatkan keuntungan. Saling mengejek atau merendahkan bukan saja telah menciptakan kebingungan di kalangan para pendukung partai tetapi juga memunculkan sikap *'disappointed'* atau bahkan *'annoyed'*. Bagi kebanyakan dari mereka, coba-coba dengan yang baru adalah jalan keluar yang dianggap pas dan arif. Partai Demokrat mendapat tempat karena juga ia didukung oleh kampanye simpatik yang dapat merebut hati rakyat.

Dengan demikian, saya berani berspekulasi bahwa dukungan politik yang ada tidaklah bersifat permanent dan mengakar. Hal ini akan berubah lagi di masa-masa mendatang. Itu pula sebabnya bahwa persetujuan responden terhadap hadirnya partai agama bukanlah gejala yang aneh atau membingungkan. Ia adalah ekspresi yang mendalam dari sikap-sikap mereka yang suatu saat bisa riil. Dengan kata lain, bisa ada kemungkinan bahwa mayoritas responden ini akan kembali menjadi pendukung 'partai Islam' yang mungkin dulu pernah dilakukannya. Islam tetap menjadi cita-cita meskipun dalam aplikasinya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal partai politik sendiri.

Hal lain yang menarik dari hasil *survey* ini adalah berkaitan dengan pendapat responden tentang posisi Presiden. Ada semacam pandangan yang sama bahwa Presiden itu harus orang Islam.

Pandangan ini dikemukakan oleh 73 persen responden, sementara pandangan yang mengatakan tidak harus orang Islam dikemukakan oleh hanya 20 persen responden (lihat Tabel 8). Alasan yang melatar belakangi pandangan ini hampir seragam, yaitu karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam. Walhasil, pandangan ini hanya berangkat dari realitas sederhana yang bisa dilihat oleh semua orang. Apakah ini ada kaitannya dengan masih mungkin mereka untuk berorientasi Islam atau menggunakan Islam sebagai kendaraan politik, seperti mereka tunjukkan dengan persetujuan mereka atas adanya partai agama?. Memang tidak mudah menjawab pertanyaan ini. Apa yang jelas adalah bahwa pandangan keharusan presiden orang Islam berangkat dari pandangan keterwakilan proporsional dimana mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam.

Tabel 17
Sikap Responden Terhadap Presiden Orang Islam

Jawaban	Persen
Harus	73
Tidak Harus	20
Tidak Tahu	7

Hal senada terlihat ketika responden diminta penilaiannya tentang reformasi politik yang telah bergulir dalam masyarakat Indonesia. Mereka melihat adanya kemandegan (untuk tidak menyebut kemelencengan, dari upaya-upaya reformasi yang dilakukan). Reformasi, sebagaimana sering dikatakan para ahli politik, telah berubah menjadi oklokiasi dan bahkan dalam banyak kasus ketidak stabilan politik sendiri. Konflik muncul di mana-mana, sementara para actor politik tidak berusaha mengerem kebebasan yang diberikan oleh situasi yang dibawa reformasi.

Situasi yang tidak kondusif bagi berhasilnya reformasi ini di antaranya diduga karena sumber daya manusia politik masyarakat Indonesia belum siap. Banyak kader dan elit politik dadakan, yang mendapat keuntungan dari perubahan ini dengan tanpa mempunyai

pengetahuan memadai atau keterampilan berpolitik. Rendahnya sisi ini didukung oleh tidak kondusifnya budaya politik masyarakat sendiri sehingga banyak orang yang pesimis dengan reformasi ini. Beberapa responden melihat kelemahan yang menandai kegagalan ini. Di antaranya, tidak ada *law enforcement*, sehingga tidak ada terapi bagi penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan. Oleh karena itulah, para responden setuju (41 persen) dengan penerapan hukum Islam sebagai alternatif pengganti hukum sekuler, untuk dijadikan hukum nasional. Sementara itu, sejumlah 35 persen dari mereka menyatakan perlunya memperkuat penerapan hukum yang ada (*law enforcement*).

Tabel 18
Perlunya Memperkuat Reformasi

Jawaban	Persen
Mengganti dengan Hukum Islam	41
Menerapkan Hukum Yang ada	35
Tidak Tahu	24

Dari data ini kelihatan bahwa tidak ada konsistensi jawaban dari para responden, sehingga karenanya tidak ada karakter yang pasti dilihat dari sisi primordialisme nya. Meskipun demikian, seperti terlihat dari banyak kecenderungan yang ada, primordialisme politik pada masyarakat yang diteliti tidak lagi menunjukkan keberartian yang menonjol, mengingat responden pada umumnya telah termodernisir oleh perubahan-perubahan yang pada saat sekarang begitu cepat yang dibawa oleh globalisasi.

Daftar Pustaka

- Mattulada, Dr., *Islam di Sulawesi Selatan*, dalam Dr. Taufik Abdullah (ed.) *Agama dan Perubahan Sosial*, CV. Rajawali, 1983.
- Abu Hamid, Dr., *Sistem Pendidikan Madrasah dan Pesantren di Sulawesi Selatan*, dalam Taufik Abdullah (ed.) *Agama dan Perubahan Sosial*, CV. Rajawali, 1983.
- Tommy Thompson, *Menyingkap Misteri Abdul Qahhar Mudzakkar*, Luthfansah, 2002.
- Musdah Mulia, Dr. Siti, *Impelentasi Syraiah Islam Era Otonomi Daerah: Peluang dan Tantangan*, makalah Seminar Hubungan Islam dan Negara, STAIN Banten, Desember 2002.
- Ahmad Ali, Prof. Dr., S.H., M.H., *Syari'at Islam Sebagai Solusi Mengatasi Keterpurukan Hukum*, Makalah disampaikan pada seminar Menggagas Penegakan Syari'at Islam dari Berbagai Aspek Pemikiran, STAI DDI Mangkoso, 9 Juni 2002.
- Abd. Wahab Zakariya, MA, H., *Negara dalam Syari'at Islam*, Makalah disampaikan pada seminar Menggagas Penegakan Syari'at Islam dari Berbagai aspek Pemikiran, STAI DDI Mangkoso, 9 Juni 2002, di Makassar
- KPPSI, *Naskah Rancangan Undang-undang Otonomi Khusus Pemberlakuan Syari'at Islam Bagi Propinsi Sulawesi Selatan*, Hasil Kongres II, 29-31 Desember 2001.

KPPSI, *Dasar Historis, Kultur, Hukum dan Politik Tuntutan Pemberlakuan Otonomi Khusus Pemberlakuan Syari'at Islam*, ibid.

Abu Hamid, Orof. Dr., *Dasar Historis Penegakan Syari'at Islam*, Makalah disampaikan pada Kongres II Umat Islam Sulsel, Desember 2001

Ahmad M. Sewang, Dr., *Islamisasi Kerajaan Gowa Menuju Masyarakat Religius*, makalah disampaikan dalam seminar Budaya, UKM Seni Budaya eSA IAIN Alauddin Makassar, 10 Juni 2002.

Harifuddin Cawidu, *Penegakan Syari'at Islam*, Makalah disampaikan pada seminar Menggagas Penegakan Syari'at Islam dari Berbagai aspek Pemikiran, STAI DDI Mangkoso, 9 Juni 2002.



BAB V

STUDI KASUS MASYARAKAT PARANG TAMBUNG, MAKASSAR

Oleh Jaleswari Pramodhawardani

5.1. Sepotong Kisah

Pada tanggal 15-17 September 1997 kerusuhan sosial berbau SARA yang terjadi di Makassar, merupakan kerusuhan anti Cina yang paling dasyat dalam sejarah “Kota Daeng” itu. “Api dalam sekam” itu ternyata belum padam, dan kini nyalanya jauh lebih besar dibandingkan dengan kerusuhan serupa pada tanggal 10 April 1980 di kota tersebut. Kerusuhan pada tahun itu dipicu oleh isu meninggalnya seorang pembantu rumah tangga bernama Saini Suharti akibat penganiayaan yang dilakukan oleh majikannya yang beretnis Cina. Dalam peristiwa itu mengakibatkan 1.123 rumah dan toko hancur, 29 mobil dan 42 sepeda motor terbakar.

Pada peristiwa 1997, 80 mobil rusak dan dibakar dan 168 sepeda motor habis dibinasakan. Gedung dan toko yang hangus dibakar berjumlah 25 buah. Yang paling banyak adalah bangunan dan toko yang dirusak. Jumlahnya mencapai 1.471 buah. Walikota Ujungpandang (saat itu), Malik B. Masry menaksir jumlah kerugian sebesar 17,5 Miliar rupiah. Dalam peristiwa itu menyebabkan lima orang tewas, 13 orang mahasiswa mengalami luka tembak, dan 116 orang ditahan.

Bencana tersebut dipicu dengan mengamuknya Benny karre, seorang penjual botol yang keturunan Cina, yang berdomisili di Parang Tambung Kecamatan Tamalate, Senin malam tepatnya menjelang Magrib. Ia menganiaya dengan parang hingga tewas gadis 9 tahun yang masih duduk di bangku klas IV SD, Anni Mujahidah Rasuna. Dalam peristiwa itu, Benny yang belakangan diketahui

mengidap gangguan jiwa Schizoprenia Paranoid ikut tewas dihakimi massa.¹

Tragedi Makassar tersebut yang acapkali lebih dipahami sebagai ketegangan berbasiskan primordialisme etnis, menyiratkan bahwa munculnya proses identifikasi seseorang terhadap suatu budaya atau kelompok bisa terjadi atau di picu oleh faktor-faktor eksternal. Dengan kata lain, elemen yang menjadi ciri dan mengikat perasaan primordialisme seseorang hanyalah bahan kasar bagi pengidentifikasian orang tersebut ketika mencari jati dirinya².

5.2. Permasalahan

Bagaimana dengan primordialisme keagamaan dalam masyarakat Islam di Makassar? Penelitian ini ingin melihat sejauh mana aspirasi yang berasal dari suatu kelompok keagamaan terekspresikan dalam kehidupan berpolitik masyarakat.

Apakah perilaku memilih (*electoral behaviour*) masyarakat santri masih dipengaruhi oleh orientasi ideologis (Islam) mereka? Kalau kemoderenan (modernitas) itu berkaitan dengan meningkatnya kapasitas mental masyarakat, dengan mana ikatan-ikatan sempit kesukuan atau keagamaan akan tergantikan oleh ditumbuhkannya solidaritas sebagai kelompok besar, seperti bangsa, apakah semangat kekelompokan atau orientasi kelompok keagamaan masih cukup kuat dalam masyarakat Islam di Indonesia.

Apakah kecenderungan untuk melebur sebagai suatu kelompok Islam dan bagian dari bangsa tumbuh dan terdukung oleh makin moderennya mereka? Kalau tidak, faktor-faktor apa yang menghalanginya. Primordialisme sendiri sebenarnya sesuatu yang wajar yang bisa muncul dalam individu atau masyarakat. Tetapi seperti halnya primordialisme berdasarkan kesukuan atau etnisitas,

¹ Lihat "Suara Demokrasi" No. VI/November/1997

² Lihat Endang Turmudi (2004), Jenkins (1997)

primordialisme keagamaan dalam derajat yang berbeda akan mendorong kepada situasi yang disintegratif manakala tidak dibarengi oleh tumbuh berkembangnya kedewasaan yang berlandas pada kesadaran akan pluralisme dan ditumbuhkannya loyalitas terhadap perbedaan-perbedaan yang ada antar kelompok.

5.3. Gambaran Umum Lokasi Penelitian (Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate)

Dari data rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan yang mencakup delapan daerah pemilihan, terlihat dari dikotomi ideologis, bahwa jumlah perolehan suara daerah pemilihan Sulsel I (kota Makassar) yang terdiri dari 10 kecamatan, merupakan daerah pemilihan yang cukup representatif untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian. Dasar pemilihan tersebut dapat dilihat dari perolehan suara mayoritas parpol Islam disana. Misalnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan parpol yang meraup suara terbanyak di daerah pemilihan Sulsel I, setelah parpol Golongan Karya (Golkar) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan parpol Islam terbanyak ke dua di daerah pemilihan Sulsel I. Demikian pula ditingkat kecamatan, Tamalate, selain keragaman perolehan suara Parpol lain, Partai Keadilan Sejahtera merupakan parpol Islam dengan suara terbanyak dibaawah parpol Golkar. Selain itu, kecamatan Tamalate merupakan kecamatan paling padat penduduknya di kota Makassar dengan pemeluk agama Islam terbesar yaitu 124.020 jiwa (Makassar Dalam Angka, 2004), diikuti berturut-turut agama Kristen 4.468 jiwa dan Katholik 2.703 jiwa

Kecamatan Tamalate merupakan salah satu dari 14 kecamatan di kota Makassar yang berbatasan di sebelah utara dengan kecamatan Mamajang, di sebelah timur Kabupaten Gowa, di sebelah selatan Kabupaten Takalar dan di sebelah barat dengan Selat Makassar.

Kecamatan Tamalatea terdiri dari 10 kelurahan (Barombong, Tj Merdeka, Maccini Sombala, Balang Baru, Jongaya, Bungaya, Pa' Baeng-Baeng, Mannuruki, Parang Tambung, Mangasa) dengan luas wilayah 20,21 km². Dari luas wilayah tersebut tercatat bahwa kelurahan Barombong memiliki wilayah terluas yaitu 7,34 km² dan yang terkecil kelurahan Bungaya 0,29 km². Namun jika dilihat dari kepadatan penduduknya kelurahan Parang Tambung merupakan kelurahan paling padat penduduknya 29.291 jiwa (Laporan Bulanan Desa/Kelurahan, Agustus 2005) dengan pemeluk agama Islam terbesar 25.597 jiwa.

Menurut jaraknya, letak masing-masing kelurahan ke ibukota kecamatan bervariasi antara 1-2 km (Maccini Sombala dan Balang Baru), antara 3-4 km (Jongaya dan Parang Tambung), kelurahan lainnya berjarak 5-10 km.

Pada tahun 2003 tingkat klasifikasi desa/kelurahan di kecamatan Tamalate menunjukkan bahwa 10 kelurahan yang ada memiliki kategori kelurahan swasembada. Lembaga dan organisasi di tingkat desa/kelurahan yang terbentuk di kecamatan Tamalate dengan sejumlah anggotanya secara aktif terlibat dalam program dan kegiatan desa maupun kecamatan. Di setiap kelurahan terdapat satu unit organisasi atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), 26 organisasi pemuda dan 1 kelompok P2A (Petani Pemakai Air). Kecamatan Tamalate terdiri dari 524 RT, 82 RW dan 23 lingkungan.

Hasil sensus penduduk tahun 2000, penduduk kecamatan tamalate sebanyak 253.827 jiwa. Jumlah ini masih bergabung dengan kecamatan pemekarannya (Kecamatan Rappocini) dan pada tahun 2003 jumlahnya 140.306 jiwa, yang berarti rata-rata laju pertumbuhan penduduk 2,21 persen setahun.

Berdasarkan jenis kelamin tampak bahwa jumlah penduduk laki-laki sekitar 68.528 jiwa dan perempuan sekitar 70.778 jiwa. Dengan kelompok umur 20-24 tahun tercatat sebanyak 20.739 jiwa, 15-19 tahun sebesar 16.025 jiwa, sedangkan kelompok umur 65 tahun keatas 3566 jiwa.

Sebagai kecamatan dengan kategori swasembada, Tamalate memang memiliki fasilitas-fasilitas baik sosial, pendidikan dan kesehatan yang relatif lengkap diantara kecamatan-kecamatan lainnya. Dalam bidang pendidikan misalnya pada tahun 2003/2004 jumlah SD, baik negeri maupun swasta berjumlah 39 sekolah dengan 10.568 orang murid dan 370 orang guru. Tingkat SLTP sebanyak 11 sekolah dengan 5.577 prang mudrid dan 371 orang guru. Sedangkan tingkat SLTA terdapat 7 sekolah dengan 4254 orang murid dan 271 orang guru. Perguruan tinggi swasta dengan jumlah mahasiswa 5781 orang dan 285 orang dosen terdapat kampus Universitas Negeri Makassar di Parang Tambung.

Demikian pula pada tahun 2003 di kecamatan Tamalate tercatat 2 rumah sakit umum, 1 rumah sakit umum khusus kusta, 3 puskesmas, 2 pustu, 1 rumah bersalin, dan 90 posyandu. Untuk tenaga medis tercatat 35 orang dokter umum, 13 orang dokter spesialis, 8 orang dokter gigi dan 38 orang paramedik yang terdiri dari 26 orang bidan desa dan 12 orang perawat/mantri

5.4. Profil Responden

Secara umum responden berasal dari latarbelakang sosial ekonomi menengah bawah dengan rata-rata penghasilan Rp.300.000- Rp.1.000.000 sebesar 29% (N=100), dengan latar belakang pendidikan lulus perguruan tinggi 41%, SLTA (33%), dan sebagian besar bekerjasebagai wiraswasta 40%.

Dari perolehan suara hasil Pemilu 2004, terdapat perbedaan di kelurahan Parang tambung dan di tingkat kecamatan Tamalate. Dari tabel 3 terlihat bahwa Golkar mendominasi perolehan suara di kedua tempat tersebut, di tingkat kelurahan parpol Golkar meraup suara 35,7% sedangkan di tingkat kecamatan 59,8%, PAN mendapatkan suara 21,0% sedangkan di tingkat kecamatan 17,7%, PKS di tingkat kelurahan memperoleh suara 11,6% dan 20,4% tingkat kecamatan, Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan meraup 5,3%

ditingkat kecamatan dan 10% di tingkat kecamatan, Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan mendapatkan nilai yang sama di tingkat kelurahan yaitu 5,2% dan Partai Demokrat lebih unggul di tingkat kecamatan dibandingkan dengan PPP yaitu 9,0%

Tabel 19
Daftar Perolehan Suara Pemilu 2004
Perbandingan antara Parang Tambung dan Kecamatan Tamalate

No.	Nama Partai Politik	Parang Tambung %	Tamalate %
1	Partai Nasional Indonesia Marhaenis	26 (0,2)	112 (0,3)
2	Partai Buruh Sosial Demokrat	33 (0,3)	164 (0,4)
3	Partai Bulan Bintang (PBB)	197 (1,5)	993 (2,4)
4	Partai Merdeka	82 (0,6)	489 (1,2)
5	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	675 (5,2)	3129 (7,7)
6	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	683 (5,3)	4074 (10,0)
7	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	38 (0,3)	220 (0,5)
8	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	141(1,1)	402 (1,0)
9	Partai Demokrat	669 (5,2)	3650 (9,0)
10	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	74 (0,6)	406 (1,0)
11	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	14 (0,1)	116 (0,3)
12	Partai persatuan Nahdatul Ummah Indonesia	15 (0,1)	81 (0,2)
13	Partai Amanat Nasional (PAN)	2718 (21,0)	7202 (17,7)
14	Partai Karya Peduli Bangsa	231 (1,8)	1271 (3,1)
15	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	123 (1,0)	933 (2,3)
16	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1504 (11,6)	8296 (20,4)
17	Partai Bintang Reformasi	248 (1,9)	1264 (3,1)
18	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	489 (3,8)	3357 (8,3)
19	Partai Damai Sejahtera	244 (1,9)	1385 (3,4)
20	Partai Golkar	4626 (35,7)	24305 (59,8)
21	Partai Patriot Pancasila	17 (0,1)	78 (0,2)
22	Partai Serikat Indonesia	38 (0,3)	213 (0,5)
23	Partai Persatuan Daerah	10 (0,1)	21 (0,05)
24	Partai Pelopor	60 (0,5)	390 (1,0)
25	Total	12955 (100,0)	40621 (100,0)

Sumber: Kecamatan Tamalate, diolah, 2004

Dalam konteks lokal, komposisi perolehan suara di lapangan memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru dalam melihat realitas politik Indonesia kontemporer, misalnya, mempersoalkan masalah primordialisme keagamaan masyarakat yang terekspresikan melalui dukungan terhadap partai politik.

Tapi sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penting untuk di garisbawahi apa yang dikatakan oleh Taufik Abdullah (1987), tentang kompleksitas Islam yang diperhadapkan dengan “kekuasaan” atau “negara” sebagai kekuatan yang terorganisir. Mengapa ini perlu? Karena Islam dengan segala kompleksitasnya tidak saja harus berhadapan faktor-faktor yang berada diluar dirinya, tetapi juga dengan dirinya. Dengan kata lain, Islam sebagai konsep yang universal itu juga bisa diberikan batas-batas geografis politik dan sering pula etnis. Dalam konteks ini adalah Indonesia.

Menurutnya partai politik adalah gejala baru dalam sejarah penghadapan Islam terhadap kekuasaan. Kecuali disaat-saat tertentu seperti waktu Pemilu, pengaruh-pengaruh politik Islam, sebagai organisasi modern, terhadap massa, relatif terbatas. Hal ini menurut Abdullah karena masih tersedianya pranata lain yang cukup ampuh, partai politik Islam tidak pernah “sempat” mengadakan konsolidasi intern yang utuh. Dalam kasus NU misalnya, tanpa adanya jaringan pesantren dan hubungan pengaruh langsung antara ulama dengan komunitas mereka masing-masing, misalnya, hampir tidak bisa dibayangkan NU akan sanggup tampil sebagai salah satu partai terbesar di tahun 1950-an dan partai terkuat kedua pada tahun 1971.

Karenanya membicarakan partai Islam disini, tidak ada salahnya jika suatu batasan diberikan pada arti “Islam” dalam hubungan dengan kekuasaan dan negara. ini. Setidaknya ada alasan dan tahapan yang dijelaskan Abdullah, mengapa muncul sikap dan perilaku politik yang menggunakan kata-kata Islam didalamnya.

Pertama, Adanya keprihatinan moral dan doktrinal terhadap keutuhan komunitas spiritual Islam. Tanpa adanya keprihatinan

terhadap keberlakuan dan kelanjutan nilai-nilai spiritual yang merupakan dasar dari “komunitas” ini, maka tak dapat dipikirkan “adanya sikap politik Islam. Kedua, melalui keprihatinan tersebut maka dirumuskanlah ideologi Islam. Ketiga, dan dari sini pulalah himbauan ke arah terciptanya solidaritas sosial yang lebih kuat dari dari komunitas spiritual diletakkan.

Gambaran di atas, akan dipergunakan untuk melihat bagaimana primordialisme keagamaan “bekerja” di tingkat masyarakat lokal.

5.5. Primordialisme, Agama dan Pemilu

Komoditas agama, oleh banyak kalangan, selalu diletakkan dalam 2 kutub yang berbeda. Sebagian memosisikan agama dalam kotak yang netral dengan segenap transformasi sosial yang diemban. Sementara, sebagian yang lain justru menempatkan sebagai yang sarat dengan kepentingan politik pengembannya. Tarik-menarik untuk menyeret agama dalam lumpur politik, selalu dipenuhi dengan relasi yang menafikan, bahkan menghancurkan antara satu dan yang lain. Hal itu karena tempat agama yang sesungguhnya adalah dalam kotak netral, yang menjadikan agama mudah ditunggangi berbagai kerompok kepentingan.³

Fenomena tersebut yang juga terjadi menjelang Pemilu 2004. Di berbagai media tergambar bahwa semua partai, terutama yang berbasiskan agama, berlomba-lomba untuk *vote getting* sebanyak-banyaknya. Mereka menggunakan beraneka ragam media. salah satu media efektif dan ampuh yang digunakan adalah agama. Itu karena agama dipandang mampu merekatkan emosionalitas massa konstituennya (Azyumardi Azra, 2000). Maka, dengan sengaja partai-partai membangkitkan sentimen keagamaan massa untuk meraup sebanyak-banyaknya suara basis massa.

³ Lihat MN Harisudin, Agama, primordialisme dan Pemilu, Republika, 27 Februari 2004

Target perolehan suara dalam pemilu ternyata telah membutuhkan partai-partai untuk menunggangi agama yang semula netral, menjadi sangat partisan.

Ironisnya, massa pemilih di lapis bawah sangat sedikit yang "melek" dan sadar politik. Sebagian malah menggantungkan pilihan-pilihan politik berdasar pada fatwa atau perilaku masing-masing tokoh. Kecenderungan paternalistik membuahkan sikap yang senantiasa ingin diarahkan secara kolektif. Akibatnya, pilihan-pilihan politik lebih sering didasarkan pada kedekatan dan emosionalitas seorang tokoh daripada pilihan-pilihan rasional berlandaskan visi, misi, dan program partai. Kesadaran politik yang terbebas dari anasir-anasir tokoh tampaknya belum dapat diterima secara umum. Mereka jauh lebih "menikmati" dikungkung oleh pilihan politik tokohnya (A Gaffar Karim, 1995).

Dalam konteks tersebut, agama dengan potensi primordialismenya semakin keras diteriakkan. Elite politik yang hendak meraup banyak kepentingan, tahu betul betapa agama merupakan sarana menggiurkan. Karena agama dengan aneka bentuk primordialisme merupakan kekuatan dahsyat untuk menggalang dan menyatupadukan konstituen dalam payung partai politik tertentu.

Tidak mengherankan, elite merasa gerah jika beberapa pihak bersikeras memisahkan antara persoalan agama dan politik. Sebab basis massa politik mereka jelas akan tergerogoti, jika benar-benar agama tidak dapat dilibatkan dalam kancah politik.

Kenyataan ini menurut Harisudin dapat disadari, karena primordialisme dalam agama telah mempersembahkan *truth claim* kepada segenap pemeluknya. Di sini, kebenaran tidak lagi terstruktur secara kolektif tetapi bersifat personal-individual. Kebenaran hanya dilihat dalam *inner circle* kelompok, sementara di luar itu adalah jenis ketidakbenaran yang harus diperangi dan bahkan dimusnahkan. *Term minna* (golongan kita) dan *minhum* (golongan mereka) merupakan petanda hitam-putih yang digunakan untuk membedakan

golongan kita sebagai yang benar dan mereka sebagai yang salah. Kebenaran jenis itu tentu saja sangat rentan menimbulkan konflik.

Selain itu, Pemilu presiden 2004 memunculkan analisis politik termasuk pengkajian ulang "politik aliran" yang pernah berkembang tahun 1950-an. Berbagai analisis itu menjadi menarik karena akan melihat apakah sepanjang 40 tahun terjadi kontinuitas atau diskontinuitas geneologi sejarah budaya-politik kita. Pengalaman Pemilu 1955 misalnya menjelaskan polarisasi masyarakat Jawa ke dalam empat partai besar: PKI ("abangan"), NU (santri "tradisionalis"), Masyumi (santri "modernis") dan PNI ("priyayi")⁴

Bagaimana dengan Pemilu 2004 kemarn? Apakah parpol Islam cukup ampuh untuk mendongkrak perolehan suara dalam pemilu? Kendatipun primordialisme agama yang disebar para tokoh dalam partai acap kali mengundang perkelahian massal dan kerap kali dituduh menjadi penyulut konflik dalam masyarakat, namun di tingkat lokal tidak selamanya semua kekhawatiran tersebut terjadi. Di beberapa daerah pada Pemilu 1999 dan 2004 di Makassar lalu menjadi bukti.

Paralel dengan kondisi di Jawa, di Makassar dan Sulawesi Selatan pada umumnya, pada pemilu 1955 ada dua partai besar Islam yang mendominasi perolehan suara, yakni Masyumi 41,8% dan NU 14,9%. Tabel dibawah ini menunjukkan hasil pemilu 1955 di Makassar dan Sulawesi Selatan dan bandingannya dengan perolehan suara di seluruh Indonesia.

⁴ Lihat Suhadi, Tranformasi Politik Aliran Kompas 11 Agustus 2004

Tabel 20
Hasil Pemilu Tahun 1955
Wilayah Sulawesi Selatan

No	Nama Partai	Perolehan Suara (%)
1	Masyumi	41,8
2	Nahdatul Ulama	14,9
3	PSII & Perti	10,5
4	PNI	4,3
5	Partai Kristen	13
6	PKI	4,5
7	Partai lain	21,7

Sumber : Profil Provinsi RI: Sulawesi Selatan, 1992

Tabel 21
Perbandingan Hasil Pemilu 1955
Wilayah Sulawesi Selatan dan Indonesia

No	Partai Politik	Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara	Suara Seluruh Indonesia (%)
1	Masyumi	41,8	20,9
2	Nahdatul ulama	14,9	18,4
3	PSII & Perti	10,6	4,2
4	PNI	4,2	22,3
5	Partai Kristen	12	4,7
6	PKI	4,5	16,3
7	Partai-Partai Lain	21,7	13,1
8	Total	100	100

Sumber: Profil Provinsi RI; Sulawesi Selatan, 1992

Jika kita perbandingan dengan pemilu 2004, kita bisa melihat untuk kesekian kali NU menampakkan wajah politiknya. Pemilu legislatif membuktikan keandalan politik NU dengan memosisikan PKB dalam tiga besar, serta laris-manisnya kiai NU

yang diperebutkan oleh para capres dalam pemilu presiden. NU memang mempunyai nalar politik yang “tajam”, dengan “modal politik” yang besar, yakni fanatisme massa. Pertanyaannya adalah seberapa “cerdas” nalar politik NU dalam kancah pertarungan pilpres putaran kedua, mengingat dalam sejarahnya, politik NU sering berjud pada *sad ending*?

Kendatipun Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak melabelkan diri sebagai parpol Islam dan lebih memilih platform nasionalis, namun agak sulit bagi kita untuk tidak menghubungkannya dengan NU yang membidik massa tradisional yang sama. Berbeda dengan tahun 1955 di mana NU mendapatkan perolehan suara terbesar ke dua di Makassar dan Sulawesi Selatan (14,9%) dan Nasional (18,4%), PKB hanya mendapatkan 1% dari perolehan suara di Parang Tambung dan (2,3%) di tingkat kecamatan Tamalate.

Selain itu, dalam kaitannya dengan dukungan suara yang diberikan kepada parpol tertentu, sebagian besar responden mengatakan bahwa program yang bagus lebih merupakan daya tarik parpol ketimbang unsur lainnya. Seperti yang tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 22
Alasan Mendukung Parpol tertentu

No	Alasan Mendukung Parpol tertentu	%
1	Seideologi dengan responden	23
2	Karena keluarga	23
3	Mempunyai program yang bagus	37
4	Tidak menjawab	17
Total		100

Sumber : Hasil penelitian, Tamalate 2005

Secara hakiki, NU merupakan organisasi keagamaan (*jam'iyah diniyyah*) yang tentunya berorientasi pada pendidikan dan dakwah. Dalam *Qanun Asasi li Jam'iyati Nahdlatul Ulama*, K.H

Hasyim Asy'ari menegaskan posisi NU yang berdiri di “tengah” (*tawasuth*) sebagai penjaga tradisi keagamaan masyarakat lokal dari ancaman gerakan puritanisme Islam. Fungsi utama NU bukanlah pada ranah politik, tapi pada pengembangan rekayasa sosial-kemasyarakatan melalui pendidikan dan dakwah.

Namun, menurut Syaiful Arif⁵, memisahkan agama dengan politik adalah mustahil, sebab selain bersifat privat, agama juga merupakan ajaran tata perilaku kemanusiaan, sehingga ia bukan hanya sistem teologi tetapi juga sebuah kebudayaan yang kompleks. Demikian juga dengan NU, sebab sebagai *jama'ah diniyyah*, tradisi keagamaan NU syarat dengan penetrasi politis.

Dalam Tafsir Kebudayaan(1992), Clifford Geertz memetakan struktur Islam Jawa yang ia sebut sebagai *religion as a cultural system* (agama sebagai sistem budaya). Dalam hal ini, agama sangat potensial bagi praktik politisasi, sebab praktik keagamaan dan sistem teologinya mampu menciptakan kesatuan nilai yang menyedot ketundukan massa. Akhirnya terciptalah primordialisme berdasarkan nilai keagamaan, yang dalam kalkulasi pangsa politik sangat menguntungkan.

Sebut saja tradisi fiqh, yang merupakan “perangkat kelembagaan” bagi “tujuan budaya” keagamaan NU. Fiqh yang merupakan yurisprudensi Islam memang menyediakan banyak alternatif pengambilan hukum. Dalam praktiknya, fleksibilitas kaidah fiqh tersebut dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Kontroversi fatwa haram kepresidenan perempuan, berulang kali dipolitisir demi menggajal Megawati, baik pada Pemilu 1999 maupun Pemilu 2004 ini.

Demikian juga hubungan pemimpin dengan warga yang bersifat paternalistik. Kiai sebagai pemimpin agama berfungsi sebagai “bapak” terhadap “anak-anaknya” yakni para santri. Sebagai guru,

⁵ Lihat Syaiful Arif “Kritik Nalar Politik NU” JIL 6 September 2004

kiai mempunyai kewenangan bukan hanya dalam hal pengetahuan, tapi juga perilaku kehidupan. Dalam hal kepemimpinan politik, kiai mempunyai otoritas penuh untuk mengarahkan santrinya kepada pilihan politik yang “dihalalkan” agama.

Pemilu pertama masa Orba tahun 1971, menjadi babak baru diskontinuitas sejarah politik aliran. Dalam titik inilah sebenarnya kita baru bisa memeriksa kapan batas-batas kekaburan tercipta dan apa saja yang mempengaruhinya. Aswab Mahasin (1993) telah melakukan kajian proses pengkaburan (blurring) politik aliran. Dia mengajukan konsep "santrinisasi abangan" dan "santrinisasi priyayi". Fakta kuatnya mobilitas santrinisasi ke dalam politik kekuasaan juga menunjukkan telah terjadi "priyayinisasi santri". Kuntowijoyo⁶ menyebut, dan saya sepakat, peran lembaga pendidikan agama yang diselenggarakan negara memiliki andil besar dalam mengkaburkannya.

Menurut Suhadi ada dua hal lain meski disebut, sesuatu yang tidak kalah berpengaruh, pertama, menciptakan lembaga politik yang amat canggih, Golkar, yang menjadikan kian samarnya solidaritas ideologis. Kendatipun dua partai lain masih dibangun atas dasar sentimen ideologis, namun partai-partai Islam ke PPP dan partai abangan dan non-Islam ke PDI, membuat Golkar menjadi ruang baru yang ingin selalu keluar dari dikotomi ideologis. Karena itu, partai ini, kini memiliki "kekenyalan" strategis dan setidaknya memiliki beban ideologis secara historis.

Kedua, masyarakat Islam terbesar, nahdliyin, (NU) memiliki modal kultural. Institusi ini mampu menjadi jembatan antara mereka yang "taat beragama" dan yang "tidak taat" dalam pergaulan sosial sehari-hari. Dalam forum kultural itu kaum abangan secara tiba-tiba merasa dirinya di dalam (inside) komunitas santri, tanpa harus kehilangan identitasnya awal sebagai abangan.

⁶ Lihat Kuntowidjojo, Pragmatisme Religius, Kompas 7 Juli 2004

Sebagai mesin politik Orde Baru, Golkar menunjukkan efektivitasnya dalam meraup massa terutama di Sulawesi Selatan di mana perolehan suara Golkar selalu mayoritas. “Keunikan” ini setidaknya sementara waktu menjelaskan bahwa, pertama tidak ada korelasi positif antara agama dan perolehan hasil suara pemilu. Apalagi jika kita menyimak wawancara dibawah ini yang dilakukan kepada bapak Ahmad, salah satu pengurus LKMD tentang kemenangan Golkar dalam beberapa kali pemilu.

Kami memang mayoritas agama Islam, mbak. Tapi kenapa Golkar selalu menang di Sulawesi Selatan, karena kita merasa Golkar sudah lama mengakar di masyarakat Sulawesi Selatan, banyak tokoh-tokoh masyarakat Sulawesi yang menjadi tokoh Golkar. Dan budaya panutan kami terhadap yang lebih tua sangat kental. Apalagi Jusuf Kalla dari Sulawesi juga⁷.

Mungkin hal ini menjadi penjelas juga, kendatipun pemberlakuan syari’at Islam telah diajukan ke DPRD tetapi tidak cukup membuat konstituen setia Golkar berpaling kepada Parpol yang berbasisan keagamaan. Bagi Bapak Baddaruddin ketua RT 13

Bagi saya dan keluarga, juga yang saya lihat di masyarakat kami. Tokoh lebih penting daripada latar belakang Parpolnya. Apakah itu Islam atau nasionalis ...⁸

Dalam konteks Parangtambung, terpilihnya anggota DPRD dari partai politik PAN, lebih merupakan persoalan bagaimana pesona kualitas pribadi menjadi pertimbangan terpilihnya PAN sebagai parpol kedua setelah Golkar di parang tambung. Berikut ini kutipan secara bebas dari wawancara Ajid Sirojo,⁹ anggota DPRD Makassar yang untuk kedua kalinya terpilih.

⁷ wawancara dengan bapak Amad tanggal 19 September 2005r

⁸ Wawancara dilakukan pada tanggal 21 September 2005

⁹ Wawancara tanggal 18 September 2005, dikediaman bapak Ajid

Menurut saya, masyarakat sekarang sudah pintar-pintar. Tidak bisa kita mengajak hatinya melalui pendekatan-pendekatan instan dekat-dekat pemilu. Alhamdulillah saya sudah terpilih untuk kedua kalinya. Kiat saya selama ini, saya berusaha hidup dengan masyarakat lingkungan saya. Mencoba paham dan peduli dengan persoalan-persoalan nyata mereka. Contohnya, saya mengusulkan dana abadi dari masyarakat untuk masyarakat. Yaitu sejumlah uang Rp 1000 rupiah setiap bulan tiap Rumah tangga. Kenapa itu saya lakukan? Karena pernah di dekat tempat tinggal saya ada yang meninggal salah satu anggota keluarganya. Saya heran hingga sore kok belum dimakamkan ternyata mereka tidak sanggup membeli kain kafan untuk yang sudah meninggal itu. Masya Allah, sejak saat itu saya mengajak pengurus-pengurus kelurahan maupun kecamatan untuk seling peduli dengan sesama warga. Saya tidak mempunyai beban untuk kalah atau menang, karena saya melakukan ini bukan untuk menaikkan suara saya pada pemilu kemarin. Tapi ini merupakan kewajiban saya sebagai warga kampung saya. Alhamdulillah pemilu kemarin saya masih dipercaya. Masyarakat sini walaupun sebagian besar beragama Islam, tapi tidak langsung percaya begitu saja dengan janji-janji partai Islam, mereka lama-lama mengerti visi misi calon dan bukti nyata lebih penting

Pertanyaan berikutnya apakah dikotomi budaya, lebih-lebih politik, antara santri- abangan, religius-sekuler secara umum lenyap? Sebaiknya kita tidak tergesa-gesa menarik jawaban, lebih-lebih kalau hanya menjadikan Pilpres menjadi barometer. Mengapa? Sebab akan membuat kita kurang jeli melihat fakta-fakta relasi agama dan politik yang akan berkembang dalam politik Indonesia kontemporer saat ini dan ke depan, baik dalam skala nasional lebih-lebih di tingkat lokal.

5.6. Beberapa kenyataan sosial politik berikut ini mungkin menarik diperhatikan.

Usulan Piagam Jakarta dalam Amandeman UUD 1945 tahun 2000 menunjukkan kekuatan "politik aliran" masih terkonsolidasi dengan baik. Meski gagal, tetapi keinginan untuk menghidupkan dasar keagamaan sebagai basis ideologi masih kuat di sebagian masyarakat. Keberhasilan kelompok tertentu mengajukan pasal pendidikan agama dalam UU Sisdiknas No 20/2003 merupakan contoh masih kuatnya politik aliran. Sempat juga muncul gagasan RUU Kerukunan Umat Beragama tahun 2003. Dalam konteks lokal, gagasan penerapan Syariat di Padang, Tasikmalaya, Cianjur, Pamekasan, Mataram, Makassar dan tempat lain, jelas menjadi ruang eksperimentasi baru politik agama.

Selain itu adanya aneka fenomena kontemporer seperti keinginan meng-UU-kan KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang sementara ini masih berstatus Inpres, gagasan tentang Kitab Undang-Undang Hukum "Pidana Islam" (?), RUU Hukum Terapan Peradilan Agama, dan Perda "Syariat Islam" dalam otonomi daerah, bahkan Di Makassar, melalui Kongres Ummat Islam I yang dilaksanakan oleh KPPSI (Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam) pada tanggal 19-21 Oktober 2000 mencetuskan deklarasi untuk penegakan syariat Islam di Sulawesi Selatan. apakah hanya dibaca sebagai fenomena "pragmatisme-religius" seperti yang dikatakan Kuntowijoyo. Apa yang terjadi dilapangan setidaknya menunjukkan, sedang terjadi transformasi politik aliran yang penting diperhatikan, bukan hanya secara teoritis, tetapi lebih-lebih dalam realitas politik dalam kaitan dengan demokratisasi.

Bpk. Dahlan Wakil ketua Muhamadiyah Sulawesi Selatan sekaligus wakil sekretaris Majelis Ulama Indonesia, juga Ketua II bidang kerohanian Golkar, dan isterinya Ibu Dhalan ketua Majelis Taklim Golkar se kota Makassar memberikan penjelasannya dalam wawancara tanggal 18 September 2005.

Apakah ada friksi-friksi berbasiskan agama di Parang Tambung? Tidak ada. Kendatipun terdapat beberapa aliran keagamaan di Parang tambung seperti NU dan Muhammadiyah, namun sejauh ini tidak ada konflik eksternal diantara mereka. Merujuk kepada pemilu 2004 yang lalu misalnya. begitu banyak Partai politik berlabelkan Islam seperti PKS, PPP, Partai Bulan Bintang (PBB) namun tidak terjadi konflik diantara konstituen. PAN no 2 di Parang tambung. Parang tambung lebih melihat tokoh ketimbang lambang-lambang Islamnya. Masyarakat sudah pintar. Mengapa Sulawesi Selatan selalu menang Golkarnya dibandingkan parpol Islam lainnya? Karena Tokoh-tokoh Golkar selama ini sudah banyak membangun di daerah Sulawesi Selatan. Gubernur sekarang, sebelum menjadi gubernur, anggota dewan sebelum jadi anggota dewan jadi ketua Golkar. Dan di Sulawesi Selatan kita mempunyai budaya panutan. Kita memang memberlakukan syari'at Islam, namun bukan syari'at Islam yang kaku seperti di Arab sana. Seperti saya, saya orang Muhammadiyah, yang Golkar. Disini kehidupan beragama berjalan baik. Kita boleh milih apa saja. Memang kalau dilihat PKS sebagai parpol Islam baru banyak mengundang simpati pengikutnya. Mereka aktif di masjid-masjid. Dan targetnya anak-anak muda. Itu strategi yang bagus. Mengingat sebagian besar kami orang Sulawesi Selatan, mempergunakan mesjid sebagai tempat berkumpul. Tapi itu bagus saja. Tidak merasa sebagai saingan. Apalagi ada konflik-konflik berdasarkan keagamaan.

5.7. Penutup

Dari fenomena ini bisa dibaca, *pertama*, bahwa nalar politik masyarakat (Islam) tidak lagi sekedar menyandarkan dan hanya bermodalkan primordialisme massa semata. Secara perlahan primordialisme keagamaan tengah mengalami “keruntuhan”. Secara internal, sebagian masyarakat dengan basis organisasi keagamaan

tertentu, NU misalnya (terlebih anak muda) telah mengalami “pencerahan” pemikiran, sehingga mampu membebaskan diri dari “dogmatisme” tradisi serta hegemoni kiai.

Kedua, banyaknya partai politik Islam alternatif menjadikan pilihan terhadap parpol Islam tertentu menjadi kian selektif. Partai-partai baru yang mengandalkan dukungan massa Muslim seperti PKS, PBB, PKB, PPP, atau PAN, dalam beberapa hal harus bekerja keras untuk terlihat lebih progresif dan maju, khususnya dalam kepemimpinan/regenerasi dan platform.

Ketiga, hal di atas sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari kian meningkatnya kesadaran politik masyarakat. Kini massa mengambang (depolitisasi) telah berlalu. Kesadaran masyarakat terhadap politik bahkan telah “maju” dari yang diperkirakan banyak parpol Islam. Salah satu “melek politik” tersebut ditunjukkan melalui maraknya golongan putih (golput) pada pemilu 2004 kemarin, sebagai akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap parpol.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik. 1987. *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia (kumpulan tulisan)*. LP3ES. Jakarta
- Geertz, Clifford. 1992. *Politik Kebudayaan*. Kanisius. Yogyakarta
- _____. 1992. *Tafsir Kebudayaan*. Kanisius. Yogyakarta
- Turmudi, Endang. 2004. Fundamentalisme dan Wacana Politik Penerapan Syariah, dalam Primordialisme & Konflik Golongan; Wacana Politik Syariat Islam. PMB-LIPI. Jakarta

Sumber Lain

MN Harisudin, Agama, primordialisme dan Pemilu, Republika,
27 Februari 2004

Kuntowidjojo, Pragmatisme Religius, Kompas 7 Juli 2004

Suhadi, Transformasi Politik Aliran Kompas 11 Agustus 2004

“Suara Demokrasi” No. VI/November/1997

Syaiful Arif “Kritik Nalar Politik NU” JIL 6 September 2004

BAB VI

KESIMPULAN

Oleh Abdussomad

Indonesia adalah negara yang multietnik dan agama. Oleh sebab itu, bisa dipahami bila masalah suku, ras dan agama (SARA) merupakan masalah yang rentan terhadap konflik sosial. Terutama dalam hubungannya dengan politik. Dalam pemilu, khususnya, ikatan primordialisme keagamaan tak jarang menafikan watak pluralisme bangsa Indonesia sehingga menimbulkan sejumlah ketegangan sosial. Ketegangan sosial ini tidak hanya terjadi antarsesama umat beragama, tetapi juga dengan sesama umat yang seagama, seperti antarumat Islam yang menjadi penduduk mayoritas negara.

Meskipun Islam adalah agama yang paling dominan, sejak awal berdirinya republik ini kekuatan politik Islam tidak mengejawantah ke dalam satu ideologi politik yang sama. Setidaknya sampai tahun 1960-an kekuatan politik Islam terfragmentasi ke dalam dua politik aliran besar, yakni kekuatan politik santri dan abangan. Hasil pemilu pertama tahun 1955 secara tidak langsung memperlihatkan adanya ikatan primordialisme yang kuat antara aliran keagamaan dan afiliasi politik umat Islam. Gambaran yang sama juga terlihat, baik di kabupaten maupun di kota Malang. Meskipun kedua kota ini bersebelahan dengan daerah tapal kuda yang didominasi oleh kelompok santri, pengaruhnya ternyata tak sampai ke kedua kota ini. Seperti halnya di tingkat nasional, di kedua kota ini kekuatan politik kelompok abangan tampak dominan. Hal ini menunjukkan bahwa di kedua kota ini pengaruh tradisionalisme Jawa masih tertanam kuat. Secara histories, kota ini dulunya memang merupakan pusat kekuasaan kerajaan Hindu Singasari dan Majapahit.

Adanya ikatan primordialisme yang kuat pada era 1950-an juga tampak di Sulawesi Selatan, khususnya Makassar. Di daerah yang secara historis pernah menjadi bagian dari pusat kekuasaan sejumlah kerajaan Islam, kekuatan politik Islam mendominasi hasil pemilu pertama 1955. Tetapi, fenomena ini secara berangsur memperlihatkan perubahan. Keterikatan kalangan santri ke partai Islam mengalami pemudaran. Politik pecah-belah yang dilakukan rezim Orde Baru dengan kebijakan politik yang bersifat *to co-opt and to discredit* telah memporak-porandakan partai politik Islam. Di bawah kebijakan politik yang represif kebijakan tersebut, elit politik Islam dan elit lokal di daerah ini mengambil sikap politik akomodatif, yakni menggabungkan diri ke partai pemerintah, yakni Golkar. Dengan pertimbangan untuk kemaslahatan umum, mereka melihat bahwa sikap akomodasionisnya itu akan dapat mempengaruhi kebijakan politik dari dalam. Tetapi, ini tidak berarti bahwa mereka telah meninggalkan idealisme perjuangan politik Islamnya, yakni terciptanya masyarakat yang Islami. Bagi mereka, perubahan strategi perjuangan tidak dengan sendirinya akan mempengaruhi tujuan yang dicita-citakannya karena partai politik dipandang sekadar sebagai alat. Oleh sebab itu, dengan disponsori oleh ulama dan bangsawan setempat, selama masa Orde Baru Golkar selalu mendominasi politik di Makassar dan Sulawesi Selatan pada umumnya.

Dominasi yang sama juga terlihat baik di kabupaten maupun kota Malang. Di kedua kota ini satu-satunya partai Islam PPP selalu berada di bawah Golkar. Tetapi, tidak seperti di Makassar secara umum kemenangan Golkar di kedua kota ini tidak ditopang oleh mayoritas ulama. Sebagai salah satu basis NU di Jawa Timur, mayoritas ulama lebih memilih bergabung ke PPP. Hal ini bisa dipahami mengingat NU merupakan elemen utama dalam PPP. Oleh sebab itu, berbeda dengan Makassar, aspirasi umat Islam untuk menegakkan syariat Islam di kedua kota ini kurang memperoleh gaungnya. Untuk sebagian hal ini bisa dipahami mengingat mayoritas umat Islam di kedua kota ini merupakan pendukung utama tradisionalisme Jawa. Dengan mengacu ke hasil pemilu pertama 1955

di kota Malang, misalnya, tampak sekali bahwa pengaruh Islam modernis di kota ini sangat kecil.

Di bawah kebijakan politik Orde Baru yang represif politik Islam formal memang mengalami kematiannya. Tetapi, ini tidak berarti tertutupnya saluran alternatif politik umat Islam. Kebijakan tersebut telah merangsang tumbuhnya gerakan politik kultural yang dikemas dalam bentuk pengajian terbatas (*usrah*), dakwah, diskusi agama dan berbagai kegiatan keagamaan ekstrakurikuler, khususnya di kampus-kampus umum. Secara tidak langsung gerakan ini telah pula menjadi sarana proses Islamisasi, terutama kepada mereka yang ditengarai berasal dari latar belakang abangan. Sebagai konsekuensinya, batasan antara santri dan abangan menjadi kabur. Demikian pula halnya dengan batasan tentang politik Islam itu sendiri. Politik Islam tak lagi bisa dipahami secara ideologis karena pengertiannya telah mengalami perluasan makna.

Sebagai konsekuensi atas perubahan konsep dan batasan tersebut, proses desekularisasi politik Islam tak lagi dipandang sebagai sebuah paksaan, tetapi sebagai sebuah keniscayaan. Aspirasi politik umat pun menjadi terfragmentasi melampaui batas primordialisme. Fenomena ini terlihat dengan jelas pada hasil pemilu 1999 dan 2004 yang demokratis yang ditandai dengan lemahnya kekuatan politik partai Islam. Tidak seperti tahun 1950-an, partai politik Islam tak lagi memperoleh akar yang kuat karena umat Islam lebih melihat implementasi program sebuah partai sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pilihan politik mereka ketimbang faktor ideologi. Kalaupun pada pemilu 2004, partai Islam PKS di Makassar berhasil meraih suara yang cukup signifikan, perolehan tersebut bukan didasarkan atas faktor ideologi kepartaian yang diusungnya, melainkan lebih karena janji politik yang ditawarkannya, khususnya program *good governance*.

Terjadinya perubahan perilaku memilih umat Islam tersebut secara jelas menggambarkan bahwa masalah primordialisme politik

umat Islam semakin kehilangan signifikansinya. Temuan yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa sikap politik umat Islam tampak semakin dewasa dan rasional. Kedewasaan ini tak hanya diwujudkan dalam bentuk perilaku politiknya, tetapi juga dalam tataran hubungan sosial sehari-hari. Dalam kehidupan sosial keagamaan kerukunan hidup antarumat Islam tampak semakin baik. Perbedaan penafsiran dan tradisi keagamaan semakin mampu ditanggapi secara lebih arif dan rasional. Kearifan ini juga ditunjukkan, misalnya, oleh MUI kota Malang dalam menanggapi kasus solat dua Indonesia yang didakwahkan Gus Roy. Selain itu, Seperti terlihat di kelurahan Kauman, kota Malang, pimpinan Muhammadiyah, misalnya, juga mampu memisahkan antara persoalan perbedaan pemahaman keagamaan dan pekerjaan. Hal ini terlihat dari banyaknya warga NU yang bergabung dalam bisnis dan usaha yang dimiliki Muhammadiyah.

Dalam konteks politik, selain idealisme program, kekuatan kharisma dan kepemimpinan elit politik telah menjadi aspek yang sangat penting. Dibandingkan dengan program kepartaian, aspek ini nampak jauh lebih kuat pengaruhnya. Hal ini diperlihatkan oleh keunggulan partai-partai besar di ketiga lokasi penelitian. Fenomena ini menunjukkan masih kuatnya budaya paternalisme dalam masyarakat Indonesia. Salah satu sebabnya adalah karena mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dalam budaya petani dan bukan budaya industri.

Dalam dunia yang semakin mengglobal kecenderungan memudarnya ikatan primordialisme agama memiliki dampak yang positif bagi pembangunan nasional. Meskipun ada banyak pihak yang berusaha untuk mempolitisasikan persoalan pluralisme untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu, dalam banyak hal usaha ini mengalami kegagalan. Beberapa insiden bom di Makassar, misalnya, tak menjadikan daerah tersebut menjadi disintegratif. Demikian pula halnya dengan kasus penyerangan gereja yang pernah terjadi di kota Malang. Seperti tampak dalam jawaban responden di

kota Malang, banyak konflik politik yang dinilainya sarat dengan kepentingan politik dan oleh sebab itu, dipandang tak perlu ditanggapi dengan sentimen keagamaan.

Selain adanya gerakan pembaruan pemikiran Islam yang memberikan pencerahan pada umat Islam, untuk sebagian memudarnya ikatan primordialisme tersebut merupakan hasil dari keberhasilan pembangunan pendidikan yang terutama dilakukan rezim Orde Baru. Proses modernisasi dan pembangunan yang berlangsung secara berkesinambungan telah membuat penduduk lebih mampu berpikir secara rasional. Lebih-lebih dalam satu dasa warsa terakhir yang ditandai dengan semakin besarnya peranan yang dilakukan media massa, khususnya televisi, dalam proses sosialisasi dan pendewasaan masyarakat. Dalam kondisi seperti ini masyarakat semakin mampu menerima adanya berbagai sumber informasi sehingga peranan ulama dan elit lokal yang selama ini menjadi agen utama *cultural broker* semakin kehilangan ruhnya. Seperti sebuah pasar proses modernisasi dan pembangunan telah memberikan sejumlah pilihan hidup dan kebebasan untuk keluar tradisi.

Kalaupun dewasa ini masih tampak adanya sejumlah partai politik Islam yang menjadikan ikatan primordialisme keagamaan sebagai nilai jual, fenomena tersebut merupakan hal yang wajar. Dalam iklim politik yang demokratis kehadiran partai politik tersebut telah membantu memperkaya khasanah politik Islam di Indonesia. Tetapi, ini tidak berarti bahwa masalah primordialisme keagamaan di Indonesia telah sepenuhnya berakhir karena sebagai bangsa yang pluralis masalah ini bersifat laten.

